

# HIMPUNAN SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN

*Periode Januari - Maret 2005*



**BIRO HUKUM DAN HUMAS  
DEPARTEMEN PERTANIAN**

sudat

Simpt fi

bib L

**Bibliografi**

# HIMPUNAN SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN

**PERIODE JANUARI - MARET 2005**



208.05  
347.781.8  
BIR  
h  
20.001  
2.551

**BIRO HUKUM & HUMAS  
DEPARTEMEN PERTANIAN**



## DAFTAR ISI

|  | <i>Halaman</i> |
|--|----------------|
| 1. Sambutan Menteri Pertanian Pada Konsultasi Publik Pemanfaatan Produk Rekayasa Genetik .....                             | 1              |
| 2. Sambutan Menteri Pertanian Pada Acara Penyerahan Bantuan Dari Dharma Wanita UPW Departemen Pertanian .....              | 9              |
| 3. Sambutan Menteri Pertanian Pada Pembukaan Rapat Kerja Inspektora Jenderal Departemen Pertanian .....                    | 12             |
| 4. Keynote Speech Menteri Pertanian Pada Seminar Nasional Restrukturisasi Industri Gula Di BPPT, .....                     | 18             |
| 5. Sambutan Menteri Pertanian Pada Rapat Koordinasi Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) 2005 .....                   | 32             |
| 6. Sambutan Menteri Pertanian Pada Acara Panen Perdana Padi dan Peresmian proyek-Proyek di Propinsi Sumatera Selatan ..... | 41             |
| 7. Sambutan Menteri Pertanian Dalam Peluncuran Buku Seratus Tahun Departemen Pertanian .....                               | 47             |
| 8. Key Note Speaker Menteri Pertanian Pada Seminar Revitalisasi Pertanian Dalam Rangka                                     |                |



|   |     |
|---|-----|
| Ulang Tahun Seratus Tahun Departemen<br>Pertanian .....   | 53  |
| 9. Sambutan Menteri Pertanian Pada Seminar<br>Nasional Peran Teknologi Dalam Pembangunan<br>Pertanian Indonesia .....   | 65  |
| 10. Sambutan Menteri Pertanian Pada Acara<br>Peringatan Ulang Tahun PT. Pert Ani (Persero)<br>Ke 46 .....   | 80  |
| 11. Strategi dan Kebijakan Pemerintah Untuk<br>Mendukung Kegiatan Investasi Di Sektor Pertanian ...   | 85  |
| 12. Sambutan Menteri Pertanian Pada Acara Fokus<br>Diskusi "Membangun Kembali Sektor Pertanian<br>Pada Daerah Yang Terkena Gempa Dan Tsunami<br>Di Aceh Dan Sumatera Utara" ..... | 97  |
| 13. Sambutan Menteri Pertanian Pada Lustrum<br>Lembaga Pendidikan Perkebunan .....  | 101 |
| 14. Keynote Speech Menteri Pertanian Pada Diskusi<br>Nasional "Efektivitas Strategi Dan Kebijakan<br>Pertanian Nasional" .....  | 110 |
| 15. Speech Remark Minister Of Agriculture Gala<br>Dinner Of The Indonesia Association Of British<br>Alumni (IABA) Cares On Aceh .....   | 122 |



|  |     |
|--|-----|
| 16. Sambutan Menteri Pertanian Pada Acara<br>Peringatan Tahun Baru Islam 1426 Hijriyah Di<br>Masjid Nuruliman Departemen Pertanian .....                                 | 125 |
| 17. Ceramah Menteri Pertanian Pada Musyawarah<br>Tudang Sipulung Tingkat Kabupaten Sidenreng<br>Rappang Tahun 2005.....  | 130 |
| 18. Sambutan Menteri Pertanian Pada Konferensi<br>Regional Pembangunan Pertanian dan Nelayan<br>Pasca Bencana Alam Dan Tsunami .....                                     | 38  |
| 19. Welcome Speech Minister Of Agriculture<br>Courtessy Call Of Exchange Visit For Agricultural<br>And Rural Development Officers From<br>Afghanistan In Indonesia ..... | 146 |
| 20. Keynote Addres Menteri Pertanian RI Dalam<br>Rembug Penyuluhan Pertanian Perhiptani .....  | 54  |
| 21. Sambutan Menteri Pertanian Ri Pada Acara<br>"Panen Perdana Jagung Hibrida Melalui Pola<br>Kemitraan" di Karanganyar .....  | 164 |
| 22. Keynote Speech Menteri Pertanian Pada Seminar<br>Nasional Industri Peternakan 2005 Di Fakultas<br>Peternakan, Universitas Padjajaran Bandung .....                   | 174 |
| 23. Orasi Ilmiah Menteri Pertanian RI Pada Wisuda<br>XIX Tahun 2005 Universitas Sahid Jakarta .....  | 185 |



24. Sambutan Menteri Pertanian RI Pada Panen Jagung Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan .....205
25. Keynote Speech Menteri Pertanian Pada Seminar & Lokakarya Nasional "Neoliberalisme Sebagai Tantangan Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Petani" Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, .....213
26. Keynote Speech Menteri Pertanian Pada Seminar Nasionallkatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia (IMAKAHI) Di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor .....225
27. Sambutan Menteri Pertanian Pada Penerbitan Media Warta Bulanan Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) .....242



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN  
PADA KONSULTASI PUBLIK PEMANFAATAN  
PRODUK REKAYASA GENETIK  
JAKARTA, 7 JANUARI 2005**

**Yang saya hormati,**

- Saudara Ketua dan Anggota Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetika,
- Para Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat,
- Para Pimpinan Perusahaan Swasta,
- Para Akademisi dan Peneliti,
- Para Pejabat Pemerintah dan Para Undangan Lainnya

**Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,**

Pertama-tama, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wata'alla, atas rahmat dan berkahNya kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti Konsultasi Publik Pemanfaatan Produk Rekayasa Genetik yang diselenggarakan oleh Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik. Saya pandang

Konsultasi Publik ini memiliki arti yang penting karena dengan dilakukannya Konsultasi Publik ini Departemen Pertanian telah mengawali langkah baru di tahun baru 2005, yaitu dengan mengajak semua pemangku kepentingan, untuk secara bersama-sama meluruskan niat untuk kembali menyikapi Pemanfaatan Produk Rekayasa Genetik, khususnya dalam bidang pertanian dan Pangan, di Indonesia. Gagasan, pemikiran, pendapat, dan sikap kritis yang konstruktif saudara-saudara akan menjadi modal yang sangat berharga bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang efektif dan efisien serta dapat diterima secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kita sama-sama telah mengetahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat. Kemajuan industri dan teknologi informasi menjadikan jagad raya seolah-olah sempit dan tidak berjarak lagi. pergi ke belahan dunia dan jagad raya, saling berkomunikasi secara audio maupun visual bukan merupakan hal yang mustahil lagi. Di sektor pertanian, telah dan sedang berkembang bioteknologi modern, yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasiskan molekul dan informasinya.



## **Saudara Peserta Konsultasi Publik yang saya hormati,**

Bioteknologi modern yang berkembang sangat cepat itu memungkinkan manusia dapat merekayasa perubahan bentuk dan sifat baru suatu organisme atau dengan cara baru. Kita sama-sama tahu ilmuwan telah sukses dalam menghasilkan klon-klon ternak, ikan hasil modifikasi genetik, tanaman hasil modifikasi genetik, jasad renik pertanian hasil modifikasi genetik.

Kita tahu bahwa produk-produk bioteknologi modern itu dirakit dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia, karena keunggulannya dalam produktivitas, kualitas, dan efisiensi produksi. Namun demikian, kenyataan yang kita hadapi sampai sekarang ialah masih adanya kontroversi tentang keamanan dari produk bioteknologi tersebut terhadap fungsi lingkungan dan manusia.

Kita sama-sama menyadari bahwa semua teknologi, termasuk produk bioteknologi modern tidak ada yang mutlak tidak beresiko (zero risk). Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pemanfaatan produk bioteknologi modern, kita harus bersikap hati-hati. Sebagai perwujudan dari sikap hati-hati itu,

lembaga internasional, regional, dan masing-masing negara telah menyusun dan mengimplementasikan peraturan yang mengatur pemanfaatan produk rekayasa genetik berdasarkan kajian ilmiah.

Berdasarkan laporan terakhir, sekurangnya 18 negara telah mengambil keputusan bahwa beberapa jenis tanaman transgenik boleh ditanam secara komersial, karena berdasarkan hasil kajian ilmiah sampai saat ini, resiko tanaman transgenik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, masih dalam batas-batas yang dapat diterima. Dengan memperhatikan keunggulan-keunggulannya, perkembangan tanaman transgenik (GMCrop) di dunia meluas sangat cepat, bila pada tahun 1996 baru seluas 1,7 juta ha, maka pada tahun 2003 telah mencapai 67,7 juta ha yang ditanam di 18 negara. Demikian juga halnya dengan ekspor-impor biji-bijian rekayasa genetik, ternyata bahwa sekurang-kurangnya 168 negara telah mengimpor produk rekayasa genetik. Padahal dari 168 negara pengimpor itu, hanya sekitar 21 negara yang secara resmi menyatakan bahwa produk rekayasa genetik aman untuk pangan, pakan, dan produk olahan.

## **Hadirin yang saya hormati,**

Bagaimana dengan sikap bangsa Indonesia? Tuntutan akan peningkatan kebutuhan produk pertanian khususnya pangan terus meningkat, sehingga kita selalu membutuhkan berbagai terobosan inovasi teknologi untuk mencapai ketahanan pangan secara berkelanjutan. Salah satu alternatif yang menjanjikan adalah produk rekayasa genetika. Tanpa kita sadari sekarangpun untuk beberapa komoditi kita telah mengimpor dan mengkonsumsi produk-produk tersebut. Akan tetapi kita juga telah menyadari bahwa Indonesia harus juga bersikap hati-hati dalam kaitannya dengan produk rekayasa genetik.

Sebagai perwujudan dari sikap hati-hati itu, pada tahun 1999, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Bersama empat Menteri (Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, dan Menteri Negara pangan dan Hortikultura), membuat peraturan tentang pemanfaatan organisme hasil modifikasi genetik, yang dalam implementasinya dilaksanakan oleh Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik, serta Tim Teknis

Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan. Komisi dan Tim Teknis ini bertugas untuk melakukan kajian apakah suatu organisme hasil modifikasi genetik itu aman terhadap lingkungan dan manusia. Berdasarkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan pangan itulah, maka Departemen Pertanian mengambil keputusan tentang penggunaan organisme hasil modifikasi genetik.

Saudara-saudara tentunya ingat, bahwa pada tahun 2000, 2001, 2002, dan 2003 pemerintah Indonesia telah mengizinkan penanaman secara komersial kapas transgenik di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita juga sama-sama tahu bahwa sebagian petani mendapatkan keuntungan dari budidaya kapas transgenik karena hasil panen yang tinggi. Namun kita juga tahu, bahwa beberapa petani tidak memperoleh keuntungan dari budidaya kapas transgenik tersebut, karena hasil panen yang rendah. Kenyataan itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa teknologi yang kita anggap unggul tidak selalu cocok untuk semua lahan dan segala kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu, informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang keunggulan, kelemahan, dan persyaratan-

persyaratan suatu teknologi perlu kita informasikan kepada para pengguna teknologi.

### **Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Walaupun isu keamanan hayati dan keamanan pangan telah kita coba tangani dengan peraturan tersebut, kenyataannya kontroversi terus terjadi. Saya tahu bahwa sebagian dari Saudara-saudara tidak puas dengan peraturan yang sudah ada dan tidak puas dengan pelaksanaannya. Untuk itu, marilah kita bicarakan dan perbaiki bersama, sehingga kita mempunyai perangkat yang kita setuju bersama untuk menyikapi produk bioteknologi modern.

Dengan memperhatikan tantangan yang kita hadapi, saya juga ingin menantang kepada rekan-rekan akademisi dan peneliti agar meningkatkan intensitas dan fokus penelitian dalam bidang bioteknologi, khususnya rekayasa genetika, sehingga kita mempunyai kemampuan dalam menciptakan produk rekayasa genetika karya anak bangsa yang kelak mampu bersaing di negeri sendiri. Disamping itu penelitian dalam bidang resiko keamanan hayati dan keamanan pangan juga harus kita kembangkan.



**Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Pada kesempatan ini saya mengucapkan penghargaan kepada Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan yang telah menyelenggarakan Konsultasi Publik ini, dan juga penghargaan kepada para pemimpin LSM dan perusahaan swasta yang hadir dan nanti menyampaikan pandangannya atas isu penting ini.

Marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Konsultasi Publik ini menghasilkan saran pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan keputusan dalam kaitannya dengan pemanfaatan produk bioteknologi modern.

Dengan mengucapkan Bismillaahirohmanirohim, Konsultasi Publik ini secara resmi saya buka.  
Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS,



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN  
PADA ACARA PENYERAHAN BANTUAN DARI  
DHARMA WANITA UPW DEPARTEMEN  
PERTANIAN**

**Jakarta, 14 Januari 2005**

**Assalamu'alaikum wr. wh.**

**Yang Saya Hormati,**

- Penasehat, Pengurus Dharma Wanita Unit Departemen Pertanian
- Saudara Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian
- Tim Penanggulangan Bencana Alam Nasional Departemen Pertanian
- Hadirin dan Undangan

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah memberikan segala karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan dapat berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan penyerahan bantuan dari Dharma Wanita Unit Departemen Pertanian kepada Pimpinan Departemen Pertanian yang selanjutnya akan diserahkan kepada

para korban bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Tim Penanggulangan Bencana Alam Nasional Departemen Pertanian.

Bantuan ini merupakan bantuan kemanusiaan sekaligus kepedulian ibu-ibu Dharma Wanita Departemen Pertanian kepada keluarga besar pertanian khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang saat ini sedang mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah SWT.

Saya sebagai Pimpinan Departemen Pertanian merasa haru dan bangga atas upaya ibu-ibu Dharma Wanita untuk ikut berpartisipasi dan menunjukkan kepeduliannya atas musibah yang menimpa ternan dan keluarga besar pertanian yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk itu kami segenap Pimpinan Departemen Pertanian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan dan keikhlasan ibu-ibu Dharma Wanita, yang disamping kesibukannya mengurus keluarga di rumah masih meluangkan waktunya untuk kegiatan kemanusiaan seperti sekarang ini. Mudah-mudahan amal baik ibu-ibu



dicatat sebagai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Saya berharap mudah-mudahan kegiatan ini masih akan terus dilanjutkan oleh ibu-ibu Dharma Wanita, karena berdasarkan pengamatan langsung saya di lapangan, proses pemulihan dampak bencana ini akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan saya kira masih banyak diperlukan bantuan untuk saudara-saudara kita ditempat lain yang juga memerlukan bantuan serupa misalnya di Nabire, Alor dan tempat-tempat lain.

Semoga Allah SWT meridhoi upaya kita semua.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Jakarta, 14 Januari 2005

Menteri Pertanian,

ttd

DR. Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN  
PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA INSPEKTORAT  
JENDERAL DEPARTEMEN PERTANIAN  
CIAWI, 18 JANUARI 2005**

**Yang terhormat,**

- Saudara Inspektur Jenderal dan Para Pejabat Eselon II lingkup Itjen Deptan.
- Para auditor serta hadirin yang berbahagia

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Illahi Robbi, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan pengabdian kita membangun sektor pertanian.

**Hadirin sekalian,**

Saya menyambut baik penyelenggaraan Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian karena dua hal. Pertama, dengan Rapat Kerja ini akan

diperoleh kebijakan-kebijakan strategis di bidang pengawasan guna mendukung kebijakan Departemen Pertanian dalam mewujudkan pelaksanaan manajemen pembangunan pertanian yang bersih, transparan, dan bebas KKN. Kedua, dengan Rapat Kerja ini pula para peserta yang keseluruhan adalah unsur-unsur dalam Inspektorat Jenderal Deptan dapat menyamakan persepsi sekaligus menumbuhkan komitmen untuk meningkatkan kinerja bahkan mampu mengubah Itjen Deptan menjadi lebih bersih dan peduli sesuai dengan ruh/nilai/spirit yang melandasi pembangunan pertanian kita ini. Bersih yang saya maksudkan di sini adalah bebas dari KKN, amanah, transparan dan akuntabel; sedangkan peduli berarti memberikan fasilitas, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, aspiratif dan keberpihakan terhadap kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Saya menyadari hal yang saya sampaikan di atas tidaklah mudah. Namun saya ingin selalu mengatakan, bahwa perubahan-perubahan harus dilakukan secara terus-menerus. Karena perubahan itu menunjukkan adanya keterbatasan kita sebagai makhluk Tuhan. Perubahan-perubahan memang perlu

dilakukan, untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang juga berubah. Sehingga apabila kita tidak berubah, kita akan digilas oleh roda perubahan itu sendiri.

### **Saudara-saudara sekalian,**

Tugas Inspektorat Jenderal Deptan sebagai pengawas internal lingkup Departemen Pertanian hari ini dan ke depan tidaklah semakin ringan, bahkan sebaliknya makin berat. Banyak berkembang stigma dalam masyarakat bahwa pengawas internal seringkali tidak independen dibandingkan pengawas eksternal dan lebih banyak melindungi kepentingan organisasi yang melingkupinya. Kondisi ini saya harapkan tidak terjadi pada Departemen Pertanian khususnya pada Itjen Deptan, karena apa yang dilakukan oleh Itjen Deptan merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan kehadapan Allah SWT. Dengan demikian berarti bahwa Itjen Deptan harus membuktikan bahwa pengawasan internal yang dilakukan sama baiknya dengan pengawasan eksternal dari instansi lainnya.

Dalam kaitannya dengan amanah di atas, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa

sesungguhnya amanah merupakan tuntutan iman sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa : "Tidak ada iman pada orang-orang yang tidak ada amanah dalam dirinya, dan tidak ada agama pada orang yang tidak bisa dipegang janjinya."

### **Saudara-saudara sekalian,**

Dalam waktu yang tidak lama lagi, kita akan memasuki hari ke-100 program Departemen Pertanian. Namun demikian dengan usainya program tersebut, bukan berarti telah tuntas semua tugas kita. Tantangan lima tahun ke depan justru merupakan batu ujian terberat bagi kita untuk melaksanakan 3 program utama Departemen Pertanian yang mencakup : (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian, dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Inspektorat Jenderal Deptan meskipun tidak secara langsung melaksanakan program-program tersebut namun memiliki peran yang strategis dalam menunjang dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Visi Deptan yaitu mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki

integritas moral yang tinggi serta arah kebijakan untuk melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas KKN diletakkan pada urutan pertama dengan satu pemikiran bahwa : aparat yang profesional akan lebih mendukung manajemen pembangunan pertanian yang bersih, peduli, transparan, dan kredibel. Tentu saja dengan terwujudnya hal tersebut maka pembangunan pertanian akan lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan berdampak kepada pemanfaatan sumberdaya pertanian secara lebih optimal dan memberikan insentif bagi investasi.

### **Hadirin Sekalian,**

Saya berharap Inspektorat Jenderal dapat memainkan perannya dengan baik dalam mewujudkan visi tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance yang memiliki karakteristik utama kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi. Selain itu saya juga berharap agar Inspektorat Jenderal dapat menjadi institusi yang berperan aktif dalam memberantas KKN sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Terkait dengan apa yang telah saya sampaikan di atas, sekali lagi saya ingin mengutip hadist Nabi



Muhamat SAW yang pada intinya adalah : "Barangsiapa di antaramu melihat sesuatu yang mungkar, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya; jika dia tidak sanggup, maka dengan lidahnya; dan jika dia tidak sanggup juga, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman." Tentu saja saya berharap kita semua tidak termasuk golongan yang terakhir yang memiliki iman yang lemah.

Saudara-saudara sekalian,

Mudah-mudahan rapat kerja ini dapat berjalan baik dan lancar serta menghasilkan kebijakan yang bermanfaat guna perubahan dan perbaikan Inspektorat Jenderal ke depan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah yang dipercayakan kepada kita untuk mencapai cita-cita luhur dalam membangun pertanian di negara yang kita cintai ini.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 18 Januari 2005

Menteri Pertanian

ttd

**Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS**



**KEYNOTE SPEECH MENTERI PERTANIAN  
PADA SEMINAR NASIONAL RESTRUKTURISASI  
INDUSTRI GULA DI BPPT,  
19 JANUARI 2005**

**Yang Saya horman,**

- Saudara Menteri Negara Riset dan Teknologi/  
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,
- Hadirin peserta seminar yang saya muliakan.

**Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Seminar Nasional Restrukturisasi Industri Gula ini.

Kami sangat menghargai prakarsa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang telah menyelenggarakan Seminar ini, yang menunjukkan dukungan dan perhatian lembaga riset serta lembaga pengkajian dan penerapan teknologi terhadap perlunya upaya pembenahan kinerja pada industri gula kita. Hal ini tergambar dari tema Seminar yaitu : "Selamatkan Industri gulaku, sejahterakan

petaniku". Hasil seminar ini nantinya saya harapkan dapat menjadi salah satu masukan berharga bagi Departemen Pertanian dan Dewan Gula Indonesia dalam menyempurnakan konsep Kebijakan Komprehensif Pergulaan Nasional yang disusun bersama-sama oleh pemangku kepentingan (stakeholders) pergulaan Indonesia.

Secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Bapak Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma'il, MSc yang bersama Tim Restrukturisasi Industri Gula- BPPT telah melakukan penilaian, pengkajian dan juga pendampingan selama dua tahun terakhir, sehingga persoalan manajemen produksi gula di lapangan berhasil direkam secara baik. Hasil ini tentunya akan semakin memperkaya kajian-kajian yang juga telah dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi kita, dalam kerangka perbaikan dan peningkatan kinerja industri gula, khususnya peningkatan kesejahteraan petani tebu.

### **Peserta Seminar yang saya muliakan,**

Potensi Indonesia sebagai sentra industri gula tebu sudah terbukti sejak akhir abad ke XIX dan mencapai puncaknya pada awal abad ke dua puluh,

yaitu pada tahun 1930an. Pada masa itu, produktivitas industri gula dapat mencapai 10-15 ton hablur/Hektar sehingga dengan areal sekitar 200 ribu hektar saja, pemerintah Hindia Belanda mampu memproduksi gula sebesar 3 juta ton. Pada saat ini areal perkebunan tebu kita telah mencapai 350 ribu hektar, dengan produktivitas rata-rata 6 ton hablur/Hektar dan produksi 2,05 juta ton atau 60 persen dari kapasitas terpasang pabrik gula yang ada.

Angka-angka tersebut tentu saja tidak bisa kita bandingkan begitu saja, mengingat di masa kolonial semua aspek dapat dikuasai dan industri gula memperoleh fasilitas istimewa. Perkebunan tebu ditanam di lahan sawah yang subur dengan biaya sewa murah, tenaga kerja juga diperoleh dengan harga murah, lokasi perkebunan tebu sangat dekat dengan pabrik dan ditanam pada hamparan dan blok-blok yang disesuaikan dengan jadwal tebang, prasarana pengairan dan pengangkutan tebu didisain dan dipelihara dengan baik, gula dijadikan barang mewah yang hanya boleh dikonsumsi para petinggi, dan berbagai fasilitas lainnya.



Memasuki masa kemerdekaan *privilege* itu tidak ada lagi. Perlahan-lahan perkebunan tebu bergeser ke lahan kering dengan potensi produktivitas tebu relatif lebih rendah dari lahan sawah. Tebu juga tidak lagi dapat ditata dengan baik oleh manajemen pabrik gula, karena sejak tahun 1975 petani tebu sendiri lah yang mengelola perkebunan tebunya.

Perubahan tersebut ternyata sangat mempengaruhi kinerja industri gula. Petani tebu mulai enggan merehabilitasi tanaman tebunya dan juga enggan menerapkan praktek bertanam tebu yang baik (*good agricultural practices*), perkebunan tebu terserang penyakit *Ratoon Stunting Disease*, terjadi perebutan jadual tebang dan giling tebu yang tidak jarang menerapkan praktek KKN, pemasok tebu yang mengejar target tebang sehingga memanen tebu muda, semakin mahalngnya ongkos buruh tebang, mutu tebang yang rendah sehingga banyak bongkol tebu tertinggal di lapangan, ongkos angkut yang semakin meningkat dan sebagainya. Kenyataan ini diperparah pula oleh ketersediaan kredit yang seringkali datang tidak tepat waktu. Semua praktek tersebut telah menyebabkan reaksi pada manajemen pabrik gula, antara lain dalam bentuk : semakin jarangngya

dilakukan audit teknologi, pemeliharaan pabrik yang minimal, persaingan tidak sehat antar pabrik dengan tujuan mengejar target pasokan tebu, dan sebagainya.

Dengan kondisi yang demikian, seperti sudah diketahui semua pihak, rendemen tebu banyak yang tidak mencerminkan angka sebenarnya, tetapi lebih sering merupakan rendemen "kesepakatan" antara pabrik gula dan pemasok tebu. Kondisi ini semakin parah sepanjang tahun 1998-2000 pada saat pemerintah meliberalkan perdagangan gula sehingga harga gula jatuh di bawah biaya produksi petani maupun pabrik gula.

Dari sisi manajemen perusahaan, kita mencatat beratnya beban perusahaan yang harus menutup kerugian pabrik-pabrik kecil yang semakin menurun efisiensinya karena berbagai sebab, jumlah karyawan yang secara umum terlalu besar, kesulitan menekan biaya manajemen, meningkatnya pungutan dan retribusi oleh pemerintah daerah, keharusan menanggung beban utang perusahaan sebagai akibat penggabungan PTP dari 32 menjadi 14 perusahaan, kesalahan manajemen yang ingin menambah investasi



pada perkebunan sawit sehingga industri tebu kurang mendapat perhatian cukup, dan sebagainya.

Dari sisi teknologi, kita menyadari bahwa teknologi yang digunakan sudah tertinggal sehingga harus dimodernisasi. Pada sebagian pabrik upaya untuk otomatisasi dan komputerisasi menghadapi kendala karena perusahaan tidak cukup leluasa untuk mengurangi jumlah karyawannya. Pabrik gula khususnya BUMN masih diberi tugas untuk menampung tenaga kerja yang ada, dan sedapat mungkin menghindari praktek pemutusan tenaga kerja (PHK).

### **Saudara-saudara yang saya hormati,**

Sistem produksi dan teknologi yang digambarkan tersebut di atas pada gilirannya bermuara kepada penurunan produktivitas yang sangat drastis. Pada tahun 1960 produktivitas masih berada pada 8,96 ton/Ha dan dapat ditingkatkan menjadi 10,12 ton/Ha pada tahun 1972. Angka ini kemudian semakin menurun sejak tahun 1975, tahun dimulainya program Tebu Rakyat Intensifikasi melalui INPRES 9/1975, yaitu dari 9,76 ton/Ha menjadi 6,55 ton/Ha pada tahun 1980 dan mencapai titik terendah

yaitu 3,94 ton/Ha tahun 1998. Produktivitas ini perlahan-lahan meningkat kembali menjadi 5,3 ton haulur/Ha pada tahun 2003 dan meningkat lagi menjadi 6 ton haulur pada tahun 2004.

### **Hadirin yang saya muliakan,**

Upaya pemerintah dalam memperbaiki kinerja industri gula sebenarnya sudah cukup banyak. Dalam hal rehabilitasi pabrik, misalnya, pada saat krisis gula dunia tahun 1980-1981 yang menyebabkan harga gula dunia cukup tinggi, kita telah menjalankan "Program Peningkatan Produksi Gula Dipercepat". Terdiri dari tiga program yaitu (1) Penyehatan Badan Usaha Milik Negara, (2) Konsolidasi dan rehabilitasi pabrik gula di Jawa dan (3) Pengembangan 18 unit pabrik gula baru di luar Jawa. Program restrukturisasi ini didukung pendanaan berupa kredit berbunga rendah seperti kredit Rekening Dana Industri (RDI) untuk PTPN, kredit Program PBSN untuk swasta, serta kredit Program TRI untuk tebu rakyat. Melalui program ini, telah dilakukan penutupan 11 PG yang kurang efisien dari 57 PG yang ada di Jawa dan dibangun 13 PG baru dari target 18 PG baru di luar Jawa. Hasil yang dicapai



terlihat dari peningkatan produksi gula mencapai 2,4 juta ton tahun 1994 dan 2,2 juta ton tahun 1997.

Program tersebut kemudian tidak dapat dilanjutkan, seiring dengan krisis multi dimensi yang diawali krisis moneter tahun 1997, dan pemerintah secara tiba-tiba melepas proteksi terhadap industri gula termasuk penghentian monopoli BULOG. Dampaknya, produksi gula tahun 1998 turun menjadi 1,43 juta ton, impor mencapai 1,7 juta ton, harga gula jatuh dibawah Rp 2.000/kg, hilangnya dukungan kepada lembaga penelitian gula (P3GI). Selain itu beberapa industri gula baru yang sedang dibangun di Sulawesi Tenggara (PG Lambuya dan PG Tinanggea) terhenti pembangunannya. Perusahaan gula terutama PTPN mengalami kesulitan likuiditas karena merugi dan hal yang sama juga dialami petani tebu.

Menghadapi kondisi seperti di atas pada tahun 2001 dan awal 2002 Departemen Pertanian telah memfasilitasi serangkaian pertemuan pelaku industri gula dan petani guna membahas dan mencari solusi menghadapi keterpurukan industri gula nasional. Para pelaku industri gula bersepakat mempertahankan dan meningkatkan kinerja industri gula nasional. Disepakati

Program Akselerasi Peningkatan Produksi Gula Nasional sebagai langkah strategis yang akan diimplementasikan mulai tahun 2002 sampai 2007. Sasaran program ini adalah pada tahun 2007 produksi gula mencapai 3 juta ton dengan biaya produksi yang mampu bersaing dengan negara produsen gula manapun. Titik berat program akselerasi adalah : (1) Rehabilitasi perkebunan tebu melalui penataan tanaman dengan varietas unggul, (2) Rehabilitasi Pabrik Gula, (3) Peningkatan investasi untuk pengembangan industri gula terintegrasi di Jawa dan luar Jawa.

Sesuai kewenangannya, Departemen Pertanian lebih fokus kepada rehabilitasi perkebunan tebu milik petani terutama di Jawa karena 90% areal tebu di Jawa adalah tebu rakyat. Departemen Pertanian memfasilitasi rehabilitasi tanaman tebu rakyat melalui Program Bongkar Ratoon, pembangunan kebun bibit dan perbaikan prasarana pengairan, melalui kegiatan Penguatan Modal Usaha Kelompok/Koperasi (PMUK) yang disalurkan kepada Koperasi Petani Tebu Rakyat yang akan digulirkan lagi pada tahun berikutnya. Pengawasannya dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari wakil petani, wakil pemerintah daerah, wakil

pabrik gula dan wakil lembaga penelitian. Koperasi yang mendapat dana PMUK juga diaudit oleh auditor independen. Dukungan dana APBN 2003 sebesar Rp 66,8 miliar dan 2004 sebesar Rp 74,3 miliar. Selama dua tahun tersebut petani telah membongkar tanaman ratoon dan diganti dengan varietas unggul seluas 55.630 Ha. Disamping itu juga atas swadaya petani dan PG seluas 31.500 Ha atau total 87.130 Ha (42%). Dari hasil tebang 2004, pada blok-blok yang telah direhabilitasi ternyata produksi tebunya meningkat hingga 50-100%, yaitu bervariasi antara 80-150 ton tebu/Ha, dibandingkan 50-70 ton tebu/Ha sebelum dibongkar. Dari hasil ini, memang petani masih mengeluhkan soal hanya sedikitnya peningkatan rendemen yang diperoleh. Sebagai gambaran rendemen rata-rata yang diperoleh petani yang telah membongkar tanamannya di Jawa Timur berkisar antara 6,6-7,5% dibanding sebelumnya antara 5,0-7,2 persen. Sementara pabrik gula swasta di Lampung mampu mencapai rendemen rata-rata 9,8 persen.

Upaya Departemen Pertanian tersebut, dapat dilaksanakan karena adanya kepastian harga gula, yaitu di atas biaya produksi rata-rata. Hal ini terjadi berkat dukungan kebijakan tarif Bea Masuk Gula dari

Departemen Keuangan yaitu sebesar Rp 550/kg untuk *raw sugar* dan Rp 700/kg untuk gula kristal putih, serta Kebijakan Importasi Gula dari Departemen Perdagangan yang didasarkan pada Keppres No. 57 Tahun 2004 yang menyatakan gula sebagai komoditas yang diawasi perdagangannya, dan Keppres No. 58 Tahun 2004 tentang penanganan gula yang diimpor secara tidak sah.

### **Saudara-saudara peserta Seminar yang berbahagia,**

Dari uraian tersebut di atas, kita mencermati betapa kompleksnya permasalahan industri gula kita, di tengah-tengah pasar gula dunia yang terdistorsi akibat perlindungan terhadap industri gula di berbagai negara produsen gula di dunia.

Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah kebijakan yang komprehensif dan integratif dalam membenahi industri gula kita, yang secara tegas menetapkan arah dan tujuannya serta jelas pembagian tugasnya sesuai kewenangan masing-masing institusi. Beberapa hal yang perlu kita cermati dalam penyusunannya, antara lain:



1. Rendahnya efisiensi dan produktivitas yang dicerminkan dengan tingginya biaya produksi gula per kilogram akibat inefisiensi pada usahatani (*on farm*), tebang muat angkut dan penggilingan/pengolahan. Kita memerlukan kajian akademik untuk mengetahui prosentase kehilangan di masing-masing sub sistem itu, sehingga kita dapat menentukan prioritas penanganannya;
2. Kebijakan promosi melalui subsidi pupuk dan bunga bank, bantuan PMUK dan bantuan lainnya yang menyebabkan tingkat ketergantungan petani yang tinggi kepada pemerintah;
3. Kebijakan proteksi melalui tarif bea masuk dan pengendalian impor yang tidak berlebihan, dan tidak mengesampingkan upaya peningkatan efisiensi, sehingga konsumen tidak terus menerus terbebani dan tidak hanya menguntungkan pencari rente;
4. Keberadaan KPTR dan APTR yang mewakili kepentingan petani tebu dalam peningkatan efisiensi di usahatani, pengolahan dan perdagangan gula;



5. Kebijakan restrukturisasi industri gula dan revitalisasi PTPN yang sistematis dan komprehensif untuk menjadi perusahaan yang efisien dan sehat;
6. Pergeseran lahan tebu di Jawa dari lahan sawah ke lahan kering (semi irigasi dan tegalan) karena semakin tingginya biaya oportunitas lahan sawah;
7. Dukungan infrastruktur untuk pengembangan tebu di lahan kering baik di Jawa maupun luar Jawa;
8. Dukungan dana yang memadai untuk kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi budidaya tebu lahan kering, pengolahan dan pengembangan produk (*product development*);
9. Masalah lingkungan dan hubungan sosial kemasyarakatan (*community development*) dengan masyarakat sekitar industri gula.

### **Peserta seminar yang saya hormati,**

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Akhir kata, kepada seluruh peserta seminar saya mengucapkan selamat berdiskusi, semoga kita dapat menghasilkan rumusan dan langkah-langkah kongkrit yang berguna bagi penyempurnaan kebijakan dan

upaya perbaikan kinerja industri gula kita, serta peningkatan kesejahteraan petani tebu dan keluarganya. Terima kasih.

Wabillahitaufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 19 Januari 2005

Menteri Pertanian RI

ttd

DR. Ir. Anton Apriyantono, MS.



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN  
PADA RAPAT KOORDINASI LEMBAGA  
RISET PERKEBUNAN INDONESIA (LRPI) 2005  
Bogor, 24 Januari 2005**

**Yang saya hormati:**

- Para Pejabat dari instansi terkait,
- Para Pengurus Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia,
- Para Pimpinan serta civitas LRPI.

Assalaamu'alaikum Warakhmatullaahi Wabarakaatuh,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wata'aala, karena berkat rahmatNya, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Lembaga Perkebunan Indonesia 2005, di Bogor. Pada kesempatan yang baik ini, saya harapkan rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan kinerja serta kontribusi LRPI terhadap pembangunan, khususnya pembangunan di subsektor perkebunan.



## **Hadirin yang saya hormati,**

Seperti diketahui, perkebunan memegang peranan penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, devisa negara, dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat ini subsektor perkebunan diperkirakan menjadi sumber penghidupan bagi 17,1 juta tenaga kerja. Sebagai penghasil devisa, nilai ekspor perkebunan pada lima tahun terakhir adalah sekitar US\$ 4 miliar per tahun. Pada tahun 2003, dari segi nilai absolut berdasarkan harga yang berlaku. PDB perkebunan terus meningkat dari sekitar Rp 33.7 triliun pada tahun 2000 menjadi sekitar Rp 47.0 triliun pada tahun 2003, atau meningkat dengan laju sekitar 11.7% per tahun. Dengan peningkatan tersebut, kontribusi PDB subsektor perkebunan terhadap PDB sektor pertanian (dengan harga konstan tahun 1993) sebesar 17.6%, sedangkan terhadap PDB nonmigas dan PDB nasional masing-masing adalah 3.0% dan 2.8%.

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang bersifat dinamis sebagai akibat perubahan yang cepat dari lingkungan strategis seperti

liberalisasi perdagangan, perubahan selera konsumen, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, otonomi daerah, konflik sosial, dan tekanan kenaikan biaya produksi. Masalah ini saling terkait sehingga menjadi masalah yang cukup kompleks.

Dalam merespon masalah yang kompleks tersebut, seluruh stake holder perkebunan harus mampu merespon dinamika tersebut secara cepat dan tepat, baik melalui pengembangan teknologi, penyesuaian kebijakan, maupun diplomasi. Semua respon tersebut membutuhkan teknologi dan informasi yang bersifat dinamis. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, peran LRPI menjadi sangat penting. Sebagai lembaga litbang, LRPI seyogyanya mampu memberikan masukan-masukan teknologi yang mempunyai prospek jangka panjang, pemecahan masalah yang sedang dihadapi, serta memberikan evaluasi terhadap berbagai penerapan teknologi dan kebijakan dalam bidang perkebunan.

### **Hadirin yang saya hormati,**

Sebagai lembaga penelitian perkebunan yang sudah demikian lama berkecimpung dalam memecahkan masalah-masalah perkebunan, Rapat



Koordinasi yang akan dilaksanakan LRPI saya nilai sebagai sesuatu yang akan memberi manfaat yang signifikan. Dengan berkumpulnya hampir semua kekuatan LRPI pada Rapat Koordinasi ini, saya harapkan forum ini digunakan sebagai wahana untuk bertukar pengetahuan, ide, dan pemikiran kreatif dari lintas disiplin dan lintas bagian, dan sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai forum silaturahmi bagi semua unsur LRPI. Kegiatan ini akan sangat baik untuk membangun saling percaya (*trust*) semua unsur sehingga akan diharapkan terwujud sinergi kekuatan suatu lembaga penelitian. Cara ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mensinergikan sumber daya manusia guna mengoptimalkan peran dan kontribusi suatu lembaga penelitian.

Karena LRPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Departemen Pertanian, maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin menguraikan secara ringkas mengenai bagaimana arah pembangunan pertanian lima tahun ke depan. Dengan demikian, LRPI dapat secara dinamis memberikan kontribusinya dalam pembangunan subsektor perkebunan dengan tetap berada pada



kerangka dasar pembangunan pertanian secara umum.

Sebelum merumuskan visi dan misi, Departemen Pertanian mengintroduksikan dan menggariskan ruh yang merupakan nilai (*value*) dan jiwa (*spirit*) sebagai landasan pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan, khususnya sektor pertanian tanpa dilandasi ruh yang menjadi dasar pijakan akan kehilangan arah dan semangat yang akhirnya dapat menyimpang dari tujuan dan sasaran pembangunan. Apalagi untuk sektor pertanian yang obyek pembangunannya adalah benda hidup, yakni manusia, hewan, tanaman dan lingkungannya (*human activity system*), maka ruh pembangunan sangat diperlukan, agar pembangunan tidak bersifat eksploitatif dan merusak kelestarian dari obyek pembangunan.

Seiring dengan semangat reformasi dan penyelenggaraan tata aturan yang baik (*good governance*) oleh pemerintah yang bersih (*clean government*), maka selayaknya semangat reformasi ini dijadikan sebagai ruh di dalam pembangunan pertanian oleh Departemen Pertanian. Selain itu,



semangat penyelenggaraan tata aturan yang baik oleh suatu pemerintahan yang bersih diharapkan dapat memperoleh hasil-hasil pembangunan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, ruh kepedulian harus Menjadi nilai dan orientasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Tidak berlebihan jika Departemen Pertanian dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian Indonesia melandaskan pada nilai dan spirit Bersih dan Peduli sebagai ruh.

Bersih berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli berarti memberikan fasilitas, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat pertanian) di atas kepentingan pribadi dan golongan (demokratis) dan aspiratif.

Agenda dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009, telah menetapkan "Revitalisasi Pertanian" sebagai salah satu prioritas pembangunan bidang ekonomi. Revitalisasi Pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat dan meletakkan landasan yang kokoh bagi

pembangunan ekonomi. Konsep tersebut merupakan kornitmen politik yang harus didukung dan dijabarkan lebih lanjut operasionalnya oleh semua instansi yang terkait dengan pertanian.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dan dinamika lingkungan strategis yang dibahas terdahulu, maka VISI Pembangunan Pertanian periode 2005-2009 adalah *Terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.*

Untuk mencapai visi Pembangunan Pertanian tersebut, Departemen Pertanian mengemban MISI yang harus dilaksanakan adalah:

- (1) Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;
- (2) Mendorong pembangunan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan;
- (3) Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan penganeekaragaman konsumsi;
- (4) Mendorong peningkatan peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional;



- (5) Meningkatkan akses pelaku usaha pertanian terhadap sumberdaya dan pelayanan;
- (6) Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian Indonesia dalam sistem perdagangan domestik dan global.

### **Saudara-saudara sekalian,**

Setelah saya menguraikan mengenai Ruh, Visi, dan Misi Departemen Pertanian, saya berharap forum Rapat Koordinasi ini dapat menterjemahkan ke dalam program-program penelitian dan pelayanan yang dapat mengisi Ruh Visi, dan Misi tersebut. Saya menyadari bahwa LRPI merupakan suatu lembaga penelitian yang unik, seperti dicerminkan oleh 80 persen sumber pendanaan berasal dari penggalan dana sendiri. Namun demikian, saya mengharapkan agar LRPI dapat menterjemahkan dan mewujudkan Ruh, Visi, dan Misi tersebut kedalam kompetensi masing-masing unit kerjanya, dengan memperhatikan secara seksama kebutuhan inovasi teknologi dari berbagai komponen stake holder pengguna, baik sektor swasta, usaha perkebunan rakyat, maupun pemerintah dan pemerintah daerah.



Saya mengalami sampai saat ini status hukum LRPI tidak jelas. Dengan mempertimbangkan amanah Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, penetapan status hukum LRPI perlu diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan serta mengurangi beban pemerintah. Penetapan status hukum ini perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati, dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran konstruktif dan dilandasi kajian yang mendalam atas manfaat dan kelemahannya.

Demikianlah beberapa hal yang saya nilai sangat penting untuk saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga melalui kerja keras dan do'a kita semua, LRPI mampu mengemban tugas mulia yang dibebankan dan menjadi salah satu aset penting dalam mendukung pembangunan subsektor perkebunan.

Wassalaamu'alaikum Warakhmatullaahi Wabarakaatuh

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton apriyantono, MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN  
PADA ACARA PANEN PERDANA PADI DAN  
PERESMIAN PROYEK-PROYEK DI PROPINSI  
SUMATERA SELATAN  
TANGGAL 28 JANUARI 2005**

Yang terhormat,

- Yang Kami Hormati Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono
- Yang Kami Hormati Anggota Kabinet Indonesia Bersatu
- Yang Kami Hormati Gubernur Sumatera Selatan . Bapak/Ibu, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Kelompok Tani dan Semua Hadirin yang Berbahagia

Assalamuallaiikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara panen perdana padi serta peresmian proyek-proyek di Propinsi Sumatera Selatan yang sebentar lagi akan di laksanakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.



## **Bapak Presiden dan Hadirin Sekalian yang Saya Hormati**

Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu dari enam prioritas pembangunan ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu adalah Revitalisasi Pertanian, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 program yaitu pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.

Sasaran yang ingin dicapai dari Program peningkatan ketahanan pangan adalah (1) ketersediaan pangan tingkat nasional sampai tingkat rumah tangga yang cukup, aman dan halal (2) meningkatkan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat dan (3) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi kasus kekurangan pangan. Program peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha pertanian dengan sasaran meningkatkan jumlah dan kualitas usaha di bidang pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Kegiatan utamanya adalah 1) peningkatan produktivitas, produksi dan kualitas produk pertanian 2) pengembangan pengolahan / industri pedesaan, 3)



pengembangan pasar dan perbaikan sistem pemasaran hasil, 4) mendorong penyediaan sarana dan prasarana usaha pertanian. Sementara sasaran yang ingin dicapai dari program peningkatan kesejahteraan petani adalah meningkatnya kapasitas, posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani/pelaku usaha pertanian. Kegiatan yang akan dilakukan adalah peningkatan kapasitas petani, pemberdayaan organisasi petani, pengembangan layanan informasi petani, peningkatan kompetensi aparatur pertanian, dan perlindungan hukum bagi petani.

## **Bapak Presiden dan Hadirin sekalian yang saya Hormati**

Sebagai implementasi dari program-program di atas, maka pada hari ini di Propinsi Sumatera Selatan akan di lakukan panen perdana padi dan pencaanangan/penyerahan bibit/benih baik tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura serta penyerahan sertifikat tanah dan peresmian pabrik CPO oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.

Propinsi ini merupakan salah satu sentra produksi padi di Indonesia dan menduduki peringkat

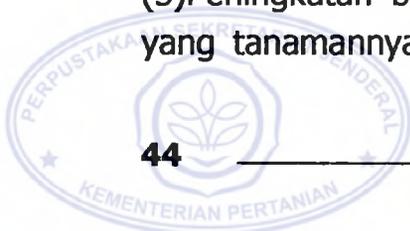


ke 6 sebagai produsen padi Nasional, dengan produksi lebih dari 2 juta ton GKG pada tahun 2004.

## **Bapak Presiden dan Hadirin sekalian yang saya Hormati**

Sehubungan dengan tingginya curah hujan akhir-akhir ini, maka beberapa wilayah terkena banjir yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi petani. Sampai saat ini luas areal yang terkena banjir mencapai 71.412 ha dimana 31.342 ha mengalami puso. Propinsi yang terluas terkena banjir adalah Sumatera Selatan yang merendam tanaman padi seluas 31.114 ha, yang mengalami puso 10.525 ha, Lampung 21.354 ha puso 19.428 ha, di susul Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Luas areal yang terkena banjir pada bulan Januari 2005 ini lebih tinggi dibanding bulan Januari pada tahun 2004 lalu yang mencapai 68.858 ha puso mencapai 20.258 ha.

Berbagai upaya telah dilakukan antara lain  
(1) pemantauan secara intensif keadaan banjir  
(2) Perbaikan sarana dan prasarana irigasi  
(3) Peningkatan bantuan sarana produksi bagi petani yang tanamannya mengalami puso akibat banjir, (4)



koordinasi dengan instansi terkait baik di Pusat maupun di daerah.

Kita semua berharap banjir tidak semakin meluas sehingga tidak akan berpengaruh terhadap produksi padi dan jagung tahun 2005 ini yang kita sasarkan sebesar 54,5 juta ton GKG dan 12 juta ton pipilan kering.

Berdasarkan angka ramalan (ARAM) III BPS tahun 2004, produksi padi kita mencapai 54,34 juta ton GKG dan jagung sebesar 11,35 juta ton pipilan kering. Dengan produksi padi sebesar ini sebenarnya kita secara nasional telah surplus beras lebih dari 2 juta ton, walupun kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik di tingkat lapangan, seperti masih terjadinya kelangkaan pupuk di beberapa daerah serta harga dasar pembelian pemerintah yang belum efektif.

Semua yang telah kita capai sekarang tentunya tidak terlepas dari kerja keras para petani, dan kita tetap optimis bahwa kondisi sumberdaya alam dan manusia masih mendukung untuk mencapai produksi yang lebih tinggi dan yang lebih penting adalah



peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani itu sendiri.

Pada kesempatan ini kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Bapak Presiden yang telah memberikan perhatian penuh dan prioritas pembangunan pertanian pada program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu.

Mengakhiri sambutan ini, kami ucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, maupun Pemerintah Kabupaten OKU Timur serta seluruh masyarakat khususnya para petani atas terselenggaranya acara ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak/Ibu sekian kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menteri Pertanian,

ttd

**Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS**



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN RI  
DALAM PELUNCURAN BUKU SERATUS TAHUN  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
Jogyakarta, 29 Januari 2005**

Yang terhormat

- Gubernur DI Yogyakarta,
- Para Mantan Menteri Pertanian,
- Pejabat Eselon I dan II lingkup Departemen Pertanian
- Para Pimpinan Lembaga Perguruan Tinggi,
- Jajaran Pemerintah Daerah dan berbagai Propinsi dan Kabupaten Kota
- Undangan sekalian yang berbahagia,

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarakatuh,

Mengawali sambutan saya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk menghadiri acara peluncuran Buku Seratus Tahun Departemen Pertanian, dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam suasana duka dan prihatin atas musibah gempa bumi

dan gelombang Tsunami yang menimpa saudara-saudara kita di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, marilah kita tengadahkan tangan kita seraya berdoa kepada Allah SWT, agar mereka yang ditimpa musibah diberi kekuatan dan ketabahan serta kekuatan iman dalam menghadapinya. Semoga juga kita sebagai bangsa dalam menghadapi cobaan ini dapat membangun kebersamaan yang lebih kuat untuk bahu-membahu membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah tersebut.

### **Hadirin yang berbahagia,**

Tanggal 1 Januari 2005 Departemen Pertanian genap berusia Seratus Tahun. Satu abad merupakan perjalanan panjang dari sebuah organisasi pemerintahan yang menangani potensi sumber daya alam dan plasma nutfah yang kaya serta penduduknya yang besar. Pada seratus tahun yang lalu, saat politik etis diluncurkan oleh Belanda dengan tujuannya memperbaiki citranya dimata bangsa-bangsa Eropa lainnya atas perlakuan buruknya terhadap rakyat jajahannya, dibentuklah Departement Van Landbouw. Departemen tersebut merupakan cikal bakal dari Departemen Pertanian yang sekarang, dengan tugas



pada waktu itu untuk memperhatikan pertanian rakyat yang kurang terurus dan tidak mendapat perhatian.

Sebagai sebuah lembaga pemerintah yang memegang peranan penting, dengan tanggung jawab yang besar terhadap jutaan petani dan keluarganya, menyediakan kebutuhan pemenuhan dan kecukupan pangan seluruh masyarakat dan andalan perekonomian nasional, Departemen Pertanian selalu menjadi sorotan dan perhatian masyarakat. Berbagai situasi dan kondisi yang terjadi dalam dinamika perkembangan pertanian selalu dikaitkan dengan keberadaan dan kiprahnya dalam membangun dan mengelola kebijakan pertaniannya. Terlepas dari tepat atau tidaknya pemahaman tersebut, saya menangkap bahwa berbagai pemahaman tersebut adalah perhatian dan sekaligus harapan besar yang digantungkan masyarakat terhadap keberadaannya.

### **Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Jika kita menengok kebelakang tentang perkembangan Departemen Pertanian, dapat digaris bawahi bahwa keberadaan Departemen Pertanian, baik dalam masa penjajahan pemerintahan Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, di awal

Kemerdekaan Republik Indonesia sampai berlanjut pada periode demokrasi terpimpin, pemerintahan orde baru sampai pada saat orde pasca reformasi, selalu menjadi fokus pemikiran para pemimpin pemerintahannya. Dinamika perkembangan organisasi Departemen Pertanian sepanjang perjalanan usia seratus tahunnya, tidak lain adalah sebagai upaya untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peranan instrumen organisasi itu dalam menangani sektor pertanian. Oleh sebab itu dinamika dan perubahan perkembangan Departemen Pertanian sangatlah penting untuk dihimpun sebagai salah satu dokumen sejarah. Pembangunan adalah suatu proses dan sejarah telah memberikan pelajaran dan pengalaman mengelola pembangunan pertanian selama ini.

Disusunnya buku Seratus Tahun Departemen Pertanian sebagai salah satu informasi dinamika perkembangan sebuah organisasi yang mempunyai peran penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian, merupakan sebuah wahana yang penting dalam upaya menginformasikan sekaligus mentransformasikan, kondisi, situasi dan pengalaman sejarah sektor pertanian kepada generasi selanjutnya. Dengan upaya ini diharapkan proses pembangunan

dapat berkesinambungan dalam mewujudkan sektor pertanian yang tangguh dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional di masa kini dan akan datang.

### **Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Mengahiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara yang terlibat langsung dalam penyusunan Buku Seratus Tahun Departemen Pertanian. Upaya saudara-saudara merupakan sumbangan yang sangat berharga terhadap Departemen Pertanian khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Semoga Allah SWT akan mencatat segala upaya yang mampu memberikan makna dan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat petani. Saya meminta agar buku ini dapat dilengkapi dan disempurnakan lagi untuk edisi berikutnya, karena dengan pengalaman yang ada kita dapat menghindari kegagalan yang sama atas sebuah kebijakan.

Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaannya kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta masyarakat dan VISIPROMT yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan

peringatan Seratus Tahun Departemen Pertanian. Peran serta dukungan Pemerintah Daerah dari berbagai Propinsi dan Kabupaten dan masyarakat pertanian telah membuat penyelenggaraan acara ini dapat diselenggarakan dengan lancar dan meriah.

Dan dengan mengucapkan Bismillah Hirochman Nirrokhim, Buku Seratus Tahun Departemen Pertanian, saya nyatakan resmi diluncurkan.

Terima Kasih.

Wasalamualaikum Warohmatulah Wabarakatuh,

**Menteri Pertanian,**

**ttd**

**Dr.Ir. Anton Apriyantono, MS.**



**KEY NOTE SPEAKER MENTERI PERTANIAN  
PADA SEMINAR REVITALISASI PERTANIAN  
DALAM RANGKA ULANG TAHUN SERATUS  
TAHUN DEPARTEMEN PERTANIAN  
YOGYAKARTA, 29 JANUARI 2005**

Yang Saya hormati :

- Gubernur DI Yogyakarta,
- Para Mantan Menteri Pertanian,
- Pemakalah dan Pembahas Seminar,
- Para Pejabat Eselon I dan II Lingkup Dep. Pertanian,
- Para Pengusaha Bidang Pertanian
- Para petani dan undangan seminar yang berbahagia,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dengan atas ijin-Nya pulalah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di gedung Yogyakarta Expo Center untuk memperingati saat yang bersejarah berdirinya Departemen Pertanian.

Dalam peringatan berdirinya Departemen Pertanian yang ke seratus ini, Yogyakarta di pilih sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan, mengingat Yogyakarta memiliki kaitan historis yang sangat kental dengan dinamika perkembangan Departemen Pertanian; terutama pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Mengingat keterkaitan historis dan banyaknya kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pertanian semasa berada di bawah Kementrian Kemakmuran yang pada saat itu bertempat di Jogjakarta, maka dalam peringatannya yang ke Seratus tahun ini saya meminta agar dapat dihasilkan sesuatu untuk kemajuan pembangunan pertanian, yaitu sumbangan pemikiran bagi kebijakan pembangunan pertanian ke depan. Oleh sebab itu saya sangat menyambut baik dengan diselenggarakannya seminar sehari yang mengambil topik Revitalisasi Pertanian.

### **Hadirin Peserta seminar yang berbahagia,**

Sektor pertanian bagi bangsa Indonesia merupakan modal dasar dalam pembangunan bangsa. Dengan kekayaan plasma nutfahnya, dan sumberdaya lahan yang terhampar diseluruh kepulauan, petani yang



tersebar di kawasan pertanian Indonesia, potensi pertanian kita memang sangat besar. Pada sektor ini juga tidak kurang dari 40 juta rumah tangga tani bergantung di dalamnya, dan berbagai kegiatan usaha lainnya tergantung dapat diciptakannya.

Jika kita mau menelusuri dalam perjalanan panjang sejarah bangsa ini, kita melihat bahwa sektor pertanian selalu menjadi pewarna utama dalam menentukan jatuh banggunya bangsa ini dari mulai kerajaan Mataram kuno sampai sekarang. Komoditi pertanian pulalah, yaitu rempah-rempah yang telah membuat bangsa-bangsa Eropa berambisi untuk menguasai tanah yang sangat subur potensi ini. Dan karena potensi pertanian pulalah bangsa kita menjadi jajahan selama tiga setengah abad.

Sumberdaya pertanian yang kita miliki memang sebuah rahmat besar dari Allah SWT bagi bangsa ini. Sejarah pertanian masa lalu telah menunjukkan bahwa karet, kopi, tembakau dan rempah-rempah kita pernah menjadi yang terbesar dan merajai pasar dunia. Dalam perkembangannya ternyata komoditas kita mengalami pasang surut, karena persaingan dan lingkungan strategik yang kurang kondusif.

## **Hadirin peserta seminar yang berbahagia.**

Dalam perjalanan perkembangan sektor pertanian memang tak lepas dari permasalahan dan kendala yang dihadapinya. Pertanian memang sebuah sektor yang besar, akan tetapi karena sangat besar itulah tantangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian menjadi sangat kompleks. Kemampuan untuk menyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian yang sangat kompleks tersebut yang akan menentukan berhasil atau tidaknya berbagai kebijakan, regulasi, pelayanan dan program pembangunan pertanian yang tengah dan akan dilaksanakan.

Tantangan pembangunan pertanian Indonesia saat ini bukan saja berkenaan dengan masalah produktivitas pertanian di dalam negeri, pelayanan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, infrastruktur kelembagaan, perdagangan dan industri dan jasa penunjangnya, akan tetapi juga berkenaan dengan kebijakan-kebijakan pertanian di negara lain.

Dalam perekonomian nasional posisi pertanian amat sensitif secara politik, amat penting secara ekonomi, namun amat lemah secara sosial. Hal yang



saya ungkapkan tadi merupakan gambaran betapa kompleksnya hal yang harus dilakukan dalam upaya menciptakan pertanian yang modern dan tangguh serta memiliki daya saing yang kuat. Meskipun demikian pemerintah sadar betul bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan "*capacity building*" perekonomian bangsa dan melepaskan diri dari jerat krisis ekonomi, sektor pertanianlah merupakan satu-satunya pilihan yang paling realistis tersebut.

### **Hadirin peserta seminar yang saya hormati,**

Dalam masa kemerdekaan pertanianpun memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, beberapa kali kita mencatat sektor pertanian bisa menjadi sebagai penyelamat perekonomian nasional saat menghadapi situasi krisis. Kontribusi yang sangat signifikan dalam sektor pertanian adalah kemampuannya untuk menyediakan pangan bagi 210 juta lebih penduduknya dan penyedia bahan baku industri.

Prestasi tersebut telah membawa Indonesia dari sebuah negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang mampu mencukupi kebutuhan pagarnya dari produksi petani.

Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun dapat mencapai fase ekonomi maju (*developed Countries*) tanpa diawali dengan fase tinggal landas (*take off*) sektor pertanian. Pengalaman pembangunan negara-negara maju memberikan dua pelajaran penting pertama, kemakmuran rakyat hanya dapat terwujud bila kita berhasil mengelola transformasi struktur ekonomi dari perekonomian agraris ke perekonomian industri jasa dan selanjutnya informasi.

Kedua, kemajuan pesat sektor pertanian merupakan prakondisi untuk mencapai fase perekonomian maju berbasis industri, jasa dan informasi tersebut.

Saya berpendapat, masalah kronis preferensi kemiskinan dan ancaman kurang pangan yang mengancam sebagian rakyat kita saat ini adalah akibat dari kegagalan mengelola transformasi struktur ekonomi. Kemiskinan, rawan pangan dan pengangguran adalah indikasi sindroma pertumbuhan tanpa pembangunan. Bukti sederhana kegagalan tersebut adalah bahwa sumbangan sektor pertanian dalam PDB pertanian menurun drastis dari 60% lebih

pada tahun enam puluhan menjadi sekitar 17% saat ini. Sementara sumbangan lapangan kerjanya hanya menurun sedikit dari 60% pada akhir tahun 1960 menjadi sekitar 50% saat ini. Adalah sebuah pilihan yang sangat rasional dan tepat ketika diawal pelantikan kabinet Indonesia Bersatu, Presiden RI menetapkan revitalisasi pertanian prioritas utama pembangunan nasional

Pilihan politik tersebut merupakan sebuah angin segar yang sudah lama di tunggu-tunggu oleh segenap masyarakat pertanian Indonesia. Berbagai pemangku kepentingan pembangunan pertanian memang sudah sejak lama menilai bahwa sektor pertanian kerap kali di dukung "secara setengah-setengah" dan bahkan terpinggirkan jika dihadapkan pada pilihan yang lainnya yang dianggap lebih penting. Menyatakan sektor pertanian sebagai prioritas utama merupakan keputusan politik yang sangat penting. Namun, perlu mengingat pula bahwa semua pemerintah terdahulu juga menyatakan hal tersebut. Konsekuensi pernyataan politik tersebut merupakan suatu tantangan untuk konsisten mewujudkannya dalam setiap keputusan kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Berkurangnya kredit modal usaha tani yang disediakan pemerintah, yang berakibat sulitnya akses terhadap permodalan, buruknya pemeliharaan dan pengadaan prasarana pertanian dan jalan-jalan usaha tani, serta berkurangnya subsidi yang diberikan pemerintah kepada petani, kebijakan perpajakan dan perdagangan merupakan contoh-contoh ketidak konsistenan pemerintah dalam melaksanakan keputusannya tersebut dan secara bertahap harus kita perbaiki. Kondisi tersebut yang ditangkap masyarakat sebagai kurangberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian. Keberpihakan kepada pembangunan pertanian ini lah yang hendak kita pulihkan dan laksanakan secara konsisten.

### **Hadirin peserta seminar yang berbahagia,**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada seminar ini, menurut saya, pembangunan pertanian dapat diarahkan untuk mewujudkan dua fungsi. Pertama, fungsi primer, yakni meningkatkan kesejahteraan petani sebagai subyek pembangunan pertanian. Kedua, fungsi instrumental, yakni sebagai alat pendukung pembangunan sektor lain.



Kedua fungsi tersebut dalam kenyataannya kerap saling bertentangan. Fungsi instrumental biasanya dilakukan dengan kebijakan harga murah dan pembatasan ekspor produk pertanian guna mengendalikan inflasi, menekan upah buruh, dan dapat menjamin pasokan bahan baku murah bagi industri. Kebijakan berorientasi pada fungsi instrumental inilah yang biasa disebut sebagai "*urban biased*" atau "*industrial based agricultural policy*". Barang kali karena kekuatan tawar politik petani yang masih lemah, maka pembangunan pertanian kita masih lebih dititik beratkan pada fungsi instrumental.

Oleh karena itulah, salah satu agenda saya kedepan ialah memperjuangkan reorientasi tujuan pembangunan pertanian dari penekanan pada fungsi instrumental yang mendukung pembangunan sektor lain, ke fungsi primer yang meningkatkan kesejahteraan petani. Tujuan meningkatkan kesejahteraan petani tidak boleh dikalahkan oleh tujuan instrumental apalagi oleh tujuan politik.

Kebijakan pertanian yang berorientasi pada kesejahteraan petani akan lebih mampu menumbuhkan kembangkan sektor lain dari pada sebaliknya.

Kebijakan berorientasi propetani, peningkatan pendapatan petani menimbulkan dampak pengganda konsumsi lebih besar; selanjutnya kebijakan berorientasi kesejahteraan petani pro peningkatan produksi menimbulkan dampak pengganda output lebih besar, kemudian kebijakan berorientasi kesejahteraan petani proefisiensi menumbuhkan daya saing yang berkelanjutan dan memperkokoh dalam menunjang sektor lain.

Revitalisasi secara harfiah dapat diartikan sebagai memfungsikan kembali berbagai kondisi dan situasi yang telah mengalami penurunan fungsinya. Berkenaan dengan revitalisasi pertanian tersebut kita perlu cermat dan berhati-hati dalam menentukan hal-hal apa saja yang harus direvitalisasi.

### **Hadirin peserta seminar yang berbahagia**

Pertimbangan dalam melakukan revitalisasi tersebut pertama, bahwa revitalisasi membutuhkan pembiayaan perencanaan yang holistik dan berkesinambungan, kedua pendanaan yang dimiliki menjadi semakin terbatas, ketiga penentuan skala prioritas yang begitu rumit sesuai dengan perkembangan lingkungan domestik dan internasional.

Oleh sebab itu dalam kesempatan Seminar Revitalisasi Pembangunan Pertanian diharapkan mampu dihasilkan pemikiran-pemikiran yang tepat dalam setiap kebijakan dan program dalam upaya revitalisasi tersebut. peningkatan nilai tambah, suporting sistem pelayan sarana produksi, kredit dan informasi teknologi, perbaikan jaringan irigasi dan infrastruktur serta pembukaan dan penciptaan pasar pertanian baru di dalam negeri dan di segera dilaksanakan. Kita mencatat bahwa berbagai kemajuan yang dicapai oleh beberapa negara tetangga kita yang berhasil mengembangkan pertaniannya disebabkan oleh kemampuan dukungan yang baik dari bidang-bidang yang saya sebutkan tadi.

### **Hadirin peserta seminar yang berbahagia,**

Sektor pertanian adalah sektor yang penting bahkan teramat penting bagi kelangsungan hidup bangsa ini. Kita maklumi bersama bahwa pada akhir-akhir ini pun berbagai negara maju di dunia telah mengubah paradigma pembangunan ekonominya. Mereka sangat menyadari bahwa kemampuan dan ketangguhan sektor pertanian akan sangat menentukan ketangguhan dan kelangsungan sektor-sektor lainnya.

Adalah hal yang sangat rasional ketika kita juga menentukan pilihan untuk menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung dan penggerak perekonomian nasionalnya. Semoga dari Seminar Revitalisasi ini dapat dihasilkan pemikiran-pemikiran besar dalam upaya meningkatkan kemampuan pertanian kita yang nantinya dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan Rencana Strategis Pembangunan Pertanian ke depan. Atas perhatian Saudara-saudara dalam seminar ini saya sampaikan penghargaan dan terima kasih. Selamat melakukan seminar.

Wasalammulalaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Menteri Pertanian RI.

ttd

**DR. Ir. Anton Apriyantono, MS**



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN  
PADA SEMINAR NASIONAL PERAN TEKNOLOGI  
DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN  
INDONESIA  
D.I. Yogyakarta, 29 Januari 2005**

Yang saya hormati:

- Rektor dan Senat Guru Besar UGM;
- Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Jurusan lingkup UGM;
- Mahasiswa serta seluruh Civitas Akademika UGM;
- Hadirin sekaliani

Assalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat-Nya kita dapat hadir di Kampus Universitas Gajahmada (UGM) ini, yang merupakan salah satu perguruan tinggi utama di Indonesia. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memaparkan tentang peran teknologi dalam pembangunan pertanian Indonesia dalam forum ini, untuk mendapatkan umpan balik.



Sebelum saya menguraikan tentang peran teknologi dalam pembangunan pertanian, terlebih dahulu saya ingin memaparkan perubahan yang telah, sedang dan akan terjadi pada tatanan masyarakat dunia. Saat ini ekonomi dan bisnis dunia sedang mengalami revolusi yang demikian cepat dan mendorong pembentukan tatanan masyarakat dunia baru. Perubahan masyarakat dunia dari masyarakat pertanian (*agricultural society*) menjadi masyarakat industri (*industrial society*) telah dimulai 250 tahun yang lalu di Inggris Raya (*Great Britain*) dan menyebar ke Asia sejak Perang Dunia II. Secara perlahan-lahan tapi pasti masyarakat dunia yang dimotori oleh negara-negara industri maju (terutama Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat dan Jepang sedang mengalami perubahan dari masyarakat industri (*industrial society*) menjadi masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*). Motor penggerak utama perubahan tersebut adalah produktivitas yang dihasilkan oleh informasi dan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan inti dan motor pembangunan suatu bangsa.

Perubahan tatanan masyarakat dunia di atas, lebih banyak dipicu oleh evolusi struktur ekonomi dunia dari *pre-industrial economy*, kemudian *industrial economy*, lalu menuju *knowledge economy*. *Orientasi industrial economy* adalah bagaimana memproduksi barang dan menciptakan kesempatan kerja secara maksimal, sedangkan orientasi *knowledge economy* adalah bagaimana memberikan pelayanan dan jasa (*services*) kepada konsumen sebaik-baiknya, *well inform*, dan tepat waktu. Dengan demikian, faktor kunci dalam *knowledge economy* adalah informasi.

Dengan pemikiran di atas, sekali lagi saya ingin menekankan kepada saudara sekalian bahwa faktor kunci daya saing pertanian kita terletak pada inovasi pertanian yang kita hasilkan.

**Saudara Rektor, Senat Guru Besar dan hadirin yang saya hormati,**

Pada abad 21 diperkirakan akan terjadi perubahan radikal dalam struktur pasar dan kesempatan kerja yang berimplikasi pada pembentukan pasar baru, yaitu: (1) kebutuhan dasar manusia telah tercukupi dan selera manusia bergeser pada kebutuhan sekunder dan tersier, sehingga

kecenderungan ke depan, pasar jasa akan berkembang lebih cepat dibanding pasar barang; (2) pendapatan masyarakat makin tinggi dan lebih mengutamakan aktualisasi kepuasannya, sehingga segmentasi pasar makin mengarah pada kelompok individu yang makin kecil; dan (3) terjadi pergeseran permintaan antar individu dalam pasar barang dan jasa yang sama.

Sejalan dengan semakin ketatnya persaingan untuk memperoleh pangsa pasar, para pelaku usaha mengembangkan strategi pengelolaan rantai pasokan (*Supply Chain Management, SCM*) yang mengintegrasikan para pelaku dari semua segmen rantai pasokan secara vertikal ke dalam usaha bersama berlandaskan kesepakatan dan standarisasi proses dan produk yang bersifat spesifik untuk setiap rantai pasokan. Kemampuan suatu rantai pasokan merebut pasar, tergantung kinerja para pelaku di dalam rantai itu dalam menyikapi permintaan konsumen menyangkut mutu, harga, dan pelayanan. Pada perkembangannya persaingan antar negara akan diterjemahkan menjadi persaingan antar rantai pasokan plus berbagai fasilitas yang dimungkinkan melalui infrastruktur dan kebijakan.

Perubahan sistem dan manajemen produksi barang dan jasa tersebut terjadi secara pesat di sektor pertanian. Negara-negara maju telah menggunakan sistem dan manajemen otomasi dalam pengelolaan rantai pasokannya. Negara-negara yang terlambat mengantisipasi perubahan tersebut, secara perlahan tapi pasti akan mengalami kekalahan dalam daya saing produknya.

Kunci daya saing produk antar rantai pasokan itu adalah efisiensi pada setiap segmen rantai pasokan dan keterkaitan fungsional antar segmen dalam memelihara konsistensi setiap pelaku dalam memenuhi kesepakatan dan standar yang digunakan. Untuk menciptakan hal tersebut diperlukan selain integrasi vertikal antar segmen rantai pasokan juga integrasi horizontal antar pelaku dalam satu segmen, misalnya integrasi di antara para produsen, di antara para distributor, dan di antara para pengumpul di dalam satu rantai pasokan yang sama. Di sini saya ingin menekankan pentingnya manajemen usaha pertanian secara terintegrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal.



Globalisasi ekonomi dan liberalisasi pasar membuka peluang bagi persaingan produk pertanian dalam hal mutu dan harga. Persaingan pasar yang ketat ditunjukkan dengan diberlakukannya 150-9.000 (*sistem manajemen mutu*) yang telah disetujui oleh WTO. Pertemuan internasional para ahli dan penentu kebijakan perdagangan internasional tahun 2001 di Jenewa, dengan tema cara-cara untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor produk pertanian dari negara-negara berkembang, merumuskan antara lain bahwa kualitas pangan harus mencakup keamanan pangan dan kualitas lingkungan. Rumusan ini mempertegas bahwa 150-9.000 tidak terpisahkan dengan 150-14.000 yang mensyaratkan teknologi pra dan pascapanen, serta teknologi konservasi lingkungan harus mendapat perhatian serius.

Kemajuan pesat terjadi di bidang bioteknologi tanaman dan hewan yang didukung dengan kemajuan ilmu biologi molekuler dan berbagai ilmu pendukungnya. Pemetaan genom berbagai organisme, keberhasilan transformasi dan regenerasi organisme hasil rekayasa genetik (*genetically modified organism/GMO*) membuka peluang bagi pengembangan industri berbasis sumberdaya hayati.



penggunaan GMO dalam kaitan dengan keamanan pangan dan keamanan hayati masih kontroversial. Tiadanya pengetahuan konseptual dan empiris yang kuat dan meyakinkan menghasilkan sikap ragu-ragu terhadap pemanfaatan GMO. Maka sebagian besar negara-negara di dunia menempuh *permissive policy* atau *precautionary policy* terhadap penggunaan GMO.

Di bidang alat dan mesin pertanian, dalam menghadapi persaingan telah dikembangkan alat dan mesin untuk budidaya yang telah mencapai tingkat penggunaan robot. Di bidang pascapanen telah dikembangkan teknologi tinggi seperti penginderaan mutu produk tanpa merusak produk tersebut dengan menggunakan image analyzer untuk produk pertanian bernilai komersial tinggi. Ekspansi cepat dari penggunaan satelit dalam pengumpulan data, termasuk Geographical Information System (GIS), dapat digunakan dalam penelitian tata ruang kaitannya dengan produksi dan distribusi komoditas pertanian, pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan pengentasan kemiskinan.

Secara umum posisi status teknologi Indonesia pada beberapa komoditas pertanian masih relatif

tertinggal dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN. Untuk komoditas perkebunan relatif tertinggal dari Malaysia dan hortikultura tertinggal dari Thailand, produk olahan pangan Indonesia relatif tertinggal dibanding dengan Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Hal tersebut terjadi karena negara-negara tersebut sudah lebih awal dan lebih konsisten dalam membangun rantai agribisnis komoditas dari hulu ke hilir sampai dengan kemudahan dalam pemasaran produk segar maupun olahannya. Namun untuk padi, minyak sawit, dan unggas Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara maupun Asia Tengah.

### **Hadirin yang saya hormati,**

Menyikapi perkembangan struktur ekonomi dan masyarakat dunia serta inovasi teknologi, pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang arah pengembangan teknologi pertanian ke depan. Seperti saudara sekalian ketahui, bahwa keunggulan bersaing merupakan salah satu syarat mutlak bagi eksistensi dan pertumbuhan berkelanjutan pembangunan pertanian dalam tatanan pasar persaingan bebas era globalisasi. Daya saing pada dasarnya ialah



kemampuan lebih baik dari pesaing dalam hal menghasilkan barang dan jasa sesuai preferensi konsumen. Preferensi konsumen dicerminkan oleh atribut produk seperti: jenis, mutu, volume, waktu dan harga. Semua ini sangat ditentukan oleh basis kegiatan produksi.

Secara garis besar basis keunggulan kompetitif sektor pertanian dikelompokkan menjadi : (1) Keunggulan komparatif limpahan sumberdaya lahan dan air; (2) Keunggulan komparatif limpahan tenaga kerja; (3) Keunikan agroekosistem lahan; (4) Keunggulan teknologi; dan (5) Keunggulan manajemen. Keunggulan (1) sampai (3) termasuk kategori keunggulan komparatif berbasis alamiah (*natural resource base*) yang lebih ditentukan oleh karunia Illahi. Namun, sektor pertanian tetap memerlukan inovasi teknologi dan manajemen, sebagai komplemen guna mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Pertanian modern lebih banyak mengandalkan keunggulan teknologi dan manajemen sebagai basis keunggulan kompetitifnya. Inovasi teknologi dan manajemen, termasuk pada tingkat perusahaan dan pemerintahan, merupakan produk dari penelitian dan

pengembangan (litbang). Oleh karena itulah litbang teknologi pertanian merupakan salah satu komponen utama pembangunan pertanian progresif. Kegiatan litbang ini bukan hanya dilaksanakan oleh lembaga litbang pertanian pemerintah, tetapi juga lembaga riset swasta dan perguruan tinggi.

Dalam era globalisasi ekonomi dan perdagangan seperti sekarang ini dan juga di masa datang, dimana ekonomi pedesaan dan nasional sudah terintegrasi dengan ekonomi global, isu utama dalam dunia bisnis adalah memenangkan persaingan global. Dalam hal ini, kemajuan teknologi diharapkan mampu memberikan sumbangan besar dalam peningkatan daya saing produk pertanian. Daya saing dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi yang dapat menurunkan biaya per unit output, meningkatkan volume, dan menyesuaikan karakteristik kualitas produk dengan preferensi konsumen. Kombinasi ketiga aspek tersebut dapat meningkatkan daya saing komoditas pertanian primer atau produk agribisnis Indonesia, sehingga kemampuan untuk menembus pasar ekspor atau membendung arus impor akan semakin tinggi. Oleh karena itu, teknologi di masing-masing simpul agribisnis, mulai dari bidang produksi



sampai dengan pemasaran hasil, harus terus berkembang.

### **Hadirin yang saya hormati,**

Ada empat jenis inovasi teknologi yang perlu dikembangkan ke depan dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian yaitu: Pertama, teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi ialah yang meningkatkan perolehan volume produksi dari satu unit faktor produksi yang menjadi pembatas (*the limiting factor of production*), seperti peningkatan produktivitas lahan per satuan luas per satuan waktu (*land augmenting technology*). Termasuk dalam hal ini ialah teknologi yang meningkatkan produktivitas lahan per panen dan frekuensi panen per tahun (intensitas pertanaman). Contoh teknologi semacam ini ialah benih unggul hasil (high yield) dan benih unggul umur genjah (*short maturity*) atau kombinasi keduanya.

Kedua, teknologi untuk menurunkan biaya pokok produksi. Ada dua kelompok teknologi yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya pokok produksi, yaitu : (a) teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi (capacity

development), dan (b) teknologi yang dapat menurunkan jumlah biaya (*cost reduction*).

Ketiga, teknologi untuk meningkatkan/memelihara kualitas produk. Kualitas produk sangat penting di lihat dari segi pemenuhan selera konsumen akhir. Kualitas produk dapat dipertahankan dengan menggunakan teknologi panen, pengangkutan dan penyimpanan yang baik, sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian karena kerusakan hasil. Di bidang pengolahan hasil, kualitas produk dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi pengawetan, penambahan bahan baru, dan pengemasan.

Keempat. teknologi untuk pengembangan produk. Selera konsumen terus berubah karena membaiknya tingkat pendidikan dan makin canggihnya teknologi informasi. Perubahan selera tersebut menuntut disediakannya produk-produk baru yang lebih menarik bagi mereka. Produk-produk lama akan ditinggalkan konsumen dan akan mengalami kejenuhan pasar. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan produk-produk baru agribisnis (*product development*) yang mempunyai kapasitas produksi lebih besar atau kualitas hasil lebih baik.



Penciptaan varietas-varietas baru yang mempunyai kapasitas produksi makin tinggi atau mempunyai kualitas lebih baik akan merupakan langkah sangat penting. Tanpa perubahan teknologi secara terus-menerus, pembangunan pertanian akan terhambat. Dalam kaitan ini, penelitian di bidang bioteknologi modern, termasuk rekayasa genetika perlu dikembangkan dengan memperhatikan aspek keamanan terhadap kesehatan dan lingkungan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).

Di bidang pengolahan hasil, pengembangan produk lebih pada sifat-sifat fisika dan kimia komoditi pertanian yang lebih mudah dimodifikasi dengan teknologi tertentu.

Selain keempat inovasi teknologi di atas, diperlukan juga inovasi manajemen usaha untuk meningkatkan efisiensi melalui lima cara, yaitu : (a) Pengalokasian input secara optimal berdasarkan harga input dan output, dengan tujuan untuk memperoleh biaya produksi paling rendah atau keuntungan maksimal sepanjang fungsi produksi atau teknologi yang ada. (b) Pengkombinasian input berdasarkan harga masing-masing input dan harga output untuk

memproduksi jenis komoditas tertentu, misalnya substitusi input antara tenaga kerja dan modal, seperti pemberantasan gulma dengan tenaga manusia diganti dengan herbisida. (c) Pengkombinasian output berdasarkan harga masing-masing output untuk memproduksi jenis komoditas berbeda, yang dapat memaksimalkan jumlah penerimaan total berdasarkan harga output masing-masing komoditi, seperti pertanian campuran (*mix farming*) sayuran dengan sapi perah. (d) penggunaan ukuran usaha paling efisien, didasarkan atas total biaya per unit output paling rendah. (e) penggunaan lingkup usaha paling efisien didasarkan atas penggabungan berbagai jenis komoditi atau usaha ke dalam satu manajemen (*economies of scope*).

### **Hadirin yang saya hormati,**

Kelima arah pengembangan inovasi pertanian di atas, yang meliputi empat inovasi teknologi dan satu inovasi manajemen, menurut hemat saya merupakan arah pengembangan inovasi teknologi pembangunan pertanian. Saya sengaja menggunakan terminologi inovasi teknologi karena cakupannya lebih luas. Rumusan arah inovasi teknologi pertanian secara lebih

rinci, saya kira akan lebih baik apabila didiskusikan secara lebih intensif oleh para pakar dan praktisi yang hadir dalam seminar nasional ini, karena hal itu menyangkut hal yang sangat strategis.

Demikian pemikiran yang ingin saya sampaikan tentang topik ini. Atas perhatian para undangan dan hadirin sekalian, serta kesempatan yang telah diberikan panitia untuk menyampaikan paparan ini, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Menteri Pertanian,

ttd

**Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS**



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN RI  
PADA ACARA PERINGATAN ULANG TAHUN  
PT. PERTANI (PERSERO) KE 46  
TANGGAL 30 JANUARI 2005**

**Bismillahirohmanirrahim,**

- Saudara Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Seluruh Karyawan PT. Pertani
- Tamu Undangan dari Kementerian BUMN dan Departemen Pertanian
- Para Mitra Kerja PT. Pertani yang Berbahagia.

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat Rakhmat, Taufik dan Hidayah-Nya pada saat ini kita dapat berkumpul menghadiri Peringatan Ulang Tahun PT. Pertani yang ke 46. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Pemimpin Besar Umat, Rosullulah, Nabi Muhammad SAW kepada Keluarga, Para Sahabat, dan sampai kepada kita selaku pengikutnya.



Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah atas nama pribadi dan sebagai Menteri Pertanian, kami mengucapkan selamat kepada Jajaran Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan PT. Pertani (Persero) yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke 46. Sebuah perjalanan panjang telah berhasil dilalui oleh PT. Pertani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) namun tantangan dan persaingan usaha telah menanti mulai saat ini dan pada saat-saat mendatang.

### **Hadirin yang berbahagia,**

Dalam catatan kami, telah banyak kiprah PT. Pertani untuk membantu dan mensukseskan program-program pertanian sejak berdirinya tahun 1959 dimana pada saat itu Pemerintah mendirikan Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (BMPT). Tahun demi tahun telah dilalui dalam kondisi yang berbeda, namun sampai saat ini PT. Pertani masih bergerak dalam bidang agribisnis dan sudah selayaknya PT. Pertani tetap memfokuskan pada kegiatan usaha dalam bidang pertanian seperti dalam kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran sarana produksi dan hasil-hasil pertanian.

Pada bagian lain, ditengah persaingan usaha yang sangat kompetitif, PT. Pertani dihadapkan kepada tujuannya untuk memperoleh keuntungan dari setiap usaha yang dilaksanakan. Untuk hal tersebut, kami mengingatkan agar Jajaran Direksi dan Karyawan PT. Pertani senantiasa proaktif mengantisipasi teradinya perubahan lingkungan usaha dengan selalu melakukan inovasi disetiap pekerjaan. Perubahan lingkungan usaha yang cepat hendaknya dapat diantisipasi secara baik sehingga PT. Pertani dapat keluar menjadi pemenang dalam kancah persaingan baik nasional, regional terlebih internasional.

### **Hadirin yang berbahagia,**

Departemen Pertanian sebagai lembaga pelayanan bagi masyarakat dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani akan sangat terbuka untuk bekerjasama dengan para stake holder termasuk PT. Pertani. Jajaran Manajemen PT. Pertani diharapkan dapat melakukan sinergi sebaik mungkin dengan Jajaran Departemen Pertanian sehingga kegiatan usahanya dapat memberikan warna bagi pembangunan pertanian khususnya dalam membantu peningkatan kesejahteraan petani.

Keprihatinan kami saat ini adalah bahwa petani harus membeli sarana produksi pertanian dengan nilai sangat tinggi. Bahkan di beberapa tempat, pupuk yang disubsidi Pemerintah ternyata masih harus dibeli di atas Harga Eceran tertinggi (HET). Pada bagian lain, hasil produksi pertanian baik tanaman pangan maupun hortikultura seringkali tidak senilai dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan petani.

Mengingat hal tersebut, Departemen Pertanian mengharapkan peran lebih besar dari PT. Petani dan akan memberikan dukungan dalam mengembangkan kemitraan dengan petani, terutama dalam hal pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian. Dengan kepemilikan sarana gudang yang tersebar dimana-mana dan adanya Unit Penggilingan Padi diseluruh Indonesia, maka PT. Petani sudah selayaknya mempunyai peran lebih besar dalam menjaga stabilitas harga gabah ditingkat petani.

Pada bagian lain, dengan pengalaman bergerak dalam bidang agribisnis selama 46 tahun diyakini PT. Petani dapat menjadi pelopor untuk dapat mengangkat kehidupan masyarakat petani hortikultura melalui pengembangan "Agro Supermarket" seperti

telah disampaikan oleh Direksi PT. Pertani kepada kami. Keberagaman jenis hortikultura yang tersebar diseluruh wilayah Nusantara, hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha dan dikembangkan pada tingkat Nasional, Regional maupun Intemasional dengan tetap berlandaskan kepada bagaimana usaha tersebut membantu peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam distribusi pupuk, kami mengharapkan peran lebih besar dari PT. Pertani dalam mengamankan Harga Eceran Tertinggi (HET). Sebagai BUMN yang mempunyai sarana pergudangan dan jaringan pemasaran sampai tingkat Kabupaten di seluruh Indonesia, maka peran PT. Pertani harus nyata dan dirasakan oleh petani. Memang hal tersebut memerlukan kerja keras dan sinergi yang baik dengan Produsen Pupuk di dalam negeri, namun kami percaya dengan kemampuan Manajemen PT. Pertani hal tersebut dapat dilakukan.

Menteri Pertanian,

ttd

**Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS.**



# **STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN**

**Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS**

**Menteri Pertanian, Republik Indonesia**

**Presentasi Pada Business and Investment  
Mission, Indonesia-Malaysia Business Council,  
Manado, 2 Februari 2005**

**Yang saya hormati:**

- Saudara Tanri Abeng, Chairman IMBC,
- Saudara-saudara pengusaha dan investor dari Malaysia dan Indonesia,
- Saudara-saudara peserta diskusi sekalian.

Assalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas berkah dan karunia-Nya kita memperoleh kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi tentang Strategi dan Kebijakan Pemerintah untuk mendukung kegiatan investasi di sektor pertanian di Indonesia.



Saya memandang pertemuan ini amat penting, tidak saja tepat dari segi waktu tetapi juga dari segi substansi dan peserta diskusi, sehingga saya menyempatkan diri hadir berpartisipasi langsung.

Pada saat ini Departemen Pertanian tengah melakukan penyelesaian akhir Konsep Rencana Pembangunan Pertanian 2005-2009, dimana salah satu substansi utamanya ialah menyusun strategi dan kebijakan investasi. Pertemuan yang dihadiri para pengusaha dan investor swasta dari dua negara serumpun dan bersahabat ini, Indonesia dan Malaysia, tentu merupakan forum yang tepat untuk menyebarluaskan pemikiran kami tentang hal ini, sekaligus untuk mendapatkan sumbangan pemikiran guna lebih menyempurnakan Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Menengah tersebut. Untuk itu saya berterima kasih kepada Saudara Tanri Abeng, Chairman Indonesia-Malaysia Business Council (IMBC), yang telah berbaik hati mengundang saya berpartisipasi pada pertemuan ini.

### **Saudara-saudara sekalian,**

Sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Revitalisasi



Pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, tujuan akhir pembangunan pertanian adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, baik secara langsung meningkatkan kesejahteraan petani dan memantapkan ketahanan pangan nasional; maupun secara tidak langsung, memfasilitasi dan mendorong pembangunan sektor-sektor lain. Oleh karena itulah kami merumuskan VISI Pembangunan Pertanian 2005-2009 Terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani".

Berdasarkan VISI tersebut, MISI Departemen Pertanian dirumuskan sebagai berikut: (1) Mewujudkan birokrasi pertanian yang memiliki integritas moral yang tinggi; (2) Mendorong pembangunan pertanian yang tangguh berkerakyatan; (3) Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan penganeekaragaman konsumsi; (4) Mendorong peningkatan PDB sektor pertanian terhadap perekonomian nasional; (5)

Meningkatkan akses pelaku usaha pertanian terhadap sumberdaya dan pelayanan; (6) Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan domestik dan global.

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka Program Pembangunan Pertanian Tahun 2005-2009, dirumuskan dalam tiga program, yaitu: (1) Program peningkatan ketahanan pangan; (2) Program peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; (3) Program peningkatan kesejahteraan petani. Dalam konteks Departemen Pertanian, ruang lingkup pertanian mencakup empat subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi makro, target pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2005-2009 ditetapkan rata-rata 3,29 persen per tahun, dengan rincian subsektor tanaman pangan 0,89 persen per tahun, subsektor hortikultura 3,38 persen per tahun, subsektor perkebunan 6,27 persen per tahun dan subsektor peternakan 4,37 persen per tahun.



Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, sektor pertanian membutuhkan investasi sebesar Rp. 77,07 triliun, dengan rincian Rp. 30,05 triliun untuk subsektor tanaman pangan, Rp. 9,92 triliun untuk subsektor hortikultura, Rp. 20,52 triliun untuk subsektor perkebunan dan Rp. 16,12 triliun untuk subsektor peternakan. Kebutuhan investasi yang demikian besar merupakan kesempatan bisnis bagi pengusaha swasta. Kita sangat mengharapkan partisipasi para investor swasta untuk mewujudkan sasaran pembangunan pertanian yang cukup tinggi tersebut. Arah kebijakan kita ialah mendorong tumbuh kembangnya rantai pasok (*supply chain*) yang lengkap dan padu-padan berdasarkan relasi aliansi kemitraan. Perusahaan besar pertanian diharapkan bertindak sebagai inti atau penghela dari rantai pasok tersebut.

Visi, misi, dan program, serta kebutuhan investasi tersebut dirancang ideal, sehingga hanya dapat terwujud jika upaya untuk mencapainya didasarkan pada ruh, yang mencakup nilai (*value*) dan jiwa (*spirif*), yang ideal pula. Saya melihat tiadanya ruh inilah yang menjadi penyebab utama kenapa pembangunan pertanian selama ini belum optimal dalam mewujudkan tujuan akhir pembangunan

pertanian untuk sebesar-besarnya kesejahteraan petani. Oleh karena itulah kami telah mencanangkan bahwa penyelenggaraan pembangunan pertanian senantiasa berdasarkan teguh pada ruh pembangunan, yakni Bersih dan Peduli.

Bersih berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli berarti memberikan fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat pertanian) diatas kepentingan pribadi dan golongan (demokratis) dan aspiratif.

### **Saudara-saudara sekalian,**

Seraya terus mendorong produksi bahan pangan pokok nasional, seperti beras, jagung, kedele dan gula, guna pemantapan ketahanan pangan nasional, perhatian yang lebih besar akan dicurahkan pada upaya peningkatan nilai tambah guna meningkatkan daya saing dan pendapatan petani. Saya melihat, usahatani tanaman pangan tradisional sudah mencapai tahap dewasa (*maturity*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sumber pertumbuhan tinggi untuk meningkatkan pendapatan petani.

Upaya peningkatan nilai tambah akan dilakukan dengan dua strategi pokok. Pertama, diversifikasi spektrum luas, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Diversifikasi horizontal dilaksanakan dengan menumbuhkembangkan usahatani komoditas pertanian bernilai tinggi (*high value commodities*) seperti hortikultura, perkebunan dan peternakan. Selain bernilai tinggi, permintaan terhadap komoditas-komoditas tersebut akan terus meningkat tajam, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional, karena elastis terhadap pendapatan konsumen. Diversifikasi vertikal dilaksanakan dengan menumbuhkembangkan usaha pasca panen dan industri pengolahan (agroindustri) guna meningkatkan mutu dan ragam produk. Selain meningkatkan nilai tambah, pengembangan pasca panen dan industri pengolahan merupakan strategi yang tepat untuk menciptakan lapangan kerja maupun revitalisasi perekonomian pedesaan.

Kedua, penataan pemasaran melalui pengembangan sistem pengelolaan rantai pasok (*supply chain management*). Usahatani yang berskala kecil dan terpencar-pencar (dispersal) merupakan penyebab utama pemasaran yang tidak efisien dan

tidak berkembangnya usaha pasca panen maupun industri pengolahan produk pertanian. Pengelolaan rantai pasok secara vertikal dalam suatu unit kelembagaan (kuasi organisasi) merupakan kunci untuk dapat menjamin mutu (*total quality assurance*), baik dalam volume, mutu, dan waktu pasokan, sesuai dengan preferensi konsumen. Kemampuan menjamin mutu pasokan merupakan salah satu penentu utama daya saing.

Selain mengoptimalkan sumberdaya lahan yang ada, perluasan dan peningkatan kapasitas produksi lahan pertanian merupakan keharusan agar pendapatan petani dapat ditingkatkan secara nyata, ketahanan pangan dapat dimantapkan secara berkelanjutan, dan pasokan bahan baku industri dapat dipenuhi. Pembukaan areal pertanian diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan pembangunan. Kita memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas di luar pulau Jawa.

Saya melihat, usaha pertanian bernilai tinggi, pasca panen dan agroindustri merupakan bidang-bidang usaha yang amat prospektif bagi investor

swasta. Pembukaan lahan pertanian baru juga terbuka bagi perusahaan besar swasta. Sekali lagi, harapan kita ialah agar investor swasta dapat bermitra dengan usaha pertanian rakyat. Saya berpendapat kemitraan dengan usaha pertanian rakyat merupakan salah satu perwujudan dari *"good corporate governance"* Pola kemitraan tidak saja baik secara sosial, tetapi juga baik secara bisnis karena dapat menghemat biaya transaksi dan keamanan usaha.

Perusahaan besar pertanian diharapkan terutama pada bidang usaha industri pengolahan dan pemasaran yang membutuhkan modal investasi dan kemampuan manajemen tinggi sehingga sukar dimasuki oleh usaha pertanian rakyat. Usahatani primer diutamakan bagi usaha pertanian rakyat. Saya dapat menjamin, para petani kita memiliki kemampuan tinggi dalam mengelola usahatani primer. Masalah utama pertanian kita adalah pada bidang usaha pemasaran, penanganan pasca panen dan pengolahan (*off-farm*) bukan pada bidang usaha budidaya (*on-farm*).

Saya dapat memahami, guna memenuhi skala usaha penanganan pasca panen dan pengolahan yang

efisien serta mengurangi resiko langka pasok bahan baku dan ongkos koordinasi, perusahaan besar pertanian seyogyanya diberi kesempatan berusaha dalam bidang budidaya. Namun demikian, skala usaha budidaya perusahaan besar tersebut harus dibatasi sehingga aliansi kemitraan dengan usaha pertanian rakyat mutlak perlu untuk keberlanjutan eksistensi bersama. Adanya saling membutuhkan untuk eksistensi bersama merupakan kunci dari kelangsungan setiap aliansi kemitraan. Aliansi kemitraan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pada Perusahaan Inti Rakyat (PIR), Kontrak Tani (*contract farming*).

Saya menyadari bahwa gagasan untuk mengembangkan aliansi kemitraan antar perusahaan besar pertanian dengan usaha pertanian rakyat bukanlah hal baru. Sejak tahun 1970-an Indonesia telah mengembangkan pola PIR pada usaha perkebunan dan peternakan. Namun kita tahu bersama, pola PIR tersebut umumnya tidak bertahan lama. Akar penyebabnya ialah kegagalan rancangan model pengembangannya dan kegagalan operasionalisasinya.

Kegagalan rancangan PIR, misalnya, terutama terletak pada struktur dan skala usaha. Perusahaan besar yang menjadi inti kemitraan memiliki usaha budidaya yang cukup besar sehingga kemitraan dengan usaha pertanian rakyat tidak esensial bagi eksistensinya. Struktur usaha inti-plasma seperti ini harus sedapat mungkin dihindari. Struktur usaha harus dirancang sehingga inti dan plasma saling membutuhkan dan harus bermitra agar dapat bertahan hidup.

Kegagalan operasional terutama terjadi karena pihak-pihak yang bermitra cenderung bertindak oportunistik, mendahulukan kepentingan masing-masing dari pada kepentingan bersama, termasuk dengan bertindak melawan aturan kesepakatan. Aliansi kemitraan yang ada tidak memiliki ruh bersih dan peduli. Saya berpendapat, gagasan kami untuk menumbuhkan kembangkan prinsip bersih dan peduli amat terkait dengan upaya pengembangan aliansi kemitraan usaha pertanian rakyat dan perusahaan besar pertanian, yang berarti pula bagian dari upaya memfasilitasi investasi swasta di sektor pertanian.



## **Saudara-saudara sekalian,**

Sekali lagi saya tegaskan bahwa Departemen Pertanian memiliki komitmen kuat untuk memfasilitasi, membantu, dan melindungi investor swasta di sektor pertanian, khususnya dalam bidang usaha pertanian bernilai tinggi, pasca panen, agroindustri dan pola kemitraan dengan usaha pertanian rakyat. Kami akan senang hati berdiskusi langsung dengan para investor mengenai berbagai hal yang dirasakan sebagai penghambat serta fasilitasi, aturan, dan insentif yang dipandang perlu untuk merealisasikan rencana investasi prospektif. Hal-hal ini barangkali akan terungkap lebih jelas dan lengkap dalam forum bisnis-investasi ini.

Pak Tanri Abeng, saya menunggu rumusan kesimpulan dan rekomendasi konkrit dari forum ini, agar peran pemerintah dalam memfasilitasi investasi pertanian dapat efisien dan efektif mencapai sasaran. Terima kasih.

Wassalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Menteri Pertanian,

ttd

Dr. Ir. Anton apriyantono, MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN  
PADA ACARA FOKUS DISKUSI "MEMBANGUN  
KEMBALI SEKTOR PERTANIAN PADA DAERAH  
YANG TERKENA GEMPA DAN TSUNAMI DI ACEH  
DAN SUMATERA UTARA"  
Jakarta, 3 Februari 2005**

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarakatuh;

Rektor Institut Pertanian Bogor yang saya hormati:

Yth. Ketua Forum Makmur Bersama beserta seluruh  
anggotanya yang hadir di sini;

Yth. Bapak dan Ibu Perwakilan Masyarakat dan  
Mahasiswa Aceh yang juga hadir pada Forum ini;

Yth. Para Pembahas Utama yang saya lihat disini  
hadir dari Universitas Gajahmada, Media  
Indonesia dan Bank Mandiri serta

Hadirin sekalian yang saya hormati;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur  
kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan  
karunianya kita bisa berkumpul disini guna  
memikirkan dan merancang bersama untuk  
membangun kembali sektor pertanian di Aceh,



terutama pada daerah-daerah yang terkena gempa dan badai tsunami.

Kita menyadari bahwa musibah tersebut tidak cukup hanya untuk diratapi dan disesali, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana secepatnya kita membantu, memfasilitasi, dan memberi semangat kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah di Aceh dan Sumatera Utara untuk bangkit kembali, dan kita bersama dengan saudara-saudara kita di Aceh segera merumuskan program aksi membangun kembali daerah-daerah tersebut secara cepat, tepat dan tuntas.

Dalam kerangka mengimplementasikan semangat tersebut, di Departemen Pertanian sendiri sudah dibentuk Tim Bencana Nasional Untuk Aceh yang diketuai oleh Dr. Djafar Hafzah dan sudah bekerja cukup efektif. Sehingga, saya menyambut baik prakarsa dari Forum Makmur Bersama menggelar fokus diskusi siang ini, untuk membahas secara mendalam konsep yang dirancang oleh TIM dari IPB yaitu *"Membangun kembali sektor pertanian, perikanan, kehutanan dan lingkungan di Aceh melalui pendekatan Agro-ecopolitan"*. Dan untuk selanjutnya,

pada kesempatan yang baik ini dapat didiskusikan secara mendalam dan dipikirkan bersama tentang bagaimana mengintegrasikan konsep ini dengan program-program lainnya yang sudah berjalan.

Saya percaya dengan kehadiran para pakar bahkan Sapak Rektor IPS sendiri menyempatkan waktunya, dan juga kehadiran para pemegang kebijakan sektor-sektor terkait, perbankan, LSM peduli aceh serta wakil-wakil dari masyarakat Aceh, seusai pertemuan ini akan diperoleh masukan-masukan kongkrit, yang akan ditindak lanjuti oleh TIM terpadu yang terdiri dari berbagai institusi terkait, untuk kemudian akan dirumuskan menjadi program aksi jangka pendek, menengah dan panjang, dan juga diharapkan secara rinci diuraikan *"siapa melakukan apa, bagaimana, dimana dan kapan pelaksanaannya, termasuk didalamnya kebutuhan anggarannya"*. Dengan demikian program aksi ini nantinya merupakan program kita bersama, baik ditingkat pusat maupun di tingkat propinsi dan kabupaten Nangroe "Aceh Darussalam. Dengan modal dasar tekad bersama ini, marilah kita bangun kembali sektor pertanian, perikanan, kehutanan secara terpadu dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan di

Nangroe Aceh Darussalam secara tepat, cepat dan tuntas.

Untuk memudahkan, seandainya kerja bersama ini disepakati nantinya, tentunya perlu adanya sekretariat. Dalam hal ini, bila disepakati, kami dari Departemen Pertanian menawarkan diri bersedia menjadi sekretariat kerja bersama membangun kembali sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta lingkungan di Nangroe Aceh Darussalam ini.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Rektor untuk menyampaikan secara ringkas konsep dimaksud, sebelum dipresentasikan lebih lanjut oleh Tim dari IPB lainnya.

Wassalamu' alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian

ttd

**Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS**



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN  
PADA LUSTRUM LEMBAGA PENDIDIKAN  
PERKEBUNAN  
YOGYAKARTA, 5 FEBRUARI 2005**

**Yth. Menteri Negara BUMN**

- Yth. Gubernur D.I. Yogyakarta
- Yth. Direksi PTPN I - XIV
- Yth. Direksi PT. RNI
- Yth. Para Pimpinan Perusahaan Perkebunan Swasta
- Yth. Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
- Yth. Para Hadirin Sekalian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada acara Lustrum Lembaga Pendidikan Perkebunan ini. Saya menilai acara ini sebagai sesuatu yang penting karena lembaga ini merupakan mitra Departemen Pertanian dalam mengembangkan sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan subsektor perkebunan khususnya dan Pembangunan Pertanian secara umum.

## **Saudara-saudara yang saya hormati,**

Sejarah mencatat bahwa budaya pertanian khususnya industri perkebunan di bumi pertiwi telah berkembang sejak ratusan tahun silam. Pada fase sebelum bangsa-bangsa Eropa tiba di Nusantara sekitar 500 tahun yang lalu, kita sudah mengalami perdagangan antar bangsa yang ramai di Nusantara. Para pedagang yang berasal dari Arab, Parsi, India dan China ramai berjual beli; suatu era perdagangan bebas yang ketika itu tidak ada praktek monopoli. Pada fase ini komoditas perkebunan utamanya rempah-rempah menjadi "*emas hijau*" Nusantara. Kemudian pada fase kolonial, dibalik cerita duka rakyat Indonesia yang mengalami praktek perdagangan monopoli VOC dan tanam paksa, Indonesia memiliki lembaga riset dan pengembangan perkebunan yang merupakan salah satu yang tertua di dunia. Lembaga tersebut merupakan cikal bakal lembaga penelitian perkebunan gula dan lembaga penelitian bioteknologi yang ada saat ini.

Fase demi fase perjalanan sejarah pertanian menunjukkan dinamika yang berbeda sesuai dengan peran dan tantangan yang dihadapi. Pada masa krisis

ekonomi, Indonesia mengalami krisis yang lebih berat dan relatif lambat bangkit dibandingkan dengan negara-negara tetangga, bahkan bila dibandingkan dengan negara yang menjadi "*episentrum*" krisis yakni Thailand. Pada tahun 1998 pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami kontraksi yang luar biasa yakni sekitar -13,13%; namun sektor pertanian masih dapat tumbuh dengan laju positif sekitar 0,88%. Pada tahun 2002-2003 sektor pertanian telah mampu melepaskan diri dari "*perangkap spiral pertumbuhan rendah*" pada 1999-2002, kemudian memasuki fase percepatan pertumbuhan (*accelerating growth*) pada 2003 untuk menuju pertumbuhan berkelanjutan (*sustaining growth*). PDB perkebunan tumbuh 5,02%, lebih tinggi daripada periode krisis yakni 4,30%.

### **Para hadirin yang berbahagia,**

Subsektor perkebunan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain didasarkan pada kenyataan: (1) Indonesia memiliki keragaman plasma nutfah yang dikenal dengan *mega biodiversity* dengan jenis tumbuhan yang mencapai 30 ribu jenis. (2) Indonesia memiliki agroklimat subtropis beriklim

basah dengan struktur geografis beragam yang memberikan peluang pengembangan berbagai komoditas perkebunan khas tropis. (3) Potensi sumberdaya manusia dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa yang dapat berperan sebagai tenaga kerja produktif dan sekaligus pasar bagi produk pertanian. Dengan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) ini tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan daya saing komoditas perkebunan baik di pasar domestic maupun di pasar internasional.

### **Saudara-saudara yang saya hormati,**

Pembangunan perkebunan diselenggarakan dengan mengacu pada UU Nomor 18 tahun 2004 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan Negara, meningkatkan penerimaan devisa Negara, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Sejalan pula dengan visi pembangunan pertanian yakni terwujudnya pertanian tangguh untuk

pemantapan. ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani; maka pembangunan perkebunan dirancang memiliki fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Untuk subsektor perkebunan pada periode 2005-2009, Insya Allah produksi perkebunan akan meningkat 5% per tahun, pendapatan riil petani meningkat 3,5% per tahun, dan nilai ekspor produk pertanian meningkat menjadi US\$ 9 milyar di tahun 2009.

Komoditas utama yang akan dikembangkan melalui pembangunan bidang perkebunan adalah karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, teh, lada, kakao, jambu mete, tebu, tembakau dan kapas.

### **Para hadirin yang saya muliakan,**

Apabila kita berbicara mengenai fungsi ekonomi dan sosial budaya perkebunan serta daya saing, selain variable-variabel produktivitas, mutu hasil, kelembagaan, harga dan pasar, kebijakan ekonomi makro fair trading dan sebagainya, variable sosial budaya merupakan entitas yang tidak kalah pentingnya. Subsektor perkebunan akan berkembang dengan baik bila penanganannya dilakukan dengan



pendekatan industri atau disebut dengan budaya industri. Beberapa elemen yang menjadi ciri berkembangnya budaya industri antara lain 1) bila (1) ilmu pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan keputusan, (2) kemajuan teknologi dan efisiensi merupakan instrument utama dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya, (3) mekanisme pasar merupakan media utama transaksi produk, (4) profesionalisme menjadi karakter setiap komponen pelaku, dan (5) perekrutasaan dapat menggantikan ketergantungan pada alam.

### **Hadirin yang saya hormati,**

Pengembangan daya saing dengan pendekatan tersebut di atas dimungkinkan terjadi bila digerakkan dan diarahkan oleh sumberdaya manusia (*people driven*) yang berkualitas yaitu SDM yang amanah dan professional. Karena sumberdaya manusia (SDM) merupakan the *man behind the gun* setiap program pembangunan, maka pengembangan SDM merupakan unsur strategis dan bagian integral dalam pembangunan. Untuk itu, kualitas SDM pertanian baik pelaku langsung maupun aparatur sebagai pembina dan pelayan harus mempunyai keunggulan daya saing

yang berkesinambungan (*sustained competitive advantage*).

Dalam konteks pengembangan SDM pertanian khususnya pada subsektor perkebunan inilah saya berharap Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) dapat berkiprah bersama-sama dan menjadi mitra Departemen Pertanian. Pemerintah sangat mendorong partisipasi dan kontribusi aktif masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat seperti asosiasi-asosiasi dan sebagainya untuk bersama-sama membangun daya saing bangsa antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. Lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat eksis membantu pengembangan budaya industri dan percepatan proses peningkatan kompetensi SDM baik sebagai peran individu maupun kolektif.

Pada masa yang akan datang, sesuai dengan paradigma baru pembangunan, haruslah pergeseran orientasi dari pemerintahan yang merencanakan sekaligus melaksanakan (*steering and rowing*) menjadi merencanakan dan mengendalikan (*steering rather than rowing*) dan dari pengelolaan sentralistik menjadi desentralistik. Peran pemerintah secara bertahap dan

gradual akan dikurangi dan diisi dengan peran aktif masyarakat. Lembaga-lembaga pemerintah pun pada masa yang akan datang didorong agar mampu mandiri, tidak hanya menjadi *cost centre* atau *just spending organization*. Atas dasar inilah kami menyambut baik dan mendorong peran aktif lembaga-lembaga non pemerintah seperti halnya LPP ini untuk dapat berkembang dengan baik sesuai tantangan dan harapan masyarakat pertanian khususnya perkebunan. Kami berharap LPP dapat bahu membahu dengan institusi di bawah naungan Departemen Pertanian dan institusi lainnya dalam membangun sumberdaya manusia khususnya di bidang pertanian. Diharapkan lembaga-lembaga yang berkiprah di bidang pendidikan dan pelatihan juga menjadi *learning organization* yang harus mampu menghela perubahan atau setidaknya *in line* dengan perubahan sesuai dengan harapan bangsa dan rakyat Indonesia.

### **Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Akhirul kalam, saya atas nama pribadi dan Departemen Pertanian mengucapkan selamat merayakan Lustrum VII, semoga lembaga ini berkembang sesuai harapan dan dapat memberikan

kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa khususnya melalui pendidikan dan pelatihan.

Wassalamu'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 5 Februari 2005

Menteri Pertanian RI

ttd

**Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS**



Keynote Speech Menteri Pertanian Pada Diskusi  
Nasional "Efektivitas Strategi dan Kebijakan Pertanian  
Nasional"

Auditorium Rektorat IPB, Dermaga, Bogor  
Tanggal 5 Pebruari 2005

**KEBIJAKAN DAN  
PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN**

Yang terhormat,

- Sdr. Rektor IPB,
- Sdr. Gubernur Jawa Barat,
- Saudara-Saudara peserta Diskusi Nasional

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwataala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul disini untuk mendiskusikan *"Efektivitas Strategi dan Kebijakan Pertanian Nasional"* Saya menilai pertemuan ini sangat penting karena topik yang dibahas mengenai strategi, kebijakan dan pembangunan pertanian ke depan. Topik yang sangat penting ini memang memerlukan sumbangan pemikiran dari berbagai kalangan yang luas.

Saya sangat menghargai setinggi-tingginya atas perhatian IPS terhadap pembangunan pertanian dengan memprakarsai penyelenggaraan diskusi nasional ini. Diharapkan diskusi ini dapat menghasilkan rumusan konkrit dan bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah terutama Departemen Pertanian dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan pertanian.

### **Saudara-saudara sekalian,**

Pembangunan pertanian yang kita lakukan sampai saat ini telah menunjukkan hasil-hasil yang nyata dilihat antara lain dari pertumbuhan PDB, perkembangan produksi, peningkatan ekspor dan pemantapan ketahanan pangan. Namun demikian, pembangunan pertanian masih dihadapkan kepada sejumlah kendala dan masalah yang harus segera dipecahkan, antara lain: (1) Keterbatasan dan penurunan kapasitas sumberdaya pertanian, (2) Sistem alih teknologi yang masih lemah dan kurang tepat sasaran, (3) Keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan, (4) Rantai tata niaga yang panjang dan sistem pemasaran yang belum adil, (5) Kualitas, mentalitas, dan keterampilan

sumberdaya petani rendah, (6) Kelembagaan dan posisi tawar petani rendah, (7) Lemahnya koordinasi antar lembaga terkait dan birokrasi, dan (8) Kebijakan makro ekonomi yang belum berpihak kepada petani.

Disamping permasalahan di atas, pembangunan pertanian juga dihadapkan paling tidak pada delapan tantangan yang paling mendesak untuk segera ditangani, yaitu: (1) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian, (2) Peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku industri, (3) Penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, (4) Operasionalisasi pembangunan berkelanjutan, (5) Globalisasi perdagangan dan investasi, (6) Terbangunnya industri hasil pertanian sampai tingkat desa, (7) Sinkronisasi program pusat dan daerah sejalan era otonomi daerah, dan (8) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, maka visi pembangunan pertanian sampai tahun 2025 adalah: *"Terwujudnya sistem pertanian industrial berkelanjutan yang berdaya saing dan mampu menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani"*. Secara lebih spesifik sasaran

jangka panjang yang perlu ditempuh adalah: (1) terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdaya saing; (2) mantapnya ketahanan pangan secara mandiri; (3) terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian; dan (4) hapusnya masyarakat petani miskin dan meningkatnya pendapatan petani.

### **Saudara-saudara yang saya hormati,**

Untuk mencapai sasaran-sasaran besar di atas, maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah: (1) meningkatkan potensi basis produksi dan skala usaha pertanian; (2) mewujudkan sumberdaya insani pertanian yang berkualitas; (3) mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian; (4) mewujudkan sistem inovasi pertanian; (5) mewujudkan sistem pembiayaan pertanian tepat guna; (6) mewujudkan kelembagaan pertanian yang kokoh; (7) menyediakan sistem insentif dan perlindungan bagi petani; (8) mewujudkan pewilayahan pengembangan komoditas unggulan; (9) menerapkan praktek pertanian yang baik; dan (10) mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berpihak kepada petani dan pertanian.



## **Saudara-saudara sekalian,**

Dalam periode 2005-2009, pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai visi: "terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.

Pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah pendayagunaan secara optimal sumberdaya pertanian dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, yaitu: (1) membangun SDM aparatur profesional, petani mandiri dan kelembagaan pertanian yang kokoh; (2) meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan; (3) memantapkan ketahanan dan keamanan pangan; (4) meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian; (5) menumbuhkembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi perdesaan; dan (6) membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

Dalam kurun waktu yang sangat panjang pembangunan pertanian selalu diidentikkan dengan kegiatan produksi usahatani semata (proses budidaya

atau agronomi). Kondisi ini menyebabkan pada masa lalu kegiatan pertanian lebih berorientasi kepada peningkatan produksi dan citra yang kurang menguntungkan bagi pembangunan sektor pertanian. Hal ini memberikan pandangan seakan-akan pembangunan pertanian terlepas dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dan juga bukan merupakan bagian dari pembangunan wilayah.

Dengan orientasi kepada produksi, memang kita telah relatif mampu menyediakan pangan dan bahan baku industri domestik. Namun keberhasilan peningkatan produksi pertanian tersebut ternyata belum diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petaninya. Hal ini antara lain karena kebijakan di bidang produksi tidak diikuti oleh kebijakan pendukung lain secara sinergis. Kondisi pembangunan pertanian seperti itu antara lain berkaitan dengan pembinaan pembangunan pertanian yang masih tersekat-sekat oleh banyak Departemen, sehingga kebijakan pengembangan pertanian seringkali tidak sinkron antar lembaga terkait akibat perbedaan kepentingan dari masing-masing sektor (Departemen).



Belajar dari kelemahan tersebut, sejak Pelita VI pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan pembangunan agribisnis. Pembangunan agribisnis, yang pada hakeketnya menekankan kepada tiga hal, yaitu Pertama, melalui pembangunan agribisnis, pembangunan pertanian ditingkatkan dari pendekatan produksi ke pendekatan yang berdasarkan bisnis. Dengan orientasi kepada bisnis maka aspek usaha dan pendapatan menjadi dasar pertimbangan utama. Kedua, dalam pembangunan agribisnis pembangunan pertanian bukan semata pembangunan sektoral namun juga terkait dengan lintas/inter-sektoral. Pembangunan pertanian sangat terkaitl ditentukan oleh agroindustri hilir, agroindustri hulu dan lembaga jasa penunjang. Dan ketiga, Pembangunan pertanian bukan sebagai pembangunan pengembangan komoditas secara parsial, melainkan sangat terkait dengan pembangunan wilayah, khususnya perdesaan yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat pertanian.

**Saudara sekalian yang saya hormati,**

Pada dasarnya pelaku pembangunan pertanian adalah masyarakat dan sektor swasta. Pemerintah



berperan memfasilitasi bagi peningkatan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat tersebut, serta mengatur agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara adil. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Departemen Pertanian telah menetapkan perlu jiwa (*spirit*) dan nilai (*value*) yang merupakan ruh pembangunan yang melandasi penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan, khususnya sektor pertanian, tanpa dilandasi ruh yang menjadi dasar pijakan akan kehilangan arah dan semangat yang akhirnya dapat menyimpang dari tujuan dan sasaran pembangunan.

Apalagi kegiatan sektor pertanian yang obyek pembangunannya adalah benda hidup, yakni manusia, hewan, tanaman dan lingkungannya, maka ruh pembangunan sangat diperlukan, agar pembangunan tidak bersifat eksploitatif dan merusak kelestarian dari obyek pembangunan. Ruh pembangunan pertanian dimaksud adalah: "Bersih dan Peduli". Bersih berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli berarti memberikan fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat pertanian)

di atas kepentingan pribadi dan golongan (demokratis) dan aspiratif.

Sejalan dengan visi pembangunan pertanian seperti dikemukakan di depan, maka misi yang akan dilaksanakan oleh Departemen Pertanian adalah:

- (1) Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;
- (2) Mendorong pembangunan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan;
- (3) Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman konsumsi;
- (4) Mendorong peningkatan peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional;
- (5) Meningkatkan akses pelaku usaha pertanian terhadap sumberdaya dan pelayanan;
- (6) Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan domestik dan global.



## **Saudara sekalian yang saya hormati,**

Dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan pembangunan di atas, paling tidak ada tujuh strategi umum yang akan ditempuh, yaitu:

Melaksanakan manajemen transparan dan be bas KKN,

Yang bersih, pembangunan

- (1) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian,
- (2) Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan,
- (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM pertanian,
- (4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna, dan..
- (5) Mempromosikan dan memproteksi komoditas pertanian.



## **Saudara-saudara sekalian,**

Dalam lima tahun mendatang, program pembangunan pertanian akan difokuskan pada: (1) peningkatan ketahanan pangan, (2) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, dan (3) peningkatan kesejahteraan petani. Ketiga program tersebut secara bertahap diharapkan mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan petani.

Di samping itu, pembangunan pertanian juga sangat memerlukan dukungan kebijakan dari sektor lain. Kebijakan tersebut antara lain kebijakan makro, kebijakan pengembangan industri, kebijakan perdagangan, kebijakan pengembangan infrastruktur, kebijakan pengembangan kelembagaan, serta kebijakan pendayagunaan dan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan.

## **Saudara sekalian yang saya hormati,**

Untuk mewujudkan semua itu, kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari semua stakeholders yang terlibat dalam pembangunan

pertanian, antara lain masyarakat, swasta, LSM, Legislatif, pemerintah daerah dan tentunya para pakar dan akademisi. Dengan demikian hasil diskusi yang melibatkan stakeholders ini akan menjadi bahan masukan penting bagi kami dalam mempertajam dan memfokuskan prioritas pembangunan pertanian.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kepada seluruh peserta diskusi nasional saya sampaikan selamat berdiskusi dan semoga dapat menghasilkan ide-ide yang baik dan konstruktif bagi pembangunan sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran petani kita. Kami yakin, dengan sinergi dan kerja keras kita sekalian, sosok pertanian yang kita cita-citakan, Insya Allah dapat kita wujudkan.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menteri Pertanian,

ttd

**Dr. Ir. Anton Apriyantono.**



**Speech Remark Minister of Agriculture  
Gala Dinner of The Indonesia Association of  
British Alumni (IABA) Cares on Aceh  
February 14 2005**

- His Excellency British Ambassador, Mr Charles Humfrey,
- Minister of Defence, Prof. Dr. Juwono Sudarsono,
- Chairman & Executive Board of The Indonesia Association of British Alumni (IABA),
- Distinguished guest,
- ladies & Gentlemen

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

It is my honour to speak before you in this "Gala Dinner IABA Cares on Aceh" that organized by the Indonesia Association of British Alumni (IABA), to shows our deepest concern & condolence to all the victims of tsunami disaster in Aceh.

It is time for us to support our brother, sister and children of Aceh to stand up looking for new hope and to face a brighter future this unimaginable disasters. Let us give them a courage to continue their journey of life on the rehabilitation & reconstruction of Aceh; especially their young generations.

Therefore, the participations of IABA member on the Aceh disasters charity event is highly appreciated. Especially this donation will be given as a scholarship for Aceh student living outside their hometown who lost their family is a victim of this its disasters. Hopefully this event will also be a little step for a bigger contribution of British Alumni to the nation in broader spectrum.

### **Distinguished Guest, Ladies & Gentlemen**

In this occasion, I would also congratulate the New Executive Board of IABA 2004-2007 terms, for their appointment, a new and better role of this Association to contribute to enhancement of economic & business of Indonesia is expected and hopefully all the alumni who have been graduated from Britain also could make a synergetic effort by their experiences & competencies and bringing a brighter future of our children.

I believe with never ending supports from His Excellency British Ambassador and all British Company in Indonesia a better and stronger relationship



between Indonesia & Britain especially in economic & Business and education activities could be established.

Thank you,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Minister of Agriculture

ttd

**Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS**



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN  
PADA ACARA PERINGATAN TAHUN  
BARU ISLAM 1426 HIJRIYAH DI MASJID  
NURULIMAN DEPARTEMEN PERTANIAN  
TANGGAL 17 FEBRUARI 2005**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Alhamdulillah, Wasyukurillah Wassolattu Wassalamu  
'Ala Asyrofil Anbiyai Walmursaliin Wa ala Alihi  
Washahbihi Ajma 'in.*

**Yang terhormat,**

- Bapak Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc
- Sdr. Ketua KORPRI Nasional Unit Departemen Pertanian
- Sdr. Ketua PHBI Departemen Pertanian
- Sdr' Ketua Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian
- Sdr. Ketua Yarumtani merangkap Ketua BAZIS-YMPP
- Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Lingkup Departemen Pertanian
- Hadirin Hadirat Rahimakumullah



Pertama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Illahi Robbi, bahwasanya kita masih diberi kesempatan berkumpul disini untuk dapat mengikuti acara peringatan Tahun Baru Islam 1426 Hijriyah. Tak lupa pula kita sampaikan salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

### **Hadirin-hadirat Rahimakumullah,**

Keberadaan Departemen Pertanian sebagai institusi pemerintah terkait erat dengan KORPRI sebagai wadah organisasi pegawai negeri. Karyawan Departemen Pertanian selain melaksanakan tugas-tugas kesehariannya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan di bawah pembinaan KORPRI yang akan mendukung tugas keseharian sebagai pegawai negeri.

KORPRI sebagai wadah pegawai negeri yang melekat dengan kepentingan struktural institusi pemerintah, diharapkan dapat mendinamisir semangat anggotanya. Sebagai salah satu peranannya yaitu dalam pembinaan mental dan rohani. Jika karyawan Departemen Pertanian

memiliki mental spiritual yang baik, saya percaya bahwa pekerjaan sehari-hari yang ditugaskan kepadanya akan terselesaikan dengan baik, penuh Ikhlas dan Lillahita' ala.

### **Saudara-saudara yang dimuliakan Allah,**

Dalam rangka memperingati hijrah Nabi Besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, 1426 tahun yang lalu maka sesuai maknanya yaitu hijrah dapat dianalogikan sebagai hijrah dari hal-hal yang yang tidak baik kepada sesuatu yang baik, hijrah dari suasana hati yang kurang ikhlas bekerja menjadi ikhlas dan penuh dedikasi. Sehingga dimasa-masa mendatang kualitas kerja dan hasil yang dicapai akan selalu lebih baik daripada sebelumnya. Saya juga mengharapkan agar Departemen Pertanian di masa mendatang akan lebih banyak lagi memberi manfaat kepada masyarakat banyak terutama petani, usaha kecil menengah dan koperasi sebagai mitra binaan kita.



## **Hadirin yang berbahagia,**

Sesuai tema peringatan Tahun Baru Islam 1426 Hijriyah kali ini yaitu *"Dengan Semangat Tahun Baru 1426 Hijriyah Kita Wujudkan Pegawai Departemen Pertanian Yang Bersih Dan Bebas KKN"*, maka suatu tantangan berat di hadapan kita untuk terus berupaya mewujudkan pegawai dan pejabat pemerintah yang bersih dan bebas KKN didalam lingkup Departemen Pertanian. Agar Negeri ini cepat bangkit dari keterpurukan ekonomi dan moral seperti yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Mengenai KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

- ❖ Korupsi berarti penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri pribadi maupun golongan.
- ❖ Kolusi berarti persekongkolan dengan tujuan yang sama seperti diatas.
- ❖ Nepotisme berarti tata hubungan kerja yang mengutamakan hubungan keluarga, perkawanan atas golongan yang mengabaikan syarat keahlian



bekerja, sehingga tidak profesional dan merugikan.

Sekecil apapun bentuk KKN seperti di atas harus kita hilangkan.

Mengakhiri sambutan ini, saya atas nama Pimpinan Departemen Pertanian mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1426 Hijriyah. Semoga Allah SWT selalu meridhoi amal ibadah kita. Amin !

***Billahit Taufiq Wal Hidayah***

Wassalamu 'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Jakarta, 17 Februari 2005

Menteri Pertanian

ttd

**Dr. Jr. Anton Apriyantono, M.Sc**



CERAMAH MENTERI PERTANIAN  
PADA MUSYAWARAH TUDANG SIPULUNG  
TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2005

di Kel. Wala, Kec. Maritengnga, Kab. Sidrap,  
Propinsi Sulawesi Selatan  
19 Pebruari 2005

"DENGAN MUSYAWARAH TUDANG SIPULUNG  
TERPADU KITA CIPTAKAN IKLIM INVESTASI DAN  
SEMANGAT KEMITRAAN YANG KONDUSIF UNTUK  
MENDUKUNG PENGEMBANGAN AGRIBISNIS"

**Yang Terhormat,**

- Saudara Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang
- Saudara Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
- Saudara Kepala Dinas Pertanian beserta jajarannya
- Saudara peserta musyawarah Tudang Sipulung dan pelaku kemitraan dari PT. Sang Hyang Seri, Bank Bukopin, Perum Bulog dan PT. Gresik Cipta Sejati serta tokoh masyarakat dan hadirin sekalian yang berbahagia.



Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Mengawali ceramah ini, perkenankan saya mengajak kita semua mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan Musyawarah Tudang Sipulung ini. Sungguh saya sangat berbahagia mendapatkan kehormatan memberikan ceramah dalam pertemuan yang menurut hemat saya sangat penting bagi pembangunan pertanian sekaligus sangat sakral bagi masyarakat disini karena terkait dengan upaya membaca gejala alam dan memakmurkan isi bumi terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, musyawarah yang hendak dilakukan bagaimanapun adalah perintah agama terutama dalam mengatasi berbagai masalah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasinya.

Pada ceramah yang dimintakan ini, saya hanya ingin lebih mengupas dan memperkaya makna musyawarah dalam pembangunan pertanian, sekaligus mengingatkan kembali hakekat "*Tudang Sipulung*" yang saya ketahui dan tentunya ingin menyampaikan apa yang ingin kita capai dalam kurun waktu lima

tahun ke depan serta apa sumbangan yang dapat kita berikan dalam pembangunan pertanian terutama peran yang dapat diberikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Sindenreng Rappang ini.

Saudara-saudara peserta musyawarah yang terhormat, Usaha di bidang pertanian sangat erat dengan alam, dua faktor produksi utama yakni tanah beserta kandungannya dan air secara alamiah disediakan oleh alam, apabila ditambah maka matahari dan angin juga sangat penting dalam usaha pertanian. Dengan kata lain, usaha pertanian tidak bisa tidak tetap tergantung pada alam. Benar, bahwa teknologi yang meminimalisir faktor alam telah berkembang tapi teknologi yang ada tidak dapat menghilangkan faktor alam tersebut sama sekali. Karena itu gejala dan fenomena alam sangat penting untuk kita ketahui dan pelajari terutama untuk menyesuaikan korbanan kapital dan curahan tenaga kerja yang kita berikan dalam investasi usaha pertanian khusus dalam budidaya dan produksi hasil pertanian.

Alam semesta yang diberikan Allah SWT sungguh sangat luar biasa terutama bagi kita yang

tinggal di Indonesia ini. Kekayaan alam ini harus dioptimalkan secara baik tentunya dengan cara yang baik dan benar pula. Cara yang baik salah satunya adalah dengan melaksanakan musyawarah. Dalam musyawarah kita dapat menemukan semangat silaturahmi, kebersamaan, demokrasi, adanya kesamaan visi, keterpaduan dan akhirnya diikuti dengan gerakan bersama yang nyata dan diwujudkan dalam kerjasama usaha. Hal ini semua pada dasarnya adalah hakekat dari pertemuan musyawarah "Tudang Sipulung" yang ingin saya ingatkan kembali. Karena pertemuan ini sangat kental dengan makna dan nuansa yang sangat religius maka diharapkan ridho Allah SWT akan diperoleh. Dengan kata lain alam akan bersahabat dengan usaha pertanian yang kita lakukan ini.

**Saudara-saudara peserta pertemuan yang saya hormati,**

Kegiatan yang sangat baik seperti musyawarah pada hari ini akan terus kita dorong dan tingkatkan baik intensitas maupun kualitasnya serta akan dijadikan contoh bagi daerah-daerah lainnya. Hal ini perlu dilakukan karena tantangan pembangunan



pertanian di masa depan sangat berat. Salah satunya adalah masalah ketahanan pangan. Sejarah menunjukkan bahwa ketahanan pangan (*food security*) sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik bahkan ketahanan nasional secara keseluruhan yang juga berarti kemandirian bangsa. Ketahanan pangan juga merupakan pilar bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Khusus bagi Indonesia sektor pangan adalah sekaligus sektor penentu tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk yang bekerja di on farm yang terdapat di perdesaan yang terdiri dari petani berlahan sempit dan buruh tani yang sebagian besar adalah rakyat miskin. Tidak kalah pentingnya pangan juga menentukan kesejahteraan konsumen miskin perkotaan yang sebagian besar porsi pendapatannya digunakan untuk konsumsi.

Dalam kerangka itu, Departemen pertanian merumuskan visi pembangunan pertanian jangka panjang **"Terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdaya saing, berkeadilan dan berkelanjutan guna menjamin ketahanan**

## **pangan dan kesejahteraan masyarakat pertanian”**

### **Saudara-saudara peserta musyawarah yang terhormat,**

Dalam jangka pendek kita akan terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman pangan, terutama beras, jagung dan kedelai. Untuk itu, pemerintah akan mendorong semaksimal mungkin ketersediaan sarana produksi mulai permodalan, pupuk, alat mesin pertanian, obat-obatan serta air irigasi. Pemenuhan akan kebutuhan sarana itu tentulah merupakan pekerjaan yang sangat rumit dan besar. Karena itu partisipasi dunia usaha sangat diharapkan. Pola kemitraan yang saat ini dikembangkan adalah salah satu alternatif yang dapat dilakukan. Namun saya perlu mengingatkan kemitraan haruslah *“win - win solution”* dan berkesinambungan bukanlah sekedar kerjasama yang cuma ada karena adanya kewajiban apalagi instruksi.

Kemitraan harus didasarkan pada perhitungan bisnis yang matang, transparansi dan egaliter serta berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan. Apabila kemitraan tersebut dapat

dirasakan manfaatnya maka itu akan sangat berarti bagi upaya kita meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang secara ikhlas dengan niat baik bermitra dengan petani-petani kita. Perusahaan seperti Perum Bulog, PT. Sang Hyang Seri dan PT. Gresik Cipta Sejati bukanlah pemain-pemain baru dalam agribisnis. Saya berharap kemitraan seperti ini dapat dikembangkan terus dilain tempat dan daerah, tentunya dengan perbaikan-perbaikan pola kemitraannya. Saya tidak ingin mendengar ada lagi pola-pola kemitraan tetapi cuma sekedar jual beli input produksi tapi tidak mau menanggung resiko usahatani yang sangat tergantung pada alam ini. Oleh karena itu, perusahaan mitra harus memberikan bimbingan dan pendampingan secara serius dan nantinya membeli harga produksi dengan wajar dan tepat waktu.

### **Saudara-saudara sekalian yang terhormat,**

Demikianlah hal-hal yang dapat saya uraikan dalam kesempatan ceramah ini. Saya meyakini langkah yang saudara-saudara tempuh ini sudah sangat tepat. Namun demikian jangan lupa berdoa dan



memohon kepada Allah SWT agar usaha yang dilakukan mendapatkan ridhonya.

Akhirnya saya ucapkan selamat bermusyawarah dan bermitra kepada semuanya, sekali lagi peliharalah forum "*Tudang Sipulung*" ini sebaik-baiknya dan tingkatkan kualitas pertemuan ini dengan informasi-informasi baru di bidang teknologi baik teknologi budidaya maupun pascapanennya. Forum ini sekaligus hendaknya memperkuat posisi tawar petani terhadap pasar. Akan sangat baik apabila kelak forum ini menjadi asosiasi seluruh petani di Sulawesi Selatan dan menjelma menjadi kekuatan ekonomi yang dapat mendorong bukan saja surplus beras dan pangan di Sulawesi Selatan tetapi juga dapat menjadikan negeri kita sebagai negara eksportir beras dunia.

**Billahitaufiq Walhidayah,**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Jakarta, 19 Pebruari 2005

Menteri Pertanian RI

ttd

**Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS**



# **SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN PADA KONFERENSI REGIONAL PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN NELAYAN PASCA BENCANA ALAM DAN TSUNAMI**

**Yang terhormat,**

- Saudara Gubernur Provinsi Sumatera
- Saudara Gubernur Provinsi NAD
- Perwakilan Lembaga PBB untuk pangan dan pertanian
- Para Peserta Konferensi Regional Pembangunan Pertanian Pasca Bencana Alam dan Tsunami

**Hadirin dan undangan yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehdilirat Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan karunia-NYA, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, dalam acara konferensi regional pembangunan pertanian dan nelayan pasca bencana alam dan tsunami yang merupakan suatu langkah penting yang dilakukan oleh Federasi Serikat Petani Indonesia dalam menyikapi kejadian bencana alam dan merumuskan upaya rehabilitasinya,



khususnya yang terjadi 26 Desember 2004 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.

**Saudara sekalian yang saya hormati.**

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, besarnya dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh tidak saja menyulitkan kehidupan masyarakat yang selamat dari bencana tetapi juga berdampak pada rusaknya sumberdaya alam terutama sumberdaya pertanian sebagai sumber berkehidupan masyarakat setempat.

Untuk menanggulangi masalah ini dan memulihkan kegiatan sektor pertanian, melalui Tim Nasional penanggulangan bencana alam Aceh bidang pangan dan pertanian telah dilakukan perumusan strategi penanggulangan yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi 3 aspek, yaitu: 1) kebutuhan dan langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan pangan, 2) langkah-langkah untuk menjamin fungsi pemerintahan, dan 3) langkah-langkah untuk memulihkan kegiatan ekonomi bidang pertanian yang mencakup pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura. Keseluruhan penanganan ketiga aspek ini, dilaksanakan secara sinergi dengan upaya rehabilitasi

secara nasional yang dari segi pembagian waktu dapat dikategorikan sebagai: a) penanganan tanggap darurat, b) penanganan masa transisi, dan c) penanganan masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Saudara-saudara peserta konferensi yang saya hormati,**

Kejadian bencana alam seperti banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau adalah merupakan kejadian yang hampir berlangsung setiap tahun di Indonesia. Sejak jaman dahulu para petani kita telah berpengalaman dalam berusaha yang adaptif dengan kondisi agro-ekosistem yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk usahatani beradaptasi dengan lingkungan tersebut adalah pada musim kemarau, para petani hanya menanam tanaman yang tidak tergantung pada kebutuhan air dalam jumlah besar, dan sebaliknya pada musim hujan. Namun demikian, dampak gempa bumi dan tsunami yang berpusat di Aceh ini, jelas memiliki karakteristik khusus dan skala besar sehingga diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pemulihan yang menyeluruh khususnya dalam mendukung kemampuan masyarakat setempat untuk memulihkan kegiatan pertaniannya, minimal

pada tingkat semula. Dengan modal keterpaduan upaya bersama, saya yakin upaya pemulihan termasuk inisiatif federasi Serikat Petani Indonesia yang melaksanakan konferensi kali ini, dapat terwujud secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan sehingga dapat mempercepat proses pemulihan dampak gempa dan tsunami di wilayah yang terkena.

### **Saudara sekalian yang saya hormati,**

Pemerintah, tidak terkecuali Departemen Pertanian memberikan perhatian yang besar dalam menyikapi berbagai bencana ini. Pemerintah tidak akan berdiam diri tetapi akan selalu berusaha untuk membantu memberikan jalan keluar bagi para petani yang proses produksinya terganggu oleh bencana.

Dari segi tahapan penanganan pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, Pemerintah bersama dengan masyarakat internasional telah melakukan upaya tanggap darurat melalui berbagai langkah penyelamatan dan bantuan kemanusiaan. Kita berupaya menjamin kecukupan persediaan pangan untuk masyarakat pengungsi yang diperhitungkan membutuhkan beras sebesar 116.694 ton dalam 10 sampai 20 bulan ke depan. Selain itu



telah dilakukan pula inventarisasi kerusakan fasilitas pelayanan pemerintah di bidang pertanian yang melaporkan bahwa dari 1.457 orang personil pelayanan pertanian di provinsi NAD sebanyak 94 orang meninggal, 11 orang cedera, hilang/belum diketahui 160 orang dan yang kehilangan rumah 371 unit, selain kerusakan fasilitas kerja di instansi masing-masing.

Dalam rangka penanganan masa transisi ini, disamping terus membantu keperluan penyaluran bantuan pangan dan penyediaan pangan, akan dilakukan langkah-langkah pemulihan fungsi pelayanan pemerintah bidang pangan dan pertanian melalui: 1) perbaikan prasarana dan sarana kerja pemerintah, 2) pendampingan, rekrutmen dan mobilisasi pegawai, 3) rehabilitasi kantor yang mengalami rusak total, 4) melanjutkan penyaluran beras bagi pengungsi apabila masih ada, 5) rehabilitasi lahan pertanian yang rusak dengan didukung rehabilitasi prasarana pendukung seperti saluran irigasi dan jalan usahatani, serta penyediaan sarana pertanian, dan 6) bantuan modal usahatani seperti benih/bibit dan sarana produksi lainnya, serta bantuan

modal untuk usaha pengolahan hasil seperti penggilingan padi.

**Saudara para peserta konferensi yang saya hormati,**

Dari uraian tersebut di atas, kami melihat bahwa banyak aktivitas pemerintah dalam upaya rehabilitasi bidang pangan dan pertanian, dampak bencana alam gempa bumi di Aceh yang dapat disinergikan dengan rencana aksi federasi Serikat Petani Indonesia yang melaksanakan konferensi regional di Medan ini. Beberapa di antaranya dapat kami sampaikan sebagai pertimbangan antara lain: a) pendampingan petugas dalam proses pelayanan pemulihan usahatani setempat sambil menunggu pulihnya pelayanan pemerintah, b) penyediaan induk/entres untuk perbanyak bibit/bahan tanaman unggul bagi pemulihan usahatani dan penanaman kembali lahan yang rusak sekitar 20.101 Ha lahan tanaman pangan, 31.345 Ha lahan kering yang ditanami palawija, hortikultura dan perkebunan rakyat seluas 36.803 Ha, mencakup tanaman karet, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, kopi, pala, kakao, jahe, nilam dan pinang.



Sementara itu ternak mati dan hilang adalah sapi 78.450 ekor, kerbau 62.561 ekor, kambing 73.100 ekor dan unggas lebih dari 1,6 juta ekor, belum termasuk kerugian di Sumatera Utara, c) pendampingan masyarakat/petani setempat dalam proses pemulihan hak kepemilikan lahan, pemulihan sistem produksi di perdesaan dan proses partisipatif perencanaan dan pelaksanaan usahatani berskala usaha, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pengembangan dinamika kelembagaan, kesetaraan dan integrasi horisontal.

### **Saudara peserta Konferensi dan hadirin sekalian,**

Dalam forum ini perlu saya sampaikan bahwa lumpuhnya sarana dan prasarana pendukung berkehidupan terutama di provinsi NAD akan menyebabkan lambatnya proses penyampaian informasi dan masih dimungkinkan terjadinya kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan, untuk itu saya sarankan suatu forum dialog yang partisipatif dalam rangka percepatan pemulihan, antara lain melalui konferensi ini. Saya harapkan, konferensi inipun berhasil merumuskan rancangan langkah

konkrit upaya pemulihan oleh masyarakat baik berdasarkan kondisi nyata hasil analisa masyarakat maupun berdasarkan pengalaman penanggulangan hal sejenis di wilayah lain.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kepada seluruh peserta saya ucapkan selamat berkonferensi, selamat menjalankan tugas yang mulia ini. Semoga upaya kita bersama untuk meringankan beban penderitaan masyarakat dan petani korban bencana alam dapat menjadi kenyataan serta sektor pertanian dapat pulih kembali bahkan dapat terus meningkat.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, maka Konferensi Regional Pembangunan Pertanian dan Nelayan Pasca Bencana Alam dan Tsunami ini, saya nyatakan dibuka secara rami.

Billahit Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 18 Pebruari 2005

Menteri Pertanian,

ttd

**Dr. Ir. Anton Apriyantono,MS**



**WELCOME SPEECH MINISTER OF  
AGRICULTURE COURTESY CALL OF EXCHANGE  
VISIT FOR AGRICULTURAL AND  
RURAL DEVELOPMENT OFFICERS FROM  
AFGHANISTAN IN INDONESIA  
JAKARTA, FEBRUARY 20th 2004**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

First of all allow me to extend my warmest and heartiest welcome to all of you the participants of Exchange Visit for Agricultural and Rural Development Officers from Afghanistan in Indonesia.

**Ladies and Gentlemen,**

Generally agricultural development is identical with rural development. This is true, since any agricultural development will affect to the livelihood of the rural people. About 80% of Indonesian population live in the rural areas, and 90% of them engage in agricultural sector.



Hence, agricultural sector plays a vital role in the rural development. Thus, the agricultural development is identical with rural development.

### **Ladies and Gentlemen,**

Allow me to give you a brief picture of recent development of agricultural and rural development. During the period from 2000 up to 2003, the average annual growth of Gross Domestic Product of agricultural sector was 1.83%, which was higher than the previous period which was only 1.57%. At this time agricultural sector is the accelerating growth phase leading toward sustaining growth. At multidimensional crisis in 1998 the number of poor people increase to 26%. It was however in 2004, the number of poor people had decreased drastically to the level of 19.5%. The total number of families living under poverty line had deceased from 26 million in 2004 to 20.6 million in 2002 with significant growth of agricultural sector, the number of poor farmers in 2004 was much less than in 2002.

During the period from 2000 to 2003 Indonesia suffer experienced shortage of food. Based on the import ratio several important food products,

dependency on food import is relatively very small. In 2003 depending on food import ranged from 0%, eggs to 22% on rice. The national food security has been stable since Indonesia reached self sufficiency in 1984.

### **Ladies and Gentlemen,**

Recently Indonesia agricultural development is facing several constraints and problems, such as :

- a. Limited and degraded agriculture resources demand for agricultural product increased in line with the increase of population and on the other hand national resources capacity particularly land and water are decreasing;
- b. Limited access of farmer to production inputs and information on technology. Financial institution in the village is still very limited and procedures to access the inputs is complicated for farmers;
- c. Technology transfer system is weak, dissemination of technology information from technology sources to farmers is ineffective;
- d. Low quality of human resources due to low level of general education of farmers and insufficient training opportunities for farmers;



- e. Farmer institutions have not been developed. Farmers are only grouped in small informal grouping for learning activities but no regional and national level farmer organization;
- f. Coordination among institutions delivering services to farmers is weak; and
- g. Participation of farmers in planning and implementing agricultural development and extension activities is still low and need improvement.

### **Ladies and Gentlemen,**

To improve the welfare of rural people, the government both national and local government have implemented various projects to improve skills and knowledge of farmers, to improve rural infrastructures, to develop local specific technology, to improve productivity, to increase value added of agricultural products and to increase income.

The program and projects can be grouped into the following categories:

- a. Food production program including the production of rice, maize, soy bean, livestock, poultry and fishery;



- b. Industrial crops production program including rubber, palm oil, coconut, cacao, coffee, etc.  
Both programs provide to farmers information, training, technology, and soft loan.
- c. Agro-forestry program which include re-greening bare land, reforestation and planting trees and herbs;
- d. Income generating activities for small farmers which provide training and credit to implement small business activities;
- e. Integrated pest management training project to promote the application of environment friendly technology in controlling pest of plants and produce safe food;
- f. Rural empowerment programs to promote economic activities of rural people;
- g. Farmer training and extension to provide support to farmer in learning activities; and
- h. Irrigation project to strengthen irrigation infrastructures and to promote farmer managed irrigation system.

Under the present policy of decentralization, all programs and projects are planned based on the need of farmers and implemented by local government and

at the village level, farmers play the roles in planning implementing and evaluating the programs.

## **Ladies and Gentlemen,**

The ultimate goal of the agriculture development, is improvement of income and household welfare of the agricultural communities particularly farmers.

To achieve its goal, the Ministry of Agriculture has designed at least four major strategies in the coming five years:

a. Improvement of farming practices

Over three decades the farming practices focused on increasing production. The present policy is improving productivity and value added of agricultural products through promoting of agro-industry particularly in rural areas. In terms of agro-industry promotion, the involvement of women farmers is strategic and would be increased. Perhaps, by promoting this policy, there would have been significant impacts on generating income and declining urbanization as well.

b. Natural resources conservation

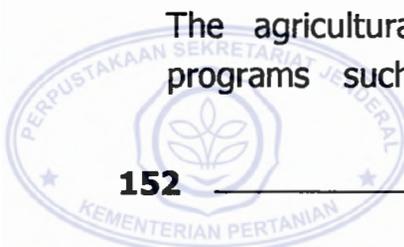
As we all know that the natural resources is constant in amount even more decreasing. The policy maintaining natural resources, especially land and water conservation is direct involvement of community such as promotion of terracing, reforestation and establishment of water users association.

c. Empowerment of farmers organization

Within the last three decades, farmers organization established based on area production approach. Field Extension Officers assist and guide to strengthened and expand capacity of this institution furthermore, by assistance and guidance of the Field Extension Officers, the farmers organization enlarge become farmers cooperative and farmers association. Beside strengthening of farmers institution, since last decade, The Ministry of Agriculture begin promote the involvement of mass organization particularly religions organization such as Islamic Educational Center (Pondok Pesantren) in agricultural development and rural development as well.

d. Agricultural Human Resources Development

The agricultural human resources development programs such as improvement of extension



system, re-vitalization of Extension officers, involvement of non formal leaders, farmers to farmers training and apprenticeship are very important and strategies programs for increasing farmer's income and household welfare as well.

### **Ladies and Gentlemen,**

I believe, we the Indonesians and Afghanistan have a lot of things in common, therefore I hope you will have opportunity to observe and learn the agricultural development activities especially in West Java, Jogjakarta, and East Java, and you will find this program is being useful for reconstruction of your country.

Once again welcome to Indonesia.

Thank you.

Wassalamualaikum Watahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, February 20th, 2005

Minister of Agriculture

ttd

**Dr. Anton Apriyantono,MS**



**Keynote Addres**  
**Menteri Pertanian RI Dalam**  
**REMBUG PENYULUHAN PERTANIAN**  
**PERHIPTANI**  
**23 Febmari 2005 di Jakarta**

- Saudara Ketua Umum beserta pengurus dan anggota PERHIPTANI yang saya cintai,
- Para Undangan berbahagia, dan saudara-Saudara sekalian yang

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam suasana yang akrab dan penuh kekeluargaan untuk mengikuti "*Rembug Penyuluhan Pertanian*" Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (PERHIPTANI).



## **Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Apabila kita telaah secara seksama kondisi penyuluhan pertanian sebagai bagian dari pembangunan pertanian saat ini tidak terlepas dari kondisi pertanian saat ini yang dalam kenyataannya bahwa pertanian Indonesia didominasi oleh usaha kecil yang dilaksanakan oleh berjuta-juta petani, berlahan sempit bermodal kecil dan memiliki produktivitas yang rendah. Kondisi ini memberi dampak yang kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global. Kondisi yang lebih penting lagi adalah bahwa Indonesia sebagai negara agraris dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa potensi sumberdaya pertanian yang melimpah dan seharusnya dapat dijadikan modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pada masa lalu, sejak zaman Hindia Belanda Indonesia merupakan negeri yang mengeksport hasil pertanian ke seluruh negaranegara Eropa Barat. Memasuki abad ke 21, Indonesia yang masih merupakan negara agraris ternyata dibanjiri produk pertanian dari negara-negara lain.



Pembangunan pertanian ke depan diharapkan dapat memberi kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja, serta mampu meredam dampak globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang kurang menguntungkan. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal serta memiliki kemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lainnya mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi.

Pada era liberalisasi perdagangan dewasa ini daya saing negara satu dengan negara yang lain tidak ditentukan oleh melimpahnya sumberdaya alam tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia negara yang bersangkutan dalam memproduksi barang dan jasa untuk diperdagangkan baik di dalam negeri maupun ekspor. Ternyata daya saing sumberdaya manusia Indonesia berada pada kedudukan yang sangat rendah yaitu pada posisi nomor 112 diantara 170 negara anggota PBB.



## **Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Untuk meningkatkan daya saing petani dan pelaku usaha pertanian lainnya di Indonesia perlu lebih ditingkatkan upaya pemberdayaannya melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada saat ini menghadapi berbagai permasalahan yang tidak hanya kondisi petaninya tetapi juga kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan pembia-yaan penyuluhan pertanian.

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang beragam baik bentuk, struktur, tugas dan fungsinya yaitu dalam bentuk badan 7 buah, kantor 72 buah, balai 24 buah, sub dinas 82 buah, seksi 23 buah, UPTD 21 buah, dan kelompok jabatan fungsional 135 buah, sedangkan 6 % nya bentuk kelembagaannya belum jelas atau dibubarkan. Sementara itu dari sebanyak 3.892 BPP yang telah dibangun pada saat ini kurang difungsikan dengan baik oleh Kabupaten/Kota. Bahkan di beberapa Kabupaten/Kota, BPP ini sudah dihapuskan atau muncul dalam bentuk lain.

Jumlah Penyuluh Pertanian seluruhnya di Indonesia saat ini sebanyak 25.380 orang. Dari jumlah tersebut,

Sebanyak 24.848 orang tersebar di BPP dan Kabupaten/Kota, 200 orang di Dinas-Dinas/Badan lingkup pertanian Provinsi, 257 orang di BPTP, dan 55 orang di Unit Kerja Deptan Pusat. Tugas mereka tidak jelas, di beberapa Kabupaten/kota tidak diakui jabatan fungsionalnya, tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan, pola karier tidak jelas, kenaikan pangkatnya sering terhambat, kesempatan mengikuti pelatihan sangat kurang sehingga kompetensinya tidak berkembang sesuai dengan tantangan globalisasi, bahkan banyak Penyuluh Pertanian yang alih tugas ke jabatan lain dan sebagian besar sudah hampir memasuki masa pensiun, mengakibatkan tidak sebandingnya jumlah penyuluh pertanian dengan jumlah petani/kelompok tani dan pelaku usaha lainnya yang harus dilayaninya.

Keadaan inilah yang menyebabkan mereka frustrasi, sehingga jelas akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Oleh karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan solusi untuk pemecahan masalah ketenagaan ini termasuk pengangkatan penyuluh pertanian secara bertahap agar tidak terjadi kekurangan penyuluh pertanian, baik dari para penyuluh honorer yang masih banyak (lebih kurang

2400 orang) atau merekrut tenaga baru lulusan D III dan S 1 bidang pertanian dalam arti luas.

Penyusunan Programa penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota dan programa penyuluhan pertanian di BPP Kecamatan tidak dilakukan, walaupun dilakukan tidak realistis sehingga opersionalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi tidak jelas, tidak terdapat kegiatan-kegiatan pendamping yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing petani dan pelaku usaha pertanian lainnya. Kegiatan penyuluhan pertanian sebagai bagian dari suatu sistem pemberdayaan petani hampir tidak ada kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Penyuluh Pertanian untuk melaksanakan tugasnya membutuhkan tersediannya sarana baik saran mobilitas (sepeda motor) dan sarana penyuluhan lainnya. Saat ini penyediaan sarana penyuluhan pertanian sangat terbatas bahkan ada yang tidak disediakan sama sekali. Sarana yang telah tersedia pada waktu yang lalu oleh pemerintah Daerah ada yang dipindahkan kepada



petugas lain yang, 'tidak ada kaitannya dengan kegiatan penyuluhan pertanian.

Pembiayaan penyuluhan pertanian termasuk didalamnya dana operasional Penyuluh Pertanian (UKB) yang disediakan oleh Pemerintah melalui DAU disamping kurang memadai, juga tidak digunakan sesuai dengan yang dialokasikan untuk penyuluhan pertanian oleh Daerah, sehingga penyuluhan pertanian belum dapat diselenggarakan secara optimal, yang pada gilirannya akan menghambat pelaksanaan program pembangunan pertanian.

Kondisi Penyuluhan pertanian seperti itu menjadikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak efisien efektif dan produktif, penyuluhan pertanian tidak dapat meningkatkan keberdayaan petani yang akhirnya pencapaian visi pembangunan pertanian menjadi jauh untuk dapat dicapainya, misi pembangunan pertanian tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar sehingga tujuan pembangunan pertanian untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya tidak dapat dicapai.



## **Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Dalam era globalisasi dan era otonomi daerah dan era pembaharuan sekarang ini peran serta aktif masyarakat pertanian dalam pembangunan pertanian termasuk dalam penyuluhan pertanian sangat diperlukan. PERHIPTANI sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan, sebagai stakeholder penyuluhan pertanian, sebagai organisasi keilmuan penyuluhan pertanian, sudah pada tempatnya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan yang berkaitan dengan tujuan organisasinya, yaitu mengkaji dan menciptakan sistem kerja atau model-model penyuluhan pertanian, mengembangkan ilmu dan teknologi penyuluhan pertanian melalui berbagai kegiatannya termasuk dalam "*Rembug Penyuluhan Pertanian*" ini, serta kegiatan-kegiatan lainnya, kemudian hasilnya dapat disebarluaskan kepada para penyelenggara dan pelaksana penyuluhan pertanian untuk dapat memperbaiki kondisi penyuluhan pertanian.

PERHIPTANI pada era globalisasi, era otonomi dan era pembaharuan sekarang ini seyognya dapat memberikan sumbangan ilmu dan teknologi untuk dapat memperbaiki kondisi penyuluhan pertanian, untuk dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan pertanian agar

pembangunan pertanian dapat mengaplikasikan ruh-nya yaitu "bersih dan peduli", dengan pengertian bersih adalah bebas dari KKN; amanah, transparan, akuntabel, demokratis dan aspiratif, serta peduli adalah: fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, keberpihakan kepada masyarakat pertanian, sehingga visi penyuluhan pertanian: Menjadikan penyuluhan pertanian sebagai sistem pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain yang tangguh untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan mereka, serta visi pembangunan pertanian yaitu Terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan dapat dicapai.

Dengan dukungan dan sumbangan yang nyata dari PERHIPTANI, penyuluhan pertanian sebagai salah satu bagian dari pembangunan pertanian akan dapat memberikan sumbangan yang nyata dalam membangun sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas dan handal serta memiliki kemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lain mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi, yang pada akhirnya pembangunan pertanian akan dapat memberi kontribusi

yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja, serta mampu meredam dampak globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang kurang menguntungkan.

**Hadirin sekalian yang saya hormati,**

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas terselenggaranya "*Rebug Penyuluhan Pertanian*" ini, semoga kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan pembangunan bangsa dan negara ini di masa mendatang.

Terima kasih,

Wabilahi Taufik Walhidayah

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 23 Februari 2005

Menteri Pertanian RI

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN RI  
PADA ACARA "PANEN PERDANA JAGUNG  
HIBRIDA MELALUI POLA KEMITRAAN"**

**Karanganyar, 25 Pebruari 2005**

Yang saya hormati,

- Gubernur Propinsi Jawa Tengah;
- Bupati Karanganyar;
- Direksi PT. Bank Bukopin, BRI, BPD dan Bank Penyalur KKP lainnya;
- Direksi PT. Akido Prima Sejahtera;
- Serta Hadirin sekalian.

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertamanya saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan bersama-sama melakukan *"Panen Perdana Jagung Melalui Pola Kemitraan antara Kelompok Tani, Bank Bukopin, dan PT. Akido Prima Sejahtera"* di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan memanfaatkan dana Kredit Ketahanan Pangan (KKP).



## **Saudara-saudara sekalian,**

Mengawali sambutan ini, dapat saya sampaikan terlebih dahulu bahwa program pembangunan ekonomi Indonesia yang menitikberatkan pada pembangunan pertanian adalah sudah tepat mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian, disamping perannya dalam kontribusi PDB, penyediaan lapangan kerja, dan perolehan devisa negara. Hal ini tentunya menjadi tantangan Departemen Pertanian bagaimana secara mikro program pembangunan pertanian dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, dilain pihak secara makro dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, membantu dalam penyediaan lapangan kerja, dan membantu dalam peningkatan perolehan devisa negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka tidak berlebihan apabila Departemen Pertanian dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian melandaskan pada nilai dan ruh yang Bersih dan Peduli. Hal ini mengingat pembangunan pertanian tanpa dilandasi ruh yang menjadi dasar pijakan akan



kehilangan arah dan semangat yang akhirnya dapat menyimpang dari tujuan dan sasaran pembangunan.

Bersih berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), amanah, transparan, dan akuntabel. Peduli berarti memberikan fasilitas, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat pertanian) di atas kepentingan pribadi dan golongan.

### **Para hadirin yang terhormat,**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pertanian maka Departemen Pertanian telah menetapkan 3 (tiga) program utama yaitu : (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian, dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Peningkatan Ketahanan Pangan khususnya pengembangan jagung maka telah ditempuh 3 (tiga) pola strategi yaitu : pengembangan jagung hibrida, pendekatan daya dukung industri khususnya pakan ternak dan pola investasi dengan fasilitasi hak guna

usaha oleh pemerintah daerah yang kesemuanya dalam rangka keberhasilan upaya Gerakan Tambahan 2 Juta Ton (GENTATATON-Jagung) sehingga kita tidak lagi impor jagung.

### **Hadirin yang saya hormati,**

Sangat tepat pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengimplementasikan program pembangunan pertanian antara lain melalui penetapan komoditas jagung sebagai komoditas unggulan dalam pembangunan pertanian, hal ini mengingat prospek komoditas jagung ini sekarang dan dimasa yang akan datang sangat menjanjikan yaitu dilihat dari perkembangan harga dan permintaannya yang terus meningkat khususnya untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak yang selama ini masih didatangkan dari import.

Perusahaan pakan ternak dalam jangka panjang tidak dapat lagi mengandalkan pasokan import mengingat terbatasnya pasaran dunia dan meningkatnya harga internasional. Hal ini tentunya merupakan peluang bagi daerah dalam meningkatkan produksi dan produktivitas jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak tersebut.

## **Hadirin yang berbahagia,**

Dalam rangka mempercepat pembangunan pertanian pada umumnya dan pengembangan jagung pada khususnya, ketersediaan pembiayaan (modal) merupakan salah satu akselerator bagi keberhasilan pengembangan jagung. Namun demikian, dengan semakin terbatasnya dana yang bersumber dari pemerintah sebagai akibat dari krisis ekonomi pada waktu yang lalu maka perlu dicarikan alternatif sumber pembiayaan yang lain baik berasal dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.

Salah satu sumber pembiayaan yang berasal dari perbankan yang terjangkau dengan suku bunga murah adalah skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP). KKP yang sudah berjalan selama 4 (empat) tahun, secara kumulatif, penyalurannya telah mencapai Rp. 2,640 triliun atau 126,83 % dari plafon sebesar Rp. 2,082 triliun. Namun demikian khusus penyaluran KKP tanaman pangan masih dirasakan belum optimal yaitu baru 41,11% dari plafon yang disediakan. Adapun salah satu penyebabnya adalah terbatasnya Avalis untuk berperan serta dalam penjaminan kredit KKP. Untuk itu saya menghargai partisipasi PT. Akido Prima

Sejahtera untuk bertindak sebagai Avalis sehingga lebih meyakinkan perbankan dalam mempercepat penyaluran KKP.

Dapat saya kemukakan disini bahwa kinerja KKP ini cukup menggembirakan terutama dari aspek Non Performing Loan (NPL) atau tunggakan kreditnya yang relatif kedl yaitu 0,08% untuk KKP tebu, 5,84% untuk KKP peternakan dan 6,68% untuk KKP tanaman pangan. Hal ini mengindikasikan bahwa petani mulai menyadari bahwa kredit adalah kepercayaan dan utang yang harus dikembalikan.

### **Hadirin yang saya hormati,**

Peranan pemerintah dalam pelaksanaan KKP antara lain adalah menyediakan subsidi suku bunga kepada petani dengan tujuan : (a) suku bunga yang dibayar petani menjadi lebih ringan, (b) petani dapat menerapkan teknologi rekomendasi budidaya secara optimal dan (c) produksi, pendapatan dan kesejahteraan petani menjadi lebih baik. Disamping itu pemerintah terus berupaya agar prosedur pemanfaatan KKP menjadi lebih sederhana dan suku bunga KKP yang dibayar petani semakin rendah, yaitu pada awal tahun 2001 sebesar 12% turun menjadi 7%

untuk komoditi tanaman pangan, sedangkan untuk non-pangan turun dari 16 % menjadi 10% saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka saya mengharapkan dana KKP dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara optimal oleh para petani sehingga mereka dapat melakukan budidaya secara optimal yang akhirnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan petani menjadi lebih baik.

### **Para hadirin yang saya hormati,**

Dapat saya sampaikan disini bahwa saya sangat menghargai upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar yang telah menggandeng PT. Akido Prima Sejahtera sebagai Avalis sehingga tercipta pola kerjasama kemitraan antara perbankan, penjamin kredit dan kelompok tani dalam rangka pengembangan jagung melalui pemanfaatan dana KKP.

Saya mengharapkan peran pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, bersamaan dengan datangnya panen ini, dapat membantu dalam pengembalian kreditnya sehingga mendidik petani



bahwa kredit merupakan kepercayaan dan hutang yang harus dikembalikan..

Selanjutnya kepada PT. Akido Prima Sejahtera yang bertindak sebagai Avalis, saya harapkan dapat terus berperan dalam penyediaan sarana produksi melalui prinsip 6 tepat, berperan dalam penampungan hasil produksi dengan harga kesepakatan yang adil sehingga para petani dapat melakukan usaha budidaya secara optimal yang akhirnya produksi meningkat sekaligus pendapatan dan kesejahteraan petani menjadi lebih baik.

Kepada Bank Bukopin saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk yang pertama kali dapat memfasilitasi KKP di Kabupaten Karanganyar melalui Pola Kemitraan ini. Untuk selanjutnya perlu terus dikembangkan sehingga dapat mencakup areal yang lebih luas yang pada akhirnya dapat membantu para petani khususnya dibidang permodalan .

### **Hadirin yang saya hormati,**

Saya mengharapkan dan menekankan kembali pada Pola Kerjasama Kemitraan dengan memanfaatkan dana KKP ini dapat terus dilakukan dan

dikembangkan dengan prinsip keadilan sehingga tidak ada yang saling dirugikan melainkan saling memperoleh keuntungan sehingga Pola Kemitraan ini dapat berjalan secara langgeng.

Sesuai dengan semangat reformasi dan otonomi daerah maka peran pemerintah daerah sangat besar dalam pencapaian dalam pembangunan pertanian. Untuk itu sekali lagi saya mengharapkan agar pemerintah daerah dapat terus melakukan identifikasi para petani yang akan memanfaatkan KKP, membantu dalam memasarkan hasil produksi bahkan ikut serta dalam pembagian resiko kredit dengan perbankan. Adapun peran pemerintah pusat dalam KKP terbatas penyediaan subsidi suku bunga KKP, serta dalam fasilitasi dan koordinasi.

Pada kesempatan yang baik ini juga dapat saya sampaikan bahwa pelaksanaan KKP ini diperpanjang selama 2 tahun sampai Desember 2007, hal ini tentunya merupakan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil khususnya para petani dan peternak sehingga mereka dapat melakukan usaha budidayanya sesuai dengan paket teknologi rekomendasi sehingga



pendapatan dan kesejahteraan petani menjadi lebih baik.

**Para hadirin yang berbahagia,**

Mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak khususnya kepada Bupati Karanganyar beserta jajarannya yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya acara Panen Perdana Jagung ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati usaha kita semua.

Sekian, dan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Menteri Pertanian,  
ttd  
Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



## Keynote Speech

Menteri Pertanian Pada Seminar Nasional Industri  
Peternakan 2005 Di Fakultas Peternakan, Universitas  
Padjajaran Bandung 26 Februari 2005

Tema: MENGGAGAS MASA DEPAN PETERNAKAN DI  
ERA PEMERINTAHAN BARU

Assalamu'Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

- Yang saya hormati Rektor Universitas Padjajaran
- Yang saya hormati Jajaran Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran
- Yang saya hormati Saudara Para Narasumber
- Yang saya hormati para Mahasiswa Fakultas Peternakan Unpad
- Serta hadirin dan para undangan yang saya hormati.

1. Pertama-pertama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya yang memungkinkan kita dapat bertemu pada pagi hari ini untuk menghadiri suatu acara "Kajian Sehari Tentang Peternakan Nasional", dalam keadaan sehat wal'afiat tak kurang sesuatu apapun. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada BEM

(Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran yang memprakarsai kegiatan ini. Diharapkan hasil kajian sehari ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pembangunan pertanian termasuk sub sektor peternakan.

2. Kajian sehari ini, bertemakan "Menggagas Masa Depan Peternakan di Era Pemerintahan Baru". Tema ini saya nilai sangat penting di tengah-tengah kesibukan kita saat ini untuk merampungkan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Sektor Pertanian dan Peternakan Tahun 2005-2009 sehingga tidak berlebihan kiranya bahwa saran-saran dan pemikiran yang timbul dalam acara ini dapat memperkaya rumusan-rumusan Renstra yang sedang kita bangun. Dalam membangun Renstra Pembangunan Pertanian, sengaja kita mintakan sumbang saran dari seluruh elemen masyarakat. Pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan pertanian tersebut sudah sewajarnya kita berikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan pokok-pokok fikirannya. Oleh karena sifat dari pertemuan ini berupa kajian, maka saya harapkan seluruh para peserta dapat bebas mengemukakan pendapatnya, dengan dilandasi semangat akademik yang tinggi.

3. Apa yang akan saya sampaikan adalah suatu pemikiran pembangunan pertanian dan peternakan dari sudut pandang pemerintah. Walaupun titik pandang ini berasal dari pemerintah bukan berarti semua kebijaksanaan menjadi benar. Kebijakan-kebijakan pemerintah pada dasarnya akan berdampak kepada masyarakat luas sehingga kebijaksanaan tersebut perlu dikritisi, diberi saran atau bahkan disempurnakan. Karena pada hakekatnya pemerintah berprinsip bahwa harus terus dilakukan proses-proses learning walaupun dalam perumusan-perumusan kebijakan publik. Proses learning tersebut mengandung 3 arti yang sangat penting bagi kita semua. Arti pertama adalah pemerintah berprinsip "learning how to learn", artinya pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya terus melakukan perubahan-perubahan melalui proses hubungan interaksi yang egaliter antara seluruh elemen-elemen masyarakat dan swasta. Sehingga menjadi suatu keniscayaan bahwa suatu kebijakan yang telah ditempuh dapat saja dirubah atau disempurnakan.

4. Saat ini di Departemen Pertanian telah dikaji ulang beberapa kebijakan yang dibuat termasuk UU No. 6/1967, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Arti penting kedua adalah "learning how to unlearn", artinya pemerintah bersedia menanggalkan kebijakan-kebijakan yang dipandang sudah tidak tepat lagi dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Departemen Pertanian yakin bahwa kebijakan-kebijakan yang tadinya dianggap penting banyak yang sudah tidak relevan lagi saat ini termasuk berupa surat-surat keputusan. Selanjutnya arti penting ketiga adalah "learning how to relearn", artinya pemerintah senantiasa atau terus-menerus melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas kebijakan yang dibuat, sehingga perbaikan dapat secara terus-menerus dilakukan. Prinsip-prinsip learning ini sebagaimana diketahui membutuhkan "organisasi pembelajaran" yang mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen strategis dan manajemen perubahan.

5. Dari pengertian-pengertian proses pembelajaran tersebut maka pembangunan pertanian ke depan memang sangat memerlukan perubahan-perubahan besar. Misi pembangunan pertanian selama ini dianggap sebagai penyerap tenaga kerja yang besar, dan sektor pertanian dianggap sebagai produsen atau pensuplai komoditi pangan yang murah dan berjumlah

banyak. Kondisi ini menyebabkan seolah-olah sektor pertanian menjadi sektor yang residual, padahal seharusnya misi penting pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani termasuk peternak dan menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

6. Pemikiran bahwa sektor pertanian semata-mata adalah untuk meningkatkan produksi kini harus bergeser menjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kita katakan demikian, karena sektor pertanian yang bertujuan semata-mata untuk meningkatkan produksi, terbukti tidak menjamin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Malahan dalam beberapa hal pendekatan peningkatan produksi semata-mata tersebut telah memarginalkan petani secara struktural dan kultural . Sehingga pada titik ini yang harus ditangani oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian adalah manusia petani itu sendiri dengan segala aspeknya. Kita kenai konsep ini sebagai konsep pembangunan yang berpusat pada manusia. Departemen Pertanian berprinsip bahwa penanganan kebijakan akan lebih difokuskan kepada manusia petaninya, dan bukan kepada komoditinya. Karena pada dasarnya komoditi seperti sapi potong,



kambing/domba, ayam buras, ayam ras dan itik serta komoditi lainnya adalah sekedar alat yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Sekali lagi saya tegaskan bahwa komoditi itu sebagai alat untuk peningkatan kesejahteraan petani.

7. Oleh karena komoditi hanyalah sebagai alat, maka yang lebih penting adalah manusia-manusia yang mengelola komoditi tersebut, baik petani, aparat dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang terlibat dalam pembangunan pertanian. Sejalan dengan pemikiran tersebut maka pembangunan pertanian memiliki ruh yang menjiwai seluruh pelaksanaan pembangunan sektor pertanian, yaitu Bersih dan Peduli. Bersih artinya dalam menjalankan tugasnya bersih dari KKN, Peduli artinya tanggap dan mempunyai rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya kepada petani. Sedangkan visi yang ingin dibangun oleh Departemen Pertanian adalah "terwujudnya usaha pertanian industrial dalam rangka memantapkan ketahanan pangan dan menjamin kesejahteraan petani".



8. Pemerintah saat ini secara khusus memprioritaskan sektor pertanian sebagai basis perekonomian nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah melalui revitalisasi pertanian yang mencakup 1) pengamanan ketahanan pangan, 2) peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan 3) peningkatan kesejahteraan petani.

9. Sub sektor peternakan sebagai bagian dari sektor pertanian menurut saya memiliki tugas mulia dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tahu bahwa didalam produk-produk peternakan terkandung 10 asam amino esensial yang tidak tergantikan oleh asam amino lainnya. Ke 10 asam amino ini adalah radikal-radikal yang sangat menentukan kecerdasan manusia. Sehingga dengan demikian protein hewani dapat dianggap sebagai salah satu agent of development.

10. Dalam perkembangannya pembangunan peternakan menghadapi berbagai macam kendala, khususnya dalam peningkatan produksi daging dan susu. Pada tahun 2009 produk daging sapi diperkirakan hanya mampu mencukupi 80% dari total

kebutuhan, dengan kata lain populasi sapi diperkirakan hanya sebesar 12,4 juta ekor, sedangkan populasi ideal yang diharapkan adalah sebesar 14,6 juta ekor. Artinya kita mengalami defisit populasi sebesar 2,2 juta ekor. Keadaan ini tidak bisa ditempuh melalui kebijakan teknis semata (kebijakan dari aspek perbibitan, pakan, budidaya dan kesehatan hewan), melainkan harus ada upaya-upaya yang bersifat non teknis, yaitu dengan cara pemberian insentif yang dapat menjadi pemacu agar sektor swasta dan masyarakat lebih bergairah lagi memasuki usaha sapi potong. Selain itu tentunya juga dapat merangsang agar usaha sapi potong dapat merubah dirinya dari usaha sampingan yang subsisten menjadi bersifat usaha pokok. Kita memiliki banyak usahausaha perkebunan kelapa sawit dan karet baik milik BUMN maupun swasta yang dapat dijadikan sebagai basis produksi peternakan sapi melalui pola integrated farming system sehingga ada peningkatan efisiensi dan peningkatan pendapatan dari sisi korporasi, sedangkan dari sisi petani karyawan berupa insentif peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

11. Untuk industri susu dalam negeri kita baru mampu memasok 20%-30% dari total kebutuhan Industri

Pengolah Susu (IPS). Mayoritas kebutuhan kita adalah dalam bentuk susu bubuk (milk powder) sehingga upaya peningkatan produksi susu segar tanpa dibarengi peningkatan kapasitas industri pengolahan menjadi susu bubuk akan menghadapi kendala. Kasus Jawa Timur pada tahun sebelumnya merupakan contoh konkret dimana IPS tidak mampu menyerap susu segar masyarakat, tetapi kekurangan susu dalam bentuk bubuk.

12. Untuk industri perunggasan dalam negeri masih mengandalkan agroinput dari impor terutama bahan baku pakan jagung dan kedelai. Untuk bahan baku pakan akan segera kita benahi utamanya dari sisi sifat industrinya, dimana harus mampu menjamin sifat kontinuitas dan kepastian suplainya. Sedangkan dari sisi peningkatan produksi unggas kita tidak bisa pacu (meskipun potensi produksi bisa ditingkatkan sebesar 42%) karena keterbatasan permintaan dalam negeri, sementara ekspor belum dapat kita lakukan karena terkendala dalam hal penyakit Avian influenza. Strategi pemberian insentif dalam rangka merangsang para integrator berani melakukan ekspor merupakan salah satu pilihan, dengan demikian potensi produksi terus bisa kita pacu.

13. Yang paling potensial adalah komoditi kambing/domba. Kita ketahui bahwa kambing/domba mengalami surplus secara nasional, sementara permintaan ekspor khususnya dari Timur Tengah dan Malaysia pada musim haji sangat menjanjikan. Permintaan itu belum bisa kita penuhi disebabkan masalah sifat kontinuitas yang kurang dan kelembagaan yang sangat lemah, sehingga potensi ekspor itu hanya bisa dimanfaatkan oleh negara tetangga kita dari Australia dan Selandia Baru. Ke depan yang perlu kita benahi adalah masalah kelembagaan sehingga begitu ada permintaan langsung bisa kita penuhi.

14. Dalam rangka "Menyongsong Masa Depan Peternakan di Era Pemerintahan Baru", peran pemerintah harus dikembalikan lagi kepada fungsinya, yaitu sebagai fasilitator. Dalam bahasa administrasi kebijakan publik peran pemerintah akan sangat terkait dengan hal-hal yang bersifat public good yaitu hal-hal yang terkait dengan kebutuhan semua orang tanpa terkecuali dan belum atau tidak bisa dilakukan masyarakat, seperti penanggulangan wabah penyakit hewan, Karantina, penelitian dan pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Selain itu pemerintah juga

berperan dalam aspek-aspek yang terkait dengan extern alitis , yaitu hal-hal yang terkait dengan aspek fasilitas perdagangan antar pulau, ekspor-impor dan sebagainya. Aspek lainnya yang menjadi beban pemerintah adalah hal-hal yang terkait dengan economic of scale, yaitu pelayanan jasa masyarakat kesehatan hewan yang belum bisa dilakukan oleh swasta dan masyarakat dalam skala ekonomi tertentu. Akhirnya pemerintah berperan penting dalam penegakan moral hazard, yang menjamin bahwa bahan pangan hewani asal ternak tersebut aman, sehat, utuh dan halal.

Demikian pokok-pokok makalah tentang "Menggagas Masa Depan Pembangunan Perternakan di Era Pemerintahan Baru", semoga ada manfaatnya.

Bandung, 26 Februari 2005

Menteri Pertanian

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS



**ORASI ILMIAH MENTERI PERTANIAN RI  
PADA WISUDA XIX TAHUN 2005  
UNIVERSITAS SAHID JAKARTA  
di Puri Agung Hotel Sahid Jaya  
Jakarta, 2 Maret 2005**

**PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA  
UNGGUL DI BIDANG PERTANIAN DALAM  
MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN  
KEMANDIRIAN BANGSA**

**Yang Terhormat,**

- Saudara Ketua Pendiri dan Pembina Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya,
- Bapak Prof. DR. H. Sukamdani Sahid Gitosardjono
- Saudara Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya
- Saudara Koordinator Kopertis Wilayah III
- Saudara Rektor Universitas Sahid Jakarta,
- Civitas Akademika Universitas Sahid dan seluruh wisudawan/ wisudawati beserta keluarga dan hadirin sekalian yang berbahagia.



Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Mengawali Orasi ini, perkenankan saya mengajak kita semua mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam prosesi wisuda XIX Universitas Sahid Jakarta ini dalam kondisi yang sangat baik. dan penuh rasa bahagia. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan penghargaan yang diberikan Universitas Sahid kepada saya selaku Menteri Pertanian untuk menyampaikan orasi ilmiah ini pada forum yang sangat penting ini. Saya memandang tema orasi ilmiah ini sangat relevan dengan kondisi dan tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa khususnya dalam menghadapi persaingan global dan perubahan dinamika hidup berbangsa pada era reformasi ini.

Isu pengembangan sumberdaya manusia bukanlah hal baru bagi kita. Sejak para pendiri bangsa merumuskan tujuan berbangsa dan bernegara tema pengembangan sumberdaya manusia telah diusung dan telah dirumuskan secara kongkret pada Undang-Undang Dasar Negara. Istilah "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa" yang tercantum dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar sangat bermakna banyak, bahkan lebih luas dari sekedar pengertian pengembangan sumberdaya manusia yang kita pahami saat ini, karenanya sebagai tujuan yang hakiki dia menjelma menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi kita semua untuk mencapainya. Amanat UUD 45 tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya lahir dan bathin berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

### **Civitas Akademika Universitas Sahid yang berbahagia,**

Sebelum lebih jauh, saya ingin mengajak kita melihat kenyataan yang ada, bahwa pada tahun 2003, jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index = HDI) tingkat kualitas SDM Indonesia menempati peringkat ke 112 dari 175 negara yang dinilai. Tahun 2004 posisinya agak lebih baik, naik satu tingkat. Selanjutnya dari hasil survey World Economic Forum (WEF) yang dikeluarkan 30 Oktober 2003, peringkat daya saing Indonesia untuk tahun-tahun terakhir ini berada pada posisi yang memprihatinkan. Indeks daya saing pertumbuhan



tahun 2003 menempati peringkat 72 dari 102 negara jauh dibawah China, Singapura, Malaysia, Philipina, Thailand dan Vietnam. Sementara itu indeks daya saing teknologi menempati urutan ke 78. Mengacu pada angka-angka indeks tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang kualitas SDM dan daya saingnya masih rendah.

Hal inilah barangkali yang menjadi penyebab mengapa perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap guncangan eksternal dan mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Beberapa pengamat berpendapat bahwa salah satu faktor kunci dibalik krisis ekonomi nasional adalah masalah kualitas dan inkompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Masalah kualitas dan inkompetensi SDM ini muncul akibat dari masalah yang sangat kompleks mulai dari problem sosial-budaya, sistem pendidikan, keterbatasan dana dan sarana pendukung, hingga masalah saringan kualitas SDM yang buruk yang sarat dengan "KKN".

### **Civitas Akademika yang saya hormati,**

Kini marilah kita melihat bagaimana fakta SDM di sektor pertanian, yang merupakan sektor dominan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi

penduduk. Keberadaan SDM pertanian yang berkualitas merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian kita. Kualitas SDM Pertanian sebagai human asset atau human capital dari pembangunan pertanian sekaligus akan menentukan keberhasilan dalam pencapaian ketahanan pangan dan kemandirian bangsa khususnya dibidang pangan yang kita inginkan. Sebagaimana tercantum dalam visi pembangunan pertanian jangka panjang : " Terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdaya saing, berkeadilan dan berkelanjutan guna menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pertanian."

Sumberdaya manusia pertanian dalam arti luas sangat beragam, tidak hanya meliputi petani, peternak, nelayan, pekebun dan petugas pertanian, tetapi mencakup seluruh lapisan masyarakat yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan pertanian. Sebagai contoh: Pers (media massa) memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian, melalui pemberitaan dapat mempengaruhi perilaku baik produsen maupun konsumen serta pedagang dalam pengambilan keputusan. Demikian juga LSM, perguruan tinggi,

aparap keamanan, perbankan, assosiasi, pemuka masyarakat dan lain lain, mempengaruhi perkembangan pembangunan pertanian.

Pengembangan SDM Pertanian diawali dengan pengkajian terhadap potret SDM Pertanian yang meliputi : jumlah, pendidikan, distribusi, kelembagaan, status, fungsi dan keragaannya. Hasil kajian tersebut dianalisa kemudian menjadi bahan untuk penyusunan perencanaan pengembangan SDM Pertanian.

Pengembangan SDM Pertanian pendekatannya melalui enam kelompok yaitu :

1. Kelompok Pelaku; yaitu kelompok yang melakukan proses produksi, transaksi dan konsumsi hasil - hasil pertanian. Dalam kelompok ini terdiri dari petani/peternak, pengusaha pertanian, pengumpul serta pengepul, pedagang eksportir, importir, industriawan dan konsumen, buruh tani, pemilik lahan dan lain - lain. Kecuali konsumen, jumlah mereka lebih kurang 40 juta jiwa yang terdiri dari 24 juta keluarga (BPS, 1998). Tingkat pendidikan mereka secara umum rendah, yaitu; 82 % SD ke bawah, 12 % SLTP, 5.5 % SLTA dan 0.5 % diploma dan sarjana. Karena tingkat pendidikannya

rendah, maka kualitas SDM nya juga rendah yang antara lain terlihat dari beberapa indikator kompetensi, yaitu; (1) Kompetensi IPTEK nya rendah (2) kompetensi wirausahanya rendah (3) kompetensi teamworknya rendah (4) kompetensi berorganisasinya rendah. dan (5) kompetensi bermitra usahanya rendah (Padmowiharjo, 2004).

Pengembangan SDM kelompok pelaku khususnya petani diarahkan untuk menciptakan profil petani yang professional, mandiri, respon terhadap inovasi dan bangga sebagai petani, karena dengan bertani dapat menjamin kehidupan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Bagi pengusaha pertanian diarahkan pada peningkatan profesionalisme, manajemen modern, berani ambil resiko, mampu bersaing, kemitraan dengan petani, aksesibilitas yang tinggi dan lain - lain. Bagi pengumpul/pengepul yang bersentuhan langsung dengan petani/peternak, pengembangan SDM diarahkan pada peningkatan kapasitas (Capacity building), sehingga dapat akses ke permodalan, sarana/prasarana, akses ke industri, memiliki legalitas, membentuk jaringan yang

bermuara pada peningkatan permintaan, perbaikan mutu, kepastian pasar dan lain - lain pada produk pertanian, sehingga mereka dapat mendorong peningkatan produksi melalui peningkatan permintaan (demand side).

Sedangkan bagi pedagang besar, pedagang antar pulau, eksportir, importir, pengembangan SDM nya diarahkan pada peningkatan semangat dan komitmen untuk menciptakan win - win solution dengan produsen petani.

2. Kelompok Pembina: yang terdiri dari aparat pertanian, petugas lapangan (PPL), kepala desa/lurah, pemuka masyarakat, Pemda Tk I dan II dan instansi lain.

Pengembangan SDM kelompok pembina terutama PPL diarahkan untuk menciptakan PPL yang profesional, dinamis, mandiri, cinta dan bangga sebagai penyuluh, mobile, kreatif, inovatif, tanggung jawab dan lain - lain, sehingga dapat melakukan pembinaan dan penyuluhan dengan baik yang bermuara pada peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian.

Sedangkan untuk kelompok pembina lainnya perlu dibekali pengetahuan - pengetahuan praktis dan wawasan yang luas mengenai pembangunan pertanian, dengan demikian diharapkan mereka dapat membantu dan memperjuangkan kepentingan petani dan pertanian.

3. Kelompok Penyediaan Input; meliputi sumber daya manusia dibidang perbankan, industri benih, pupuk, pestisida, alsintan, industri pakan, industri vaksin, inseminasi dan lain - lain.

Pengembangan SDM Kelompok penyedia, input diarahkan kepada upaya terciptanya pemahaman praktis tentang pembangunan pertanian, sehingga flow input dan kredit dapat sampai ke produsenpetani dalam waktu yang tepat, jumlah dan kualitas yang tepat, tepat sasaran, efisien dan efektif.

4. Kelompok Pasca panen; meliputi sumber daya manusia yang berusaha di bidang industri packing, gudang, transportasi, sortasi dan grading, cool storage, rumah potong, TA/STA dan lain - lain, yang dapat memberikan nilai tambah bagi produk-produk pertanian.

Pengembangan SDM kelompok pasca panen diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas, peningkatan kemampuan untuk perbaikan dan perluasan teknologi, aksesibilitas terhadap modal, informasi dan pasar, peningkatan dan perluasan wawasan, penguatan kemitraan, perbaikan mutu, fasilitas aspek - aspek legalitas dan lain - lain.

5. Kelompok Penyelia; terdiri dari perguruan Tinggi, DPR/DPRD, LSM, Pers, organisasi profesi dan lain-lain, yang dapat membentuk opini, dapat melakukan fungsi advokasi, profokasi promosi dan proteksi bagi pembangunan pertanian.

Pengembangan SDM Kelompok Penyelia, diarahkan pada upaya - upaya memperkuat barisan untuk memperjuangkan kepentingan pertanian nasional, memperjuangkan kepentingan petani, menjadi kelompok advokasi, provokasi dan proteksi pertanian Indonesia termasuk di dunia internasional.

6. Kelompok Pendukung; meliputi sumberdaya manusia dibidang peneliti, asosiasi, keamanan, bea cukai, bursa, pasar lelang dan lain - lain, yang merupakan faktor-faktor pendukung pembangunan

pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengembangan SDM ini diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap pembangunan pertanian dibidang teknologi, informasi, pasar, keamanan, iklim usaha, perlindungan produk pertanian dan lain-lain.

### **Civitas Akademika Universitas Sahid yang saya hormati,**

Kini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana ketahanan pangan kita. pangan adalah kebutuhan dasar manusia, pangan selalu menempati prioritas yang tinggi dalam pembangunan ekonomi nasional. pangan yang cukup dan berkualitas merupakan prasyarat bagi perkembangan intelegensia secara optimal yang bermuara pada SDM berkualitas. Sejarah menunjukkan bahwa ketahanan pangan (food security) sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik bahkan ketahanan nasional secara keseluruhan yang juga berarti kemandirian bangsa.



Ketahanan pangan juga merupakan pilar bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Hal ini dipandang strategis karena tidak satupun negara dapat membangun perekonomiannya tanpa terlebih dahulu menyelesaikan pangannya. Khusus bagi Indonesia sektor pangan adalah sekaligus sektor penentu tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk yang bekerja di on farm yang terdapat di perdesaan yang terdiri dari petani berlahan sempit dan buruh tani yang sebagian besar adalah rakyat miskin. Tidak kalah pentingnya pangan juga menentukan kesejahteraan konsumen miskin perkotaan yang sebagian besar porsi pendapatannya digunakan untuk konsumsi.

Secara makro pada tahun 2004, ketahanan pangan nasional dapat dikatakan lebih mantap. Hal ini terlihat dari kemampuan nasional untuk memenuhi kebutuhan pangan 215 juta penduduk semakin meningkat dan fakta menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir tidak pernah mengalami krisis pangan. Survei Rumah Tangga yang dilakukan BPS menunjukkan bahwa asupan energi penduduk meningkat dari 1.852 kalori/kapita/hari pada tahun 1999 menjadi 1.986 kalori/kapita/hari pada tahun 2002, sementara asupan protein meningkat dari 48.67

gr/kap/hari pada tahun 1999 menjadi 54.42 gr/kap/hari pada tahun 2002.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci berikut adalah kondisi beberapa komoditas penting pangan yang karena posisinya dalam pangan menjadi barometer ketahanan pangan nasional.

## **1. Beras**

Produksi padi tahun 2004 mencapai 53,67 juta ton atau setara dengan 33.96 juta ton beras, meningkat sekitar 2.93 persen dibanding produksi tahun 2003. Harga beras relatif stabil, bahkan secara kumulatif cenderung mengalami penurunan, kendatipun pemerintah melalui SK Nomor 9/MPP/Kep/I/2004 telah melarang importasi beras sejak tanggal 20 Januari 2004. Impor beras semakin menurun dari 4.8 juta ton pada tahun 1999 menjadi sekitar 1 juta ton pada tahun 2003 dan bahkan pada tahun 2004 mengalami surplus. Keadaan ini menggambarkan bahwa pasokan beras dalam negeri cukup aman.



## **2. Kacang Tanah**

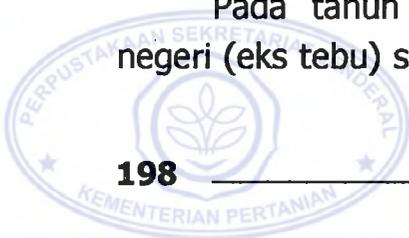
Produksi kacang tanah tahun 2004 mencapai 785.526 ton, sedangkan kebutuhan konsumsi diperkirakan mencapai 720.662 ton. Dengan demikian secara nasional akan terjadi surplus sebesar 64.864 ton. Harga kacang tanah juga relatif stabil dan bahkan cenderung mengalami penurunan, keadaan ini menunjukkan bahwa pasokan akan kebutuhan kacang tanah cukup tersedia.

## **3. Cabe Merah**

Produksi cabe merah tahun 2004 mencapai 838.098 ton. Konsumsi mencapai 775.140 ton. Dengan demikian pada tahun 2004 terjadi surplus sebesar 62.958 ton harga cabe sepanjang tahun 2004 juga relatif stabil dengan kecenderungan menurun dan tidak terjadi fluktuasi harga yang tajam. Kondisi ini menunjukkan bahwa keseimbangan jumlah pasokan dan kebutuhan cabe merah semakin baik.

## **4. Gula Pasir**

Pada tahun 2004 produksi gula pasir dalam negeri (eks tebu) sebesar 2 juta ton. Jumlah konsumsi



gula pada tahun 2004 sebesar 2.5 juta ton, sehingga terjadi defisit gula sebesar 0.5 juta ton. Namun dengan ketersediaan cadangan stock awal tahun 2004 sebesar 670.624 ton dan impor sebesar 202.065 ton, kebutuhan konsumsi dapat terpenuhi.

## **5. Minyak Goreng**

Produksi minyak goreng tahun 2004 mencapai 8.938 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi untuk masyarakat dan industri sebesar 3.253 juta ton. Secara nasional ketersediaan CPO pada tahun 2004 masih terjadi surplus sebesar 703.945 ton dan ditambah dengan stock awal Januari 2004 sebesar 592.500 ton, dengan demikian ketersediaan minyak goreng tahun 2004 cukup aman. Harga minyak goreng relatif stabil dengan kecenderungan mengalami kenaikan harga dalam tingkat yang wajar.

## **6. Daging Sapi**

Pasokan daging sapi pada tahun 2004 mencapai 465.024 ton. Kebutuhan tersebut diperkirakan dapat dipenuhi dari penyediaan dalam negeri yaitu sebesar 413.679 ton dari penyediaan sapi sebanyak 2.079 ekor dan sisanya dari impor daging beku.

## **7. Daging Ayam**

Kebutuhan daging ayam selama tahun 2004 diperkirakan sebesar 935.893 ton dan penyediaan kebutuhan daging ayam sebesar 897.391 sehingga masih terdapat defisit sekitar 38.000 ton. Kebutuhan daging tersebut diperkirakan akan dapat dipenuhi dari produksi ayam ras, daging ayam buras dan itik dalam negeri. Harga daging ayam pada tahun 2004 cukup berfluktuasi karena adanya wabah flu burung, namun akhir - akhir ini harga daging ayam sudah cukup stabil dengan kecenderungan mengalami peningkatan.

## **8. Telur**

Pasokan telur ayam ras pada tahun 2004 diperkirakan akan mencapai 692.742 ton, sedangkan kebutuhan diperkirakan sebesar 666.358 ton sehingga terdapat surplus sebesar 26.384 ton.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Walaupun secara makro dan agregatif ketersediaan pangan telah memadai, namun secara mikro ketahanan pangan sebagian penduduk Indonesia masih rendah. Kondisi ini disebabkan tingkat

kemiskinan dan pengangguran yang tinggi serta sebaran penduduk yang sangat luas yang mengakibatkan lemahnya kemampuan akses memperoleh pangan, Hal ini apabila tidak ditangani secara tepat dan cepat akan berdampak pada pembentukan generasi yang lemah fisik maupun intelegensia pada waktu yang akan datang.

Pada tingkat global/nasional, ketahanan pangan merupakan fungsi dari produksi, persediaan (stock) dan perdagangan (ekspor - import). Pada tingkat rumah tangga/individu, ketahanan pangan selain dipengaruhi ketersediaan, ditentukan pula oleh kemampuan akses memperoleh pangan tersebut. Sistem dan mekanisme yang menghantar dari ketersediaan menjadi ketahanan pangan nasional adalah bekerjanya suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan (Produksi, cadangan, impor), subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pada tingkat lokal yang memungkinkan partisipasi masyarakat turut menentukan proses pencapaian ketahanan pangan nasional.

Dalam membangun ketahanan pangan nasional, penyediaan pangan dapat diperoleh dari impor

disamping produksi dalam negeri. Namun untuk Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup besar, menggantungkan penyediaan pangan dari pasar internasional akan beresiko tinggi. Selain dibutuhkan devisa yang cukup besar, juga dihadapkan pada pasokan bahan pangan dunia yang cukup tipis (hanya sekitar 10 - 20% dari total produksi dunia). Oleh karena itu, bagi Indonesia tidak ada pilihan selain membangun ketahanan pangan yang berakar pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal.

Untuk itu, pemenuhan kebutuhan pangan nasional harus bertumpu seoptimal mungkin pada kemampuan sumberdaya domestik yang dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen maupun melindungi produsen. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis global yang mengarah pada kuatnya liberalisasi perdagangan dan perubahan lingkungan domestik yang menuntut ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan yang cukup, maka perlu diterapkan kebijakan "proteksi dan promosi" secara konsisten. Prinsip kebijakan ini adalah pemerintah memfasilitasi dan membantu tumbuh kembangnya usaha agribisnis khususnya petani diseluruh daerah

guna meningkatkan daya saingnya serta merealisasikan keunggulan komparatif dari potensi yang ada dan sekaligus melindungi agribisnis domestik dari praktek unfair trade negara lain. Dengan demikian diharapkan dalam jangka panjang sektor pertanian dapat berkiprah dalam perdagangan dunia dan sekaligus dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional yang juga pondasi utama kemandirian bangsa.

### **Civitas Akademika Universitas Sahid yang saya hormati,**

Uraian yang saya sampaikan dalam orasi ilmiah ini, hendaknya menjadi bekal bagi para wisudawan dan wisudawati dalam mengarungi kehidupan selanjutnya. Percayalah lulus sarjana bukan segala-galanya namun ia adalah pintu gerbang utama sekaligus modal untuk menghadapi segala tantangan pada kehidupan nyata kelak. Saya tidak ingin menakut-nakuti adik-adik dengan memberikan gambaran suram bangsa kita. Saya ingin memberikan tantangan kepada lulusan Universitas Sahid untuk turut memajukan sektor pertanian yang sangat luas cakupannya ini dan percayalah bahwa masa depan



bangsa kita sangat cemerlang apabila lulusan-lulusan sarjananya memiliki kepribadian yang kuat, pantang menyerah, kecerdasan yang mumpuni dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Saya percaya apa yang wisudawan dan wisadawati telah peroleh selama menempuh pendidikan di Universitas Sahid sangat cukup dan memadai untuk menghadapi tantangan yang saya uraikan di atas.

Akhirnya saya capkan selamat kepada semuanya, saya percaya amanah kesarjanaan yang adik-adik peroleh tidak akan adik-adik sia-siakan. Dengan tangan terbuka saya selaku Menteri Pertanian mengajak lulusan Universitas Sahid untuk turun dan terjun ke dunia pertanian. Dunia pertanian membutuhkan anda !

***Viva Academica, Viva Profesores.***

Billahitaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 2 Maret 2005

Menteri Pertanian RI

ttt

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS.



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN RI  
PADA PANEN JAGUNG  
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan  
5 Maret 2005**

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

- Saudara Gubernur Kalimantan Selatan,
- Saudara Ketua DPRD, Propinsi Kalimantan Selatan, Saudara Bupati Tanah Laut,
- Saudara para pejabat pusat dan instansi terkait, Saudara yang mewakili assosiasi dan organisasi profesi, para petani serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanallahuwata'ala yang atas perkenan-Nya memungkinkan kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga Allah Subhanallahuwata'ala tetap melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pembangunan sektor pertanian.



Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya karena pada hari ini dapat bertatap muka dengan saudara-saudara sekalian dalam rangka kunjungan kerja saya ke Kalimantan Selatan yang merupakan kunjungan kerja yang pertama ke pulau Kalimantan ini semenjak saya diangkat sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

**Saudara-saudara yang saya hormati,**

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada para petani, pengusaha, petugas dan stakeholders pertanian di seluruh Indonesia dan khususnya di Propinsi Kalimantan Selatan atas keberhasilan meningkatkan produksi tahun 2004 yang berdasarkan Angka Ramalan Sementara (ASEM) Badan Pusat Statistik dimana produksi Padi mencapai 54/06 juta ton GKG, jagung 11/16 juta ton pipilan kering dan kedele 721 ribu ton pipilan kering.

Produksi padi yang kita capai tersebut merupakan angka yang tertinggi selama ini kita peroleh dan mengantarkan kita kepada era swasembada beras kembali setelah 20 tahun yang

lalu kita capai, malahan kita sudah mulai memasuki era ekspor dimana bulan Januari - Februari sudah 50 ribu ton di ekspor ke Negara Afrika oleh Perum Bulog. Pada tahun 2005, berdasarkan Angka Ramalan I (ARAM I) BPS, produksi padi nasional tercatat 53,12 juta ton, Jagung 11,49 juta ton, Kedele 0,72 juta ton, Ubikayu 19,38 juta ton, Kacang Tanah 0,84 juta ton,

Kacang hijau 0,32 juta ton dan Ubijalar 1,82 juta ton. Dibanding Angka Ramalan I (A RAM I) tahun 2004, produksi padi mengalami kenaikan 0,03%, Jagung naik 1,20 %, Kedele naik 1,42 %, Ubikayu naik 0,98 %, Kacang Tanah naik 1,68 %, Kacang Hijau naik 0,15 % dan Ubijalar turun 1,91 %. Kita bertekad pada Tahun 2005 produksi terus meningkat sehingga surplus beras yang sudah dicapai lebih dari 2 juta ton pada tahun 2004 dapat ditingkatkan lagi.

### **Saudara-saudara yang saya hormati,**

Selain komoditi beras, Jagung merupakan komoditi yang tidak kalah pentingnya dimana komoditi ini merupakan bahan baku industri pakan

ternak yang paling banyak dibutuhkan, oleh karena itu kebutuhan jagung akan terus meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pakan ternak. Produksi Jagung 3 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, dengan rata-rata pertumbuhan 6,20 %. Kita terus menggalakkan produksi jagung agar seluruh kebutuhan dapat dipenuhi dari dalam negeri dan bertekad dapat menjadi negara pengekspor, mengingat potensi yang kita miliki seperti lahan dan musim dimana kita dapat tanam dan panen sepanjang tahun, di musim hujan ditanam di lahan kering dan di musim kemarau ditanam di lahan sawah tadah hujan. Sehingga kontinuitas produksi dapat kita capai supaya sejalan dengan perilaku pabrikan yang membutuhkan bahan baku merata sepanjang tahun.

Lahan kering yang kita miliki sangat luas tersebar di Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Kalimantan seperti pengembangan Jagung di Kalimantan Selatan ini. Upaya kita untuk meningkatkan produksi sangat memungkinkan dilakukan karena (1)

Masyarakat sudah memahami bahwa jagung merupakan komoditi bisnis yang menguntungkan semua pihak; (2) Membaiknya mekanisme perdagangan jagung akibat berkembangnya kemitraan; (3) Adanya benih hibrida yang dapat meningkatkan produksi 6 - 8 ton/ha; (4) Adanya kelembagaan yang menangani jagung yaitu Masyarakat Agribisnis Jagung (MAJ) yang tersebar di setiap Kabupaten dan Propinsi serta ditingkat Nasional ada Dewan Jagung Nasional (DJN) yang akan memperjuangkan kepentingan Masyarakat Perjagungan.

### **Saudara-saudara yang saya hormati,**

Membangun sektor pertanian ke depan berarti mensejahterakan petani, peternak, pekebun dan masyarakat pertanian lainnya. Oleh sebab itu pembangunan pertanian tidak semata-mata peningkatan produksi saja, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu pembangunan pertanian akan melibatkan seluruh elemen-elemen masyarakat baik langsung maupun tidak, yang akan bergerak

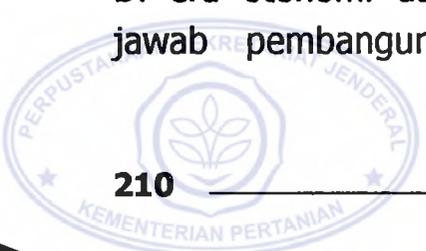
dalam hal-hal yang sifatnya dibutuhkan semua orang tanpa kecuali, yang saling berkaitan dan berhubungan lintas daerah dan negara, dan hal-hal yang bersifat moral hazard seperti pengujian, mutu, standarisasi, harmonisasi dan sebagainya yang terkait dengan konsumen.

### **Saudara-saudara yang saya hormati,**

Saya merasa lebih optimis bisa meningkatkan produksi dan pendapatan petani serta masyarakat apabila kita bekerja bersama-sama dan saling bersinergi mengingat bisnis pada Subsektor tanaman pangan merupakan bisnis yang besar dan luas karena melibatkan lebih dari 70 juta Orang dengan perputaran modal kurang lebih 170 trilyun per tahun. Oleh sebab itu prinsip kerjasama yang saling menguntungkan antara petani dan pengusaha pertanian harus terus kita kembangkan seperti yang sudah dilakukan di Kabupaten Tanah Laut ini.

### **Saudara-saudara Yang Saya Hormati,**

Di era otonomi daerah penekanan dan tanggung jawab pembangunan berada di daerah maka



peranan dan wewenang dari Saudara Gubernur, Bupati dan Kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan sangat besar di dalam menentukan warna dan arah bagi keberhasilan pencapaian pembangunan pangan tersebut.

Saya berharap banyak kepada Saudara Gubernur, Bupati dan Kepala Dinas agar dapat menggerakkan dan mendorong aparat instansi terkait bersama stake holder hulu dan hilir melakukan Program Aksi untuk menunjang keberhasilan swasembada pangan dalam kontek otonomi yang sudah berada ditangan Saudara.

Sementara itu, Pemerintah Pusat berusaha menciptakan kebijakan makro yang kondusif dan berpihak kepada petani seperti kebijakan penyediaan modal! kredit, pengamanan harga, fiskal dan bea masuk, dan penetapan masa pelarangan impor seperti beras yang sudah efektif kita lakukan pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 dimulai 1 Januari 2005 sid 30 Juni 2005 juga kita berlakukan, kita berharap dapat diteruskan sampai akhir tahun.



Saya minta bersama sama kita dapat mengawasi kebijakan tersebut.

**Hadirin yang saya Hormati,**

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih kepada para petani dan semua pelaku Agribisnis yang telah bekerja keras meningkatkan produksi tanaman pangan dan saya berharap agar selalu melakukan terobosan inovasi baru guna peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani.

Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, atas perhatian Saudara-saudara sekalian saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tanah Laut, 5 Maret 2005

Menteri Pertanian RI,

ttd

Dr.Ir. Anton Apriyantono MS



**Keynote Speech Menteri Pertanian  
Pada Seminar & Lokakarya Nasional  
*"Neoliberalisme Sebagai Tantangan Kebijakan  
Pembangunan Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan  
Kesejahteraan Petani"***

**Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Malang  
Tanggal 12 Maret 2005**

**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN  
NASIONAL PADA KABINET INDONESIA BERSATU**

**Yang terhormat,**

- Sdr. Rektor Universitas Brawijaya,
- Sdr. Ketua HKTI,
- Saudara-Saudara peserta Seminar & Lokakarya
- Nasional

**Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

**Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwataala atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul disini untuk mengadakan Seminar & Lokakarya**

Nasional dengan topik "Neoliberalisme Sebagai Tantangan Kebijakan Pembangunan Pertanian dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Petani". Saya menilai seminar ini sangat penting karena topik yang dibahas mengenai kesejahteraan petani yang merupakan tujuan utama pembangunan pertanian. Topik yang sangat penting ini memang memerlukan sumbangan pemikiran dari berbagai kalangan yang luas. Saya sangat menghargai panitia penyelenggara atas terselenggaranya Seminar & Lokakarya Nasional yang sangat penting ini. Diharapkan diskusi ini dapat menghasilkan rumusan konkrit dan bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah terutama Departemen Pertanian dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan pertanian.

### **Saudara-saudara sekalian,**

Pembangunan pertanian yang kita lakukan sampai saat ini telah menunjukkan hasil-hasil yang nyata dilihat antara lain dari pertumbuhan PDB, perkembangan produksi, peningkatan ekspor dan pementapan ketahanan pangan. Namun demikian, pembangunan pertanian masih

## **Saudara-saudara sekalian,**

Dalam periode 2005-2009, pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai visi: "terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani".

Pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah pendayagunaan secara optimal sumberdaya pertanian dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, yaitu: (1) membangun SDM aparatur profesional, petani mandiri dan kelembagaan pertanian yang kokoh; (2) meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan; (3) memantapkan ketahanan dan keamanan pangan; (4) meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian; (5) menumbuhkembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi perdesaan; dan (6) membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

Dalam kurun waktu yang sangat panjang pembangunan pertanian selalu diidentikkan dengan kegiatan produksi usahatani semata (proses budidaya atau agronomi). Kondisi ini menyebabkan pada masa lalu kegiatan pertanian lebih berorientasi kepada peningkatan produksi dan citra yang kurang menguntungkan bagi pembangunan sektor pertanian. Hal ini memberikan pandangan seakan-akan pembangunan pertanian terlepas dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dan juga bukan merupakan bagian dari pembangunan wilayah.

Dengan orientasi kepada produksi, memang kita telah relatif mampu menyediakan pangan dan bahan baku industri domestik. Namun keberhasilan peningkatan produksi pertanian tersebut ternyata belum diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petaninya. Hal ini antara lain karena kebijakan di bidang produksi tidak diikuti oleh kebijakan pendukung lain secara sinergis. Kondisi pembangunan pertanian seperti itu antara lain berkaitan dengan pembinaan pembangunan pertanian yang masih tersekat-sekat oleh banyak Departemen, sehingga kebijakan pengembangan

pertanian seringkali tidak sinkron antar lembaga terkait akibat perbedaan kepentingan dari masing-masing sektor (Departemen).

Belajar dari kelemahan tersebut, sejak Pelita VI pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan pembangunan agribisnis. Pembangunan agribisnis, yang pada hakekatnya menekankan kepada tiga hal, yaitu Pertama, melalui pembangunan agribisnis, pembangunan pertanian ditingkatkan dari pendekatan produksi ke pendekatan yang berdasarkan bisnis. Dengan orientasi kepada bisnis maka aspek usaha dan pendapatan menjadi dasar pertimbangan utama. Kedua, dalam pembangunan agribisnis pembangunan pertanian bukan semata pembangunan sektoral namun juga terkait dengan lintas/inter-sektoral. Pembangunan pertanian sangat terkait ditentukan oleh agroindustri hilir, agroindustri hulu dan lembaga jasa penunjang. Dan ketiga, Pembangunan pertanian bukan sebagai pembangunan pengembangan komoditas secara parsial, melainkan sangat terkait dengan pembangunan wilayah, khususnya perdesaan yang

berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat pertanian.

**Saudara sekalian yang saya hormati,**

Pada dasarnya pelaku pembangunan pertanian adalah masyarakat dan sektor swasta. Pemerintah berperan memfasilitasi bagi peningkatan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat tersebut, serta mengatur agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara adil. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Departemen Pertanian telah menetapkan perlu jiwa (spirit) dan nilai (value) yang merupakan ruh pembangunan yang melandasi penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan, khususnya sektor pertanian, tanpa dilandasi ruh yang menjadi dasar pijakan akan kehilangan arah dan semangat yang akhirnya dapat menyimpang dari tujuan dan sasaran pembangunan. Apalagi kegiatan sektor pertanian yang obyek pembangunannya adalah benda hid up, yakni manusia, hewan, tanaman dan lingkungannya, maka ruh pembangunan sangat diperlukan, agar pembangunan tidak bersifat eksploitatif dan merusak kelestarian dari obyek pembangunan. Ruh

pembangunan pertanian dimaksud adalah: "Bersih dan Peduli". Bersih berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli berarti memberikan fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat pertanian) di atas kepentingan pribadi dan golongan (demokratis) dan aspiratif.

Sejalan dengan visi pembangunan pertanian seperti dikemukakan di depan, maka misi yang akan dilaksanakan oleh Departemen Pertanian adalah:

- (1) Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;
- (2) Mendorong pembangunan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan;
- (3) Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman konsumsi; Mendorong peningkatan peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional;
- (4) Meningkatkan akses pelaku usaha pertanian terhadap sumberdaya dan pelayanan;

Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan domestik dan global.

**Saudara sekalian yang saya hormati,**

Dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan pembangunan di atas, paling tidak ada tujuh strategi umum yang akan ditempuh, yaitu:

- (1) Melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas KKN,
- (2) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian,
- (3) Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan,
- (4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan memberdayakan SDM pertanian,
- (5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian,
- (6) Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna,
- (7) Mempromosikan dan memproteksi komoditas pertanian.

## **Saudara-saudara sekalian,**

Dalam lima tahun mendatang, program pembangunan pertanian akan difokuskan pada: (1) peningkatan ketahanan pangan, (2) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, dan (3) peningkatan kesejahteraan petani. Ketiga program tersebut secara bertahap diharapkan mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan petani.

Disamping itu, pembangunan pertanian juga sangat memerlukan dukungan kebijakan dari sektor lain. Kebijakan tersebut antara lain kebijakan makro, kebijakan pengembangan industri, kebijakan perdagangan, kebijakan pengembangan infrastruktur, kebijakan pengembangan kelembagaan, serta kebijakan pendayagunaan dan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan.

## **Saudara sekalian yang saya hormati,**

Sebagai konsekuensi dari negara yang turut meratifikasi perjanjian Agreement General on Tariff

and Trade dan World Trade Organization (GATT/WTO), Indonesia harus mengikuti aturan yang telah disepakatinya. Pada krisis ekonomi tahun 1998, sesuai dengan rekomendasi IMF, Indonesia telah menurunkan seluruh tarif bea masuk komoditas pertanian. Komitmen menghilangkan kebijakan ekonomi dan perdagangan yang dapat menimbulkan distorsi pasar ternyata tidak dilaksanakan oleh semua negara, sehingga petani Indonesia dihadapkan pada persaingan yang tidak adil dengan petani dari negara lain yang dengan mudah mendapat perlindungan tarif dan non-tarif serta subsidi langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus menerapkan kebijakan proteksi sekaligus promosi terhadap produk-produk pertanian strategis antara lain beras, gula, jagung dan kedelai. Kebijakan proteksi yang dapat dilakukan antara lain penetapan tarif impor dan pengaturan impor, subsidi sarana produksi, pengaturan harga output maupun subsidi bunga kredit untuk modal usahatani. Untuk kebijakan promosi pemerintah memfasilitasi upaya-upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, perbaikan kualitas dan standarisasi produk

pertanian, peningkatan akses pasar melalui kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri.

Banyak kemajuan yang kita capai dalam perundingan di forum internasional terutama forum WTO. Melalui konsep SP (Strategic Product) dan SSM (Special Safeguard Mechanism) yang kita usulkan mendapat dukungan dari 33 negara negara berkembang sehingga terbentuk Aliansi SP/SSM yang dikenal dengan G-33 dan Indonesia ditunjuk sebagai ketua. Berbagai pertemuan G-33 telah dan akan terus dilakukan untuk menggalang kekuatan agar konsep SP dan SSM masuk dalam perjanjian WTO.

### **Saudara sekalian yang saya hormati,**

Untuk mewujudkan semua itu, kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari semua stakeholders yang terlibat dalam pembangunan pertanian, antara lain masyarakat, swasta, LSM, Legislatif, pemerintah daerah dan tentunya para pakar dan akademisi. Dengan demikian hasil diskusi yang banyak melibatkan akademisi ini akan menjadi bahan masukan penting bagi kami dalam

mempertajam dan memfokuskan prioritas pembangunan pertanian.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kepada seluruh peserta diskusi nasional saya sampaikan selamat berdiskusi dan semoga dapat menghasilkan ide-ide yang baik dan konstruktif bagi pembangunan sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran petani kita. Kami yakin, dengan sinergi dan kerja keras kita sekalian, sosok pertanian yang kita cita-citakan, Insya Allah dapat kita wujudkan.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menteri Pertanian

ttd

Dr. Ir. Anton Apriyantono. MS



## Keynote speech Menteri Pertanian RI

Pada

Seminar Nasional Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan  
Indonesia (IMAKAHI) di Fakultas Kedokteran Hewan

Institut Pertanian Bogor

26 Maret 2005

Tema: Pembangunan Pertanian Berbasis Peternakan di  
Era Pasar Bebas Asean - China 2010

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

- Yth. Saudara Rektor Institut Pertanian Bogor,  
beserta segenap jajarannya;
- Yth. Saudara Para Dekan Fakultas Kedokteran  
Hewan seluruh Indonesia;
- Yth. Saudara-saudara para Narasumber;
- Yth. Saudara-saudara para Mahasiswa Fakultas  
Kedokteran Hewan serta hadirin dan hadirat serta  
para undangan yang saya hormati.

1. Pertama tama marilah kita memanjatkan Puji dan  
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah  
Subhanahu Wata'ala karena atas perkenannya kita  
semua dapat berkumpul pada hari ini untuk  
menghadiri suatu acara seminar tentang Profesi  
Dokter Hewan di Era Pasar Bebas ASEAN - China

2010 Dalam pengembangan Agribisnis Pertanian dan Kesehatan Hewan Nasional" di Kampus FKH-IPB ini dalam keadaan sehat wal afiat tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan kepada Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia (IMAKAHI) berikut segenap kepanitiaian seminar yang telah memprakarsai kegiatan ini, karena itu hasil seminar ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pembangunan pertanian khususnya pembangunan subsektor peternakan.

2. Seminar hari ini dimana saya diminta menyampaikan tentang "Pembangunan Pertanian Berbasis Peternakan di Era Pasar Bebas Asean - China 2010" saya nilai sang at penting oleh karena saat ini kita sedang mempersiapkan perampungan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pertanian Tahun 2005 - 2009, sehingga saran pendapat dan pemikiran yang mungkin dapat muncul dalam kegiatan seminar ini, selanjutnya dapat memberi masukan untuk memperkaya wawasan merumuskan rencana strategis pembangunan pertanian khususnya yang berkaitan

dengan pembangunan pertanian yang berbasis peternakan. Dalam mempersiapkan Renstra pembangunan pertanian tentu saja kita berharap sumbang saran dari seluruh elemen masyarakat termasuk masyarakat kampus kedokteran hewan.

3. Pada hakekatnya konsep pembangunan pertanian tersebut sudah sewajarnya kita berikan kesempatan sebesar besamya kepada masyarakat untuk mengemukakan pemikirannya karena itu saya sangat mengharapkan kepada para peserta seminar untuk menyampaikan pandangan, pendapat dan pemikirannya dengan dilandasi oleh pemahaman nilai-nilai akademik yang dimiliki.
4. Sebagai salah satu sub sektor dari sektor pertanian, maka pembangunan peternakan menjadi bagian integral dari pembangunan pertanian. Program kebijakan pembangunan peternakan perlu diarahkan dan dirancang oleh dan untuk masyarakat demi peningkatan kesejahteraan petani-peternak. Oleh karenanya partisipasi masyarakat sangat diperlukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar kebijakan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Pemerintah berperan memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat tersebut. Untuk itu dana dekonsentrasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani-peternak dilakukan melalui pola Bantuan Pinjaman Langsung kepada Masyarakat (BPLM). Kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan dilakukan di daerah. Bantuan diberikan langsung melalui rekening kelompok dalam rangka penguatan modal pelaku agribisnis. Dana tersebut merupakan dana pinjaman langsung diterima oleh petani yang selanjutnya digulirkan kepada kelompok lain dalam kerangka pengembangan kawasan komoditas unggulan.

5. Saat ini Departemen Pertanian telah mengkaji ulang beberapa kebijakan yang dibuat termasuk UU No. 6/1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam menjalankan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan secara menyeluruh dan mengantisipasi kondisi global dalam Era Perdagangan Bebas. Artinya pemerintah bersedia menanggalkan kebijakan-kebijakan yang dipandang sudah tidak tepat lagi dengan tuntutan

perkembangan lingkungan strategis. Departemen Pertanian yakin bahwa ada kebijakan masa lalu yang dipandang sudah tidak relevan lagi saat ini termasuk beberapa surat-surat keputusan. Selanjutnya pemerintah senantiasa atau terus-menerus akan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas kebijakan yang dibuat, sehingga perbaikan dapat secara terus-menerus dilakukan. Prinsip-prinsip "learning" ini sebagaimana diketahui membutuhkan masa pembelajaran yang mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen strategis dan manajemen perubahan.

6. Kebijakan-kebijakan Pemerintah pada dasarnya akan berdampak kepada masyarakat luas, sehingga kebijaksanaan pemerintah perlu dikritisi, diberi saran bahkan perlu untuk disempurnakan dengan mengingat kondisi dan masukan-masukan dari masyarakat pemangku kepentingan (stake holder) yang dapat dijadikan sebagai input untuk penyempurnaannya. Pada hakekatnya pemerintah harus terus melakukan proses learning walaupun merupakan rumusan kebijakan publik, karena proses learning tersebut sangat penting untuk

merumuskan kebijakan dan terus melakukan perubahan melalui interaksi antara seluruh elemen masyarakat yang pada gilirannya dapat dijadikan kebijakan yang mengakomodasi hasil interaksi tersebut.

7. Paradikma lama bahwa sektor pertanian semata-mata diartikan untuk meningkatkan produksi kini harus bergeser menjadi tujuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Sektor pertanian yang bertujuan semata-mata untuk meningkatkan produksi, terbukti tidak menjamin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dalam beberapa hal pendekatan peningkatan produksi semata tersebut bahkan telah memarjinalkan petani secara struktural dan kultural. Sehingga pada titik ini yang harus ditangani oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian adalah manusia petani itu sendiri dengan segala aspeknya. Kita kenai konsep ini sebagai konsep pembangunan yang berpusat pada manusia. Departemen Pertanian berprinsip bahwa penanganan kebijakan akan lebih difokuskan kepada manusia sebagai petaninya, dan bukan kepada komoditinya. Karena pada

dasarnya komoditi seperti sapi potong, kambing/domba, ayam buras, ayam ras dan itik serta komoditi lainnya adalah sekedar alat yang dianugerahkan oleh Allah swt untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Sekali lagi saya tegaskan bahwa komoditi itu sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

8. Sub sektor Peternakan telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan yang tinggi di sektor Pertanian. Sejak tahun 2003 sub sector Peternakan sudah sepenuhnya pulih dari terpaan krisis tahun 1998 - 1999. Level produksi seluruh komoditas peternakan sudah melampaui level tertinggi periode sebelum krisis. Pada tahun 2000 - 2003, laju peningkatan produksi ayam broiler dan petelur berturut-turut mencapai 23,4 dan 10,27 persen per tahun, padahal saat krisis ekonomi pernah mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu masing-masing 28,23 dan 8,92 persen per tahun.
9. Industri perunggasan ternyata mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, meskipun mengalami masalah besar ketika ditimpa krisis

moneter tahun 1998. Indikator akan hal ini adalah meningkatnya produksi pakan dari hanya 5,2 juta ton pada tahun 1994 menjadi kurang lebih 10,0 juta ton tahun 2003, dengan sempat terjadi penurunan menjadi 2 - 2,5 juta ton tahun 1998. Dari segi populasi pada tahun 1994 berkisar antara 600 - 750 juta ekor menjadi 800 - 950 juta ekor tahun 2004 walau pernah terjadi penurunan drastis menjadi 300 350 juta ekor di tahun 1998. Hal ini membuktikan bahwa perunggasan merupakan komoditas pertanian yang cukup handal dan cepat terjadi "penyembuhan" dari situasi krisis dibanding komoditas temak yang lainnya mis. sapi sehingga mampu berperan sebagai penyangga pembangunan peternakan. Begitu pula serangan penyakit AI pada unggas dapat dikendalikan dengan vaksinasi, perketatan biosecurity, perketatan pengawasan karantina dan stamping out secara selektif.

10. Dengan perubahan lingkungan global yang terjadi sekarang ini, akan dapat dirasakan pula perubahannya di kawasan ASEAN - China. Tuntutan konsumen terhadap mutu produk ternak misalnya daging, susu dan telur yang dikaitkan

dengan metode produksi yang menyangkut masalah kesejahteraan hewan, issue-issue lingkungan dan kesehatan masyarakat konsumen atau faktor keamanan pangan dan kehalalan produk akan semakin penting untuk diperhatikan terutama oleh para pengusaha penyedia produk ternak. Kata kunci yang mendasari hal ini adalah dikaitkan dengan manajemen kesehatan hewan, terutama untuk meraih peluang pasar luar negeri maupun di dalam negeri berdasar kualitas dan jaminan keamanan pangan, serta kehalalan produk.

11. Sebagaimana dimaklumi bahwa dengan di ratifikasinya General Agreement on Tarrif and Trade (GATT) - Word Trade Organization (WTO) melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Establishment of wro, maka mau tidak mau dan suka atau tidak suka kita harus masuk didalam kondisi terse but karena Indonesia turut serta dalam persetujuan perjanjian GATT. Kondisi tersebut setidaknya menetapkan aturan dan ketentuan didalam perdagangan antar negara yang pada khususnya dibidang pertanian banyak berkaitan dengan persyaratan persyaratan,

standar-standar dan mekanisme yang harus dilakukan oleh setiap Negara. Sedikitnya ada 4 (empat) persetujuan yang berhubungan profesi dokter hewan antara lain adalah Perjanjian Sanitary and Phitosanitary (SPS), Animal Welfare, lingkungan hidup dan Technical Barrier to trade (TBT).

12. Ditingkat ASEAN telah disepakati untuk memberlakukan perdagangan bebas diantara Negara-negara anggota pada tahun 2001/2002 yang lalu, sedang Indonesia yang merupakan bagian dari Asia maka dijalin suatu kerjasama ekonomi ditingkat regional yaitu Asia Pasific Economic Cooperation (Apec) yang diharapkan dapat terlaksana pada 2010. Dalam dunia perdagangan international tentu kita berharap tidak saja teradinya perdagangan yang bebas, tetapi juga harus dapat dilakukan secara adil (Fair trade).

13. Berkaitan dengan SPS Agreement terutama bersangkutan dengan persyaratan teknis produk produk pertanian yang diperdagangkan termasuk didalamnya produk-produk peternakan dalam hal

apa memerlukan keahlian/profesi tertentu untuk dapat melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis tersebut. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah produk peternakan dari suatu lokasi peternakan yaitu harus memenuhi "good farming practice" serta manajemen mutu yaitu Hazzard Analysis Critical Control Point (HACCP) oleh tenaga yang memiliki keahlian dan ketrampilan yang memadai. Produk yang dihasilkan ternak berupa daging, telur dan susu memiliki ketentuan teknis yang berbeda beda. Agar produk tersebut dapat memenuhi persyaratan teknis serta berkualitas yang pada gilirannya mempunyai daya saing di pasar Internasional. Dibidang obat hewan harus memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik (CPOHB). Bahkan kita patut berbangga bahwa Balai Besar Pengujian Mutu Obat Hewan (BBPMSOH) di Gunung Sindur merupakan satu-satunya Laboratorium Pengujian Mutu di ASEAN yang diakui dan diakreditasi oleh Negara-negara ASEAN.

14. Pembangunan peternakan di masa yang akan datang akan semakin terbuka luas, walau diakui

masih ada kendala terutama gangguan penyakit hewan. Food and Agriculture Organization (FAO) meramalkan bahwa tahun 2020 akan terjadi "Livestock Revolution, The Next Food Revolution", dimana permintaan akan pangan yang berasal dari ternak secara global akan meningkat, khususnya di Negara berkembang. Produk ternak akan meningkat lebih cepat dibanding bahan makanan lainnya sehingga mendominasi total output produksi bahan pangan dunia. Ini berarti bahwa fenomena revolusi peternakan bersifat "demand driven" yang berarti permintaan produk peternakan akan terus meningkat seiring peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

15. Penyakit-penyakit hewan menular utama yang tidak ditemukan di Indonesia atau dikenal sebagai penyakit eksotik, harus menjadi fokus kebijakan penolakan penyakit hewan yang diawasi disetiap pintu masuk oleh karantina. Penyakit tersebut antara lain adalah penyakit mulut dan kuku (PMK), Rinderpest, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), serta Avian influenza (AI). Semakin banyaknya tawaran produk hewani, serta gencarnya upaya untuk impor daging dari Negara-

negara tertular penyakit daftar A Office International des Epizooties (DIE) menyebabkan kita perlu meningkatkan kewaspadaan dengan pengawasan maksimal. Derasnya arus lalu lintas dan transportasi niaga darat, laut dan udara baik domestik maupun internasional perlu diantisipasi secara proporsional karena potensi masuk atau tersebarunya penyakit hewan akan semakin terbuka dan merupakan ancaman bagi kelestarian program pembangunan peternakan. Dalam pada itu untuk memperoleh tenaga ahli dan trampil sesuai syarat SPS-WTO, maka profesi kedokteran hewan sangat menentukan dalam memberi kontribusi peningkatan daya saing produk peternakan baik dipasar domestik maupun pasar internasional

16. Oleh karena itu tidaklah berlebihan pada kesempatan ini bila saya meminta kepada setiap Fakultas Kedokteran Hewan untuk dapat menghasilkan tenaga profesi yang mempunyai kemampuan profesionalisme yang tinggi, berkualitas dalam menjalankan tugas serta dalam jumlah yang cukup untuk mengantisipasi Era Perdagangan Bebas Asean - China 2010. Setiap perguruan tinggi yang menghasilkan dokter hewan

hendaknya didukung oleh kurikulum yang diinginkan dalam Era Perdagangan Bebas tersebut, sehingga pada gilirannya setiap dokter hewan memahami aturan dan ketentuan perdagangan hewan dan produk hewan baik domestik maupun internasional, memiliki pemahaman yang baik terhadap persyaratan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan karantina hewan serta standar standar yang diperlukan utk memenuhi setiap kegiatan perdagangan antar negara maupun domestik.

17. Perlu diketahui bahwa dokter hewan di Indonesia hanya dihasilkan oleh 5 (lima) perguruan tinggi di Indonesia, sehingga dapat di pahami bahwa jumlah lulusan setiap tahunnya sangat terbatas, sedangkan disisi lain sangat dibutuhkan untuk memenuhi keperluannya secara menyeluruh, dan karena itu terdapat kesenjangan antara kebutuhan dokter hewan dengan ketersediaan tenaga. Inilah salah satu problema yang juga menjadi tantangan dalam menghadapi Era Perdagangan Bebas ASEAN - China 2010. Pengembangan profesi Dokter Hewan dengan derajat kompetensi yang tinggi adalah sangat penting. Pengembangan

profesi ini sudah semestinya dikaitkan dengan pertumbuhan dunia jasa dan industri di satu pihak dan di lain pihak dengan sector riil dan usaha tani oleh para petani peternak di lapangan. Dengan demikian akan mampu menghadapi era global karena bukan saja berperan pada peningkatan produksi dan hasil ternak saja, tetapi juga dalam menjaga kebijakan pengamanan maksimal (maximum security) yang meliputi pemberantasan penyakit hewan menular, pengendalian zoonosis dan pencegahan bioterorisme dalam rangka menciptakan dan mempertahankan status" Country Disease Free Zone.

18. Dalam rangka "Menyongsong Masa Depan Peternakan di Era Pemerintahan Baru", Peran Pemerintah harus dikembalikan lagi kepada fungsinya, yaitu sebagai fasilitator. Dalam bahasa administrasi kebijakan publik peran pemerintah akan sangat terkait dengan hal hal yang bersifat public good yaitu yang terkait dengan kebutuhan semua orang tanpa terkecuali dan belum atau tidak bisa dilakukan oleh masyarakat seperti penanggulangan wabah penyakit hewan, karantina, penelitian dan pengembangan serta

pembangunan infrastruktur. Selain itu pemerintah juga berperan dalam berbagai aspek aspek yang terkait dengan externalities, yaitu hal hal yang terkait dengan aspek fasilitas perdagangan antar pulau, ekspor-impor dan sebagainya. Aspek lainnya yang menjadi beban pemerintah adalah hal hal yang terkait dengan economic of scale, yaitu pelayanan jasa masyarakat kesehatan hewan yang belum bisa dilakukan oleh swasta dan masyarakat dalam skala ekonomi tertentu. Akhirnya pemerintah berperan penting dalam penegakan moral hazard, yang menjamin bahwa bahan pangan hewani asal ternak untuk masyarakat tersebut adalah aman, sehat, utuh dan halal.

19. Akhirnya, saya ingin mengingatkan dengan beberapa tantangan besar ke depan untuk profesi Kedokteran Hewan dalam Pembangunan Pertanian Berbasis Peternakan di Era Perdagangan Bebas. Menurut saya tantangan-tantangan tersebut adalah; Pertama, sasaran untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Tantangan ini dapat dihadapi dengan pengalaman IPTEK kedokteran hewan dan pemanfaatan jasa pelayanan profesi di bidang peternakan; Kedua,

penyediaan bahan pangan pokok asal ternak, yaitu daging, telur dan susu. Dalam hal ini tantangan yang dihadapi adalah bagaimana ikut serta dalam pengamanan pada aspek food supply, food safety, food security dan food stability; Ketiga, perdagangan internasional, perlunya melakukan pendalaman dan penghayatan IPTEK yang berkaitan dengan Technical Barrier to Trade dan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Demikian antara lain pokok-pokok pikiran tentang Pembangunan Pertanian berbasis Peternakan dalam Era Perdagangan Bebas

**Wassalamualaikum wr wb.**

Bogor, 26 Maret 2005

Menteri Pertanian,

ttd

**Dr. Ir. Anton Apriantono, MSc.**



**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN  
PADA  
PENERBITAN MEDIA WARTA BULANAN  
IKATAN ARSITEK LANSEKAP INDONESIA  
(IALI)**

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh

Sektor pertanian telah lama menjadi tulang punggung perekonomian bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Keandalan sektor ini dalam memberikan sumbangannya terhadap penyediaan bahan kebutuhan pangan pokok bagi penduduknya, pemasok bahan baku industri dan sebagai penghasil devisa bagi negara telah menjadikannya sebagai sektor penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Adalah hal yang sangat tepat jika dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, sektor pertanian telah dipilih menjadi salah satu prioritas utama dalam membangun perekonomian nasional melalui revitalisasi pembangunan pertanian.

Pilihan untuk menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan pertanian



karena sektor pertanian merupakan bidang kegiatan ekonomi yang paling besar mempegunakan dan menyerap sumber daya lokal dan mengakar pada berbagai kegiatan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Pada sektor pertanian tidak kurang dari 40 juta keluarga tani berada di dalamnya yang mengelola tidak kurang dari 35 juta lahan usaha tani untuk kegiatan usaha tani pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dan lain sebagainya.

Kegiatan sektor pertanian sangat erat dengan penggunaan lahan dan pengendalian ekosistem. Ketersediaan dan penggunaan lahan merupakan faktor utama dalam menentukan produktivitas, skala usaha dan daya saing usaha dan pelestarian lingkungan. Sementara itu berkembangnya berbagai kegiatan non pertanian telah menyebabkan banyak lahan pertanian yang subur beralih fungsi untuk kegiatan non pertanian. Kondisi tersebut bukan hanya sekedar disebabkan oleh pertimbangan ekonomis saja, akan tetapi lebih dari itu, lahan-lahan pertanian sesungguhnya merupakan bidang yang relatif lebih mudah dan murah untuk dialih fungsikan dan dioptimalkan untuk kegiatan non pertanian, jika

dibandingkan dengan membuka lahan-lahan yang masih belum dimanfaatkan.

Masalah alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan berkurangnya lahan-lahan pertanian produktif dan berakibat menurunnya kesempatan melakukan proses budidaya dan peningkatan produksi, akan tetapi juga berakibat tidak bermanfaatnya infrastruktur pendukung lainnya dan perubahan agroekologi yang telah dibangun dengan biaya yang besar, seperti irigasi, jalan-jalan usaha tani dan ruang hijau terbuka.

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, kerap kali disebabkan oleh faktor pertimbangan nilai ekonomi semata; artinya pertimbangan tata ruang dan keseimbangan ekosistem hanya sebagai masalah ikutannya yang disikapi dengan secara parsial. Berbagai kasus yang terjadi dalam alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sering kali mengorbankan kepentingan tata ruang dalam memenuhi keinginan pengembangan kepentingan arsitektur lansekap semata. Akibatnya banyak lahan pertanian berubah

menjadi pemukiman, kawasan industri, sarana rekreasi dan lain sebagainya, tanpa memperhitungkan keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan.

Dalam melihat perkembangan itu, nampaknya diperlukan cara pandang baru dalam melihat interaksi berbagai bidang dalam tata ruang kita agar terjadi sinergi antara satu dengan lainnya; dan dengan itu pula dapat diperoleh nilai tambah yang saling melengkapi. Khusus kaitannya dengan penggunaan bidang dan ruang, sektor pertanian dalam konteks ini seharusnya tidak hanya dipandang hanya sebagai sebuah kegiatan untuk menghasilkan komoditi pertanian saja. Sektor pertanian bukan hanya dipandang dari fungsi produksi, akan tetapi juga memiliki fungsi keseimbangan lingkungan, fungsi konservasi dan fungsi rekreasi serta fungsi sosial lainnya. Dengan paradigma seperti itu, saya menilai bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian akan menjadi lebih terkendali.

Adanya organisasi profesi seperti Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI), diharapkan akan

mampu memberikan solusi yang terbaik terhadap berbagai permasalahan "Land Utility" yang dihadapi oleh masyarakat; khususnya permasalahan masih tingginya kecenderungan alih fungsi lahan di sektor pertanian. Melalui pemahaman profesionalnya yang komprehensif, kiranya IALI dapat memberikan advokasi serta pemberian informasi serta konseling kepada masyarakat, dunia usaha dan pemerintah terhadap utilisasi lahan untuk berbagai kegiatan dan keperluan melalui perencanaan, disain, konstruksi lansekap, pemeliharaan dan manajemen lansekap yang komprehensif dan ramah lingkungan.

Saya mengucapkan selamat dan menyambut baik diterbitkannya Warta Bulanan SWARA IALI, sebagai wahana komunikasi para profesional yang menanganai masalah arsitektur dan lansekap. Media tersebut dapat menjadi wahana komunikasi yang efektif untuk melakukan advokasi dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan arsitektur dan tata ruang di negeri ini. Dengan dilakukannya advokasi dan pemberian informasi diharapkan keberminatan dan kesadaran masyarakat akan

pentingnya arsitektur dan tata ruang bagi kepentingan interaksinya sehari-hari akan menjadi lebih meningkat. Terima kasih.

Wasalamualaikum waramatulah wabarakatuh

Menteri Pertanian RI,

ttd

**Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS**

